RENSTRA
RENCANA STRATEGIS

2024
2026

PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jl. Pahlawan No.16 Telp. (024) 8311713
S E M A R A N G
2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**

DAFTAR TABEL ..... **iii**

DAFTAR GAMBAR ..... **v**

BAB I PENDAHULUAN **I-1**

1.1. Latar belakang I-1

1.2. Landasan Hukum I-3

1.3. Maksud dan Tujuan I-6

1.4. SistematikaPenulisan I-6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI **II-9**

2.1. Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah II-16

2.2. Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah II-17

2.3. Sebaran Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022 ..... II-18

2.4. Sebaran Pegawai Berdasarkan Struktur Tahun 2022 ..... II-18

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS **III-37**

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi . III-37

3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis III-46

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN **IV-70**

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah IV-70

4.2. Manajemen Resiko Strategis Perangkat Daerah IV-74

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN **V-1**

5.1. Strategi V-80

5.2. Kebijakan V-81

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN **VI-89**

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... VII-193
BAB VIII PENUTUP VIII-199
LAMPIRAN.....

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Aset dan Sarana Prasarana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2016-2019	II-19
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Thaun 2018-2023	II-21
Tabel 2.3	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Tenaga Kerja dan Transigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023	II-31
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	III-37
Tabel 3.2	Persentase Pencari Kerja Yang di Tempatkan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022	III-46
Tabel 3.3	Perkembangan Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja yang Mengikuti Program Jamsostek di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022	III-47
Tabel 3.4	Perkembangan Jumlah Pekerja Sektor Non Formal yang Mengikuti Program Jamsostek di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022	III-47
Tabel 3.5	Jumlah Kasus dan Status Penyelesaian Hubungan Industrial di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022	III-47
Tabel 3.6	Jumlah Not in Employment, Education or Training (NEET) di Jawa Tengah Tahun 2018-2022	III-48
Tabel 3.7	Jumlah Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun 2018 – 2022	III-49
Tabel 3.8	Jumlah Capaian Pengiriman Transmigran Asal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 – 2022	III-50
Tabel 3.9	Jumlah Implikasi RTRW dan KLHS pada Perangkat Daerah Tahun 2024-2026	III-59
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2019-2023	IV-2
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	V-83

Tabel 6.1 Rencana Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 ..... VI-90

Tabel 7.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Perubahan Renstra Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tahun 2018-2023 .....VII-194

Tabel 7.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 .....VII-195

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	II-16
Gambar 2.2	Sebaran Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021.	II-17
Gambar 2.3	Sebaran Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun2021	II-18
Gambar 2.4	Sebaran Pegawai Berdasarkan Sruktur Tahun 2022	II-18
Gambar 2.5	Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin Tahun Februari 2019 – Agustus 2020	II-14
Gambar 2.6	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2018 – Agustus 2020	II-15
Gambar 2.7	Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020	II-16
Gambar 2.8	Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Se Jawa Bali Tahun 2020.....	II-17

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jl. Pahlawan No.16 Semarang Kode Pos 50241 Telepon-024-8311713
Faksimile 024-8311711 Laman http://www.disnakertrans.jatengprov.go.id
Surat Elektronik disnakertrans@jatengprov.go.id

SURAT PERNYATAAN
NOMOR 821.2/566

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : AHMAD AZIZ, SE., M.Si / NIP. 19680617 199803 1 007

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
Berdasar SK Gubernur Nomor : 821.3/151/2023 tanggal 18 bulan April 2023 .

Bertugas untuk dan atas nama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah

Berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 16 Semarang

Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa :

1. Renstra disusun dengan benar dan terukur sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
   Untuk mewujudkan tujuan, sasaran dan serta program kerja berdasarkan RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
2. Berkomitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan,sasaran,program dan kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 dengan menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan tanpa paksaan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 18 Mei 2023
Plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bidang Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial

Ditandatangani secara elektronik oleh:

AHMAD AZIZ, SE., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP 19680617 199803 1 007

-

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pembangunan nasional maupun pembangunan daerah tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting. *Pertama,* tenaga kerja merupakan pelaku pembangunan memberikan kontribusi terhadap produk domistik bruto maupun produk domistik regional bruto; *Kedua* tenaga kerja sebagai anggota kelompok masyarakat yang menjadi target untuk ditingkatkan kapasitas, ketrampilan, pendapatan dan kesejahteraannya. Hal ini selaras dengan tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Disisi lain transmigrasi juga merupakan hal penting yang menjadi bagian integral dari pembangunan nasional dalam upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Penyelenggaraan transmigrasi dilaksanakan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan peran serta masyarakat, pemerataan pembangunan daerah, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa melalui persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta nilai budaya dan adat istiadat masyarakat;

Sejalan dengan upaya pembangunan daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat serta memperhatikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan amanat kepada pemerintah daerah untuk menyusun rencana pembangunan yang akan dilaksanakan. Hal ini merupakan peluang besar bagi pemerintah daerah dan perangkatnya untuk melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan Umum sebagai tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan tersebut, pemerintah daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang termuat baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan

atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD) , Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Demikian halnya dengan OPD diharuskan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang dimuat dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD dan Rencana Kerja (Renja) OPD.

Dalam rangka penyusunan dan penetapan Renstra OPD sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), bahwa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah (Pasal 15 Ayat 3), selanjutnya Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-OPD dengan berpedoman pada RPJP Daerah (Pasal 15 Ayat 4). Berdasarkan pasal 15 ayat 4 tersebut penyusunan dan penetapan Renstra Organisasi Perangkat Daerah merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Mendasarkan Undang – undang Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang mengamanahkan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara bersama – sama dan serentak pada tahun 2024. Sementara itu kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah pada perode 2018 -2023 akan berakhir tahun 2023. Pada tahun 2023, Provinsi Jawa Tengah tidak akan memiliki Gubernur definitive dan akan digantikan oleh Pj. Gubernur sampai dengan terpilihnya Gubernur yang baru melalui pilihan kepala daerah.

Menteri Dalam Negeri melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2022 menginstruksikan untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2024-2026 sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah transisi. Menindaklanjuti hal tersebut, agar pembangunan terus berjalan maka perangkat daerah perlu menyusun renstra yang selaras dengan dokumen RPD pada tingkat daerah provinsi.

Renstra PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk jangka menengah yang disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra PD memuat tujuan,sasaran,program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dana atau urusan

pilihan sesuai tugas dan pokok fungsi setiap perangkat daerah . Khusus masa transisi ini, penyusunan Renstra PD juga merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022.

Dalam bidang pembangunan ketenagakerjaan di Jawa Tengah masalah utama yang harus kita hadapi dalam 5 tahun kedepan adalah tingginya angka pengangguran yang ditunjukkan oleh angka TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka). Dalam penanganan pengangguran ini harus merupakan upaya terpadu dari berbagai pihak yang mengarah pada upaya-upaya perlindungan, pemberdayaan dan pengembangan kelompok seperti buruh tani dan petani penggarap, nelayan, buruh industrikecil dan sektor UMKM. Upaya pengurangan pengangguran harus terintegrasi dengan pembangunan kedaulatan pangan, kedaulatan energi, pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru, dan yang kemudian aspek-aspek produktif tersebut mampu menjamin keberlanjutan terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Isu-isu terkait ketenagakerjaan dan transmigrasi merupakan tugas yang diampu oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Sebagai salah satu OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maka urgensi perencanaan strategis menjadi penting untuk menjawab tantangan dan isu-isu terkait pembangunan dan pengembangan urusan tenaga kerja dan transmigrasi secara khusus di Jawa Tengah, oleh karenanya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah disusun sebagai pedoman dan arah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelaksanaan program dan kegiatan selama 3 tahun yang disesuaikan dan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

Isu-isu lain dalam penyusunan Renstra PD diantaranya sebagai langkah tindak lanjut dari RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026 kemudian penyesuaian terhadap kebijakan nasional (RPJMN 2020-2024 dan Renstra K/L Tahun 2020-2024), juga dampak dari pandemi Covid 19 dan adanya perubahan regulasi (PP 12 Tahun 2019, Permendagri 90/2019 dan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 serta Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021)

Terkait dengan hal tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Provinsi Jawa Tengah menyusun dokumen Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
   Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91)
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2018, (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor --, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor --);

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 tahun 2016 Tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017. No. 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistim Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019. No. 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019. No. 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Penyelenggaraan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 atau Daerah Otonom Baru
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021

Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

31. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 050.11/0000042 tanggal 3 Januari 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026 dan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyusunan Renstra PD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 adalah:

1. Memberikan gambaran kondisi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pembangunan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2. Memberikan acuan landasan yang jelas bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam menyelenggarakan program pembangunan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
3. Sebagai bahan acuan dalam menyusun pertanggungjawaban Kepala Dinas atas kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selama 1 (satu) tahun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP).

Tujuan dari Renstra Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 adalah untuk:

1. Menjelaskan, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pembangunan bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian Provinsi Jawa Tengah yang akan dicapai dalam kurun waktu 3(lima) tahun dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.
2. Sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja (Renja Tahunan) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi pembangunan, khususnya di urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 didasarkan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Buku Panduan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 2024-2026 yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 2024, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat penjelasan umum mengenai latar belakang; landasan hukum; maksud dan tujuan; serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Memuat tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah ; Sumber Daya Perangkat Daerah ; Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; Tantangan dan Peluang Pengembangaan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigras Provinsi Jawa Tengah; dan Penentuan Isu – isu Strategis ,yang mereviu kembali factor – factor dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari a. Gambaran pelayanan PD; b. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L; c. Sasaran Jangka Menengah dari Renstra PD Provinsi /Kabupaten/Kota; d. Implikasi RTRW bagi pelayanan PD ; e. Implikasi KLHS bagi pelayanan PD .

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Berisi tentang Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ; Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga dan Kerja Transmigrasi serta Manajemen Resiko Strategis Perangkat Daerah merupakan pengelolaan terhadap resiko OPD yang diintegrasikan dalam Renstra PD.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS TENAGA KERJA DANTRANSMIGRASI

Berisi tentang strategi dan kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB VI RENCANA PROGRAM, SUB KEGIATAN, SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatifnya.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi tentang indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan renstra OPD merupakan pedoman dalam penyusunan Renja OPD; Penguatan peran stakeholder dalam pelaksanaan Renja OPD; Dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan tiga tahunan, catatan dan harapan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Pasal 3 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 64 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah menjelaskan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasimempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan Kebijakan bidang pelatihan kerja dan produktivitas, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, hubungan industrial dan jaminan sosial, dan pengawasan ketenagakerjaan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelatihan kerja dan produktivitas, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, hubungan industrial dan jaminan sosial, dan pengawasan ketenagakerjaan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pelatihan kerja dan produktivitas, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, hubungan industrial, jaminan sosial, dan pengawasan ketenagakerjaan;
4. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi kedinasan yang lain diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi dan Tugas Pokok,Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasididasarkan pada Peraturan Gubernur Jateng Nomor : 64 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah terdiri dari:

1. **Kepala Dinas;**
2. **Sekretariat;**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Sekretariat Dinas, melaksanakan fungsi :

1) Penyiapan bahan koordinasi kegiatan dilingkungan Dinas;
2) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan dilingkungan Dinas;
3) Penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaiaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkunganDinas;
4) Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
5) Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi
6) Penyiapan bahan pengelolaan barang/kekayaan milik daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
7) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. **Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas,** mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan pemyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan kerja dan produktivitas meliputi pelatihan dan pemagangan, standarisasi dan sertifikasi, dan produktivitas.

   Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas, melaksanakan fungsi :

   1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi dan sertifikasi;
   2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan dan pemagangan;
   3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang produktivitas; dan
   4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. **Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi,** mempunyai tugas : melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi meliputi penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan transmigran.

   Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, melaksanakan fungsi:

   1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penempatan tenaga kerja;
   2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perluasan kesempatan kerja;
   3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang transmigrasi; dan
   4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. **Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial,** mempunyai tugas:melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial meliputi

   syarat kerja dan jaminan sosial, kelembagaan dan hubungan industrial, pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja.

   Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, melaksanakan fungsi :

   1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dibidang syarat kerja dan jaminan sosial,
   2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan dan hubungan industrial;
   3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja; dan
   4) Pelaksanaaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. **Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan,** mempunyai tugas : melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang norma kerja, pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja dan penegakan hukum ketenagakerjaan.

   Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, melaksanakan fungsi :

   1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang norma kerja;
   2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
   3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan hukum ketenagakerjaan; dan
   4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. **UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah)**

   UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 52 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

   1) **Balai Latihan Kerja Cilacap Kelas A ,** merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pelatihan tenaga kerja.

      Balai Latihan Kerja Cilacap Kelas A melaksanakan fungsi:

      a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelatihan dan pemasaran tenaga kerja;
      b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang pelatihan dan pemasaran tenaga kerja;
      c. evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan dan pemasaran tenaga kerja;
      d. pengelolaan ketatausahaan;
      e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

   2) **Balai Latihan Kerja Semarang 1 Kelas A,** merupakan unsur

pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pelatihan dan pemagangan.

Balai Latihan Kerja Semarang 1 Kelas A melaksanakan fungsi:

a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelatihan dan pemagangan;
b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang pelatihan dan pemagangan;
c. evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan dan pemagangan;
d. pengelolaan ketatausahaan;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan Fungsinya.

3) **Balai Latihan Kerja Semarang 2 Kelas A,** merupakanunsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja.

Balai Latihan Kerja Semarang 2 Kelas A melaksanakan fungsi:

a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
c. evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
d. pengelolaan ketatausahaan Balai;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

4) **Balai Keselamatan Kerja Kelas A**, merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang keselamatan kerja, hiperkes dan ergonomi.

Balai Keselamatan Kerja Kelas A melaksanakan fungsi :

a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang keselamatan kerja, hiperkes dan ergonomi;
b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang keselamatan kerja, hiperkes dan ergonomi;
c. evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan kerja, hiperkes dan ergonomi;
d. pengelolaan ketatausahaan;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

5) **Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Kelas A,** merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pelatihan kerja dan transmigrasi.

Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Kelas A melaksanakan fungsi :

a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelatihan kerja dan transmigrasi;

b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang pelatihan kerja dan transmigrasi;

c. monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan kerja dan transmigrasi;

d. pengelolaan ketatausahaan Balai;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

6) **Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja Kelas A,** merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang penyelesaian perselisihan tenaga kerja.

Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja Kelas A melaksanakan fungsi :

a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan penempatan tenaga kerja;

b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan penempatan tenaga kerja;

c. monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan penempatan tenaga kerja;

d. pengelolaan ketatausahaan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

7) **Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Kelas B**, merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan ketenagakerjaan.

Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Kelas B meliputi :

(1) Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Semarang dengan Tempat Kedudukan Kota Semarang; Wilayah Kerja : Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kendal, dan Kota Salatiga.

(2) Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Pati dengan Tempat Kedudukan Kabupaten Pati; Wilayah Kerja : Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Blora.

(3) Satuan Pengawasan KetenagakerjaanWilayah Surakarta dengan Tempat Kedudukan di Kota Surakarta; Wilayah Kerja : Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sukoharjo.

(4) Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Magelang dengan Tempat Kedudukan Kota Magelang; Wilayah Kerja : Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Purworejo.

(5) Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Banyumas dengan Tempat Kedudukan Kabupaten Banyumas; Wilayah Kerja : Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Banjarnegara.

(6) Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Pekalongan dengan Tempat Kedudukan Kota Pekalongan; Wilayah Kerja : Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Batang.

Selengkapnya struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah tersaji pada Gambar berikut:

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Provinsi Jawa Tengah

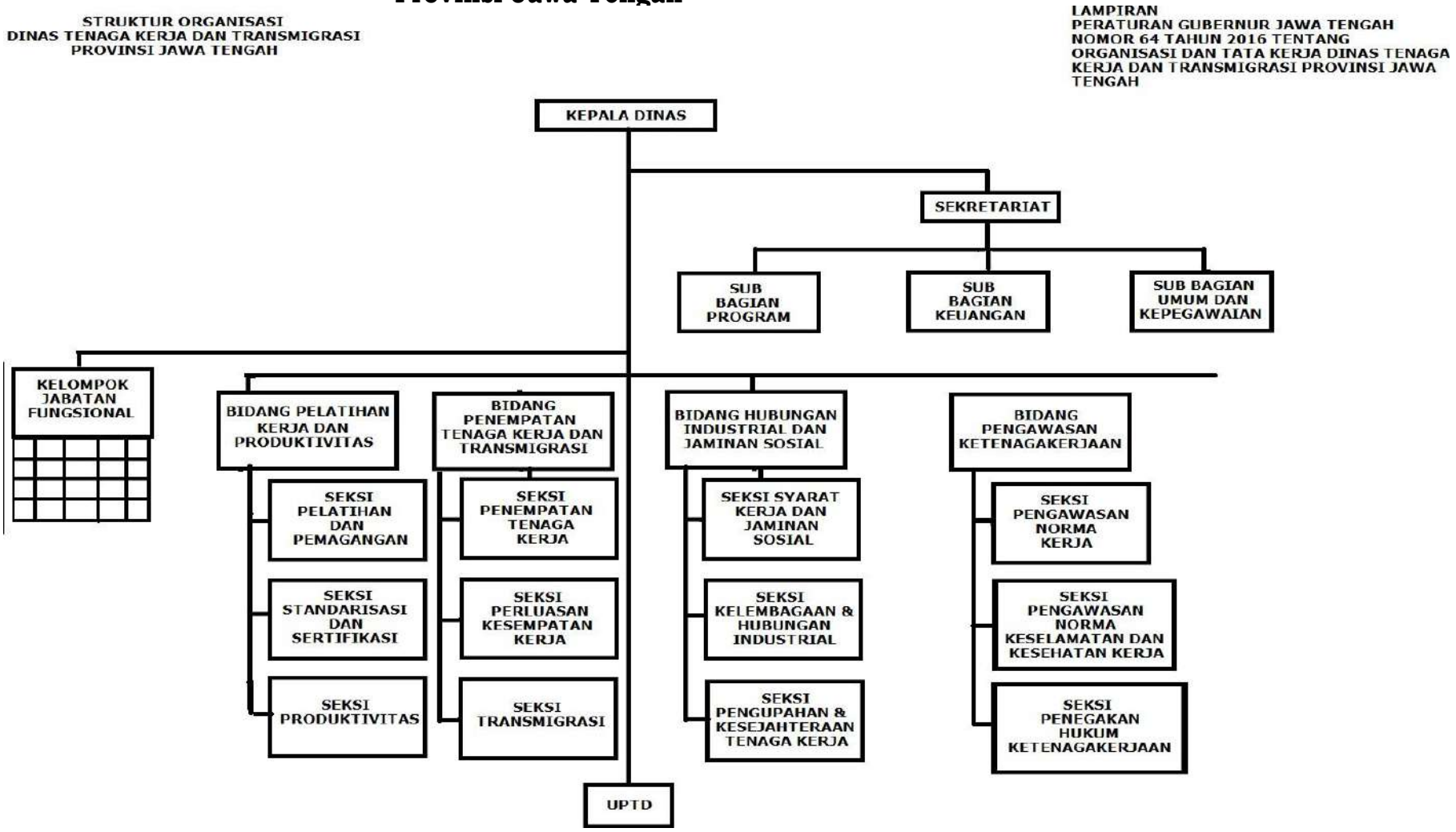

2.2 Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah didukung personil/pegawai sejumlah 394 orang. Daftar jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagaimana Gambar berikut.

Gambar 2.2.
Sebaran Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023

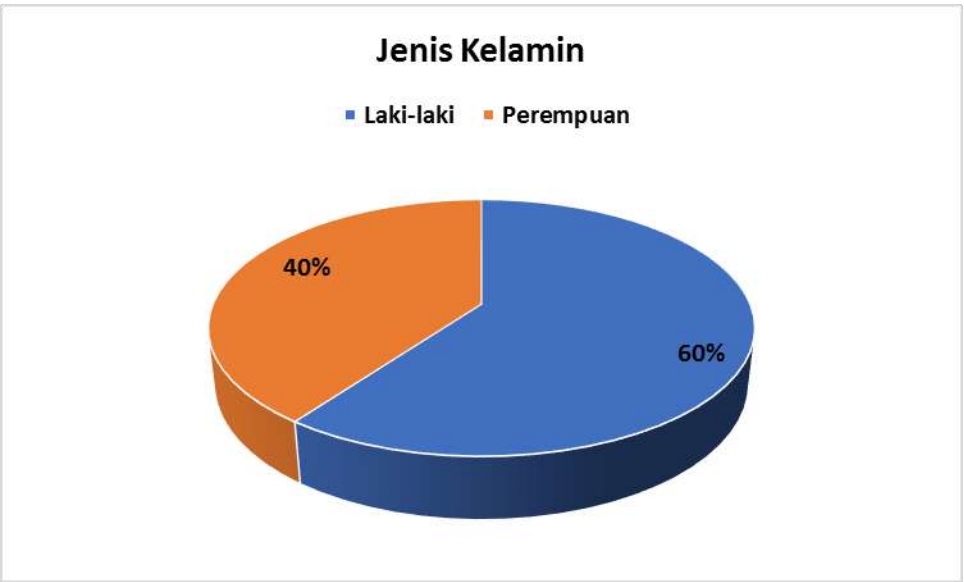

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat sebaran jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin, dimana jumlah pegawai laki-laki lebih dominan yakni sebanyak 236 orang atau 60% sedangkan jumlah pegawai perempuan berjumlah 158 orang atau 40%.

Sementara itu, selain sebaran berdasarkan jenis kelamin, pada gambar dibawah juga terlihat sebaran pegawai berdasarkan tingkat pendidikan pegawai yang ada dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah sebagaimana Gambar berikut :

Gambar 2.3.
Sebaran Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

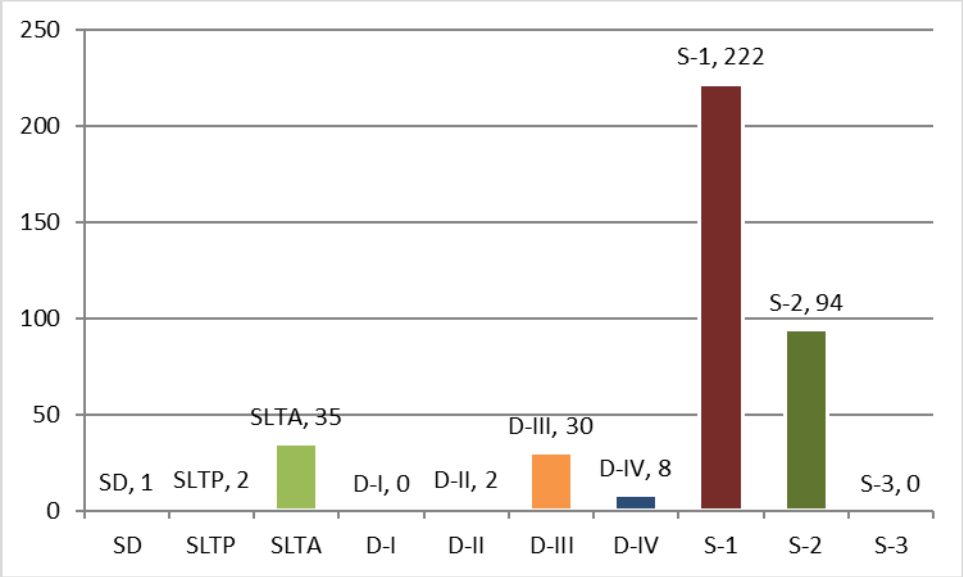

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa, jumlah pegawai di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi didominasi oleh lulusan S-1 sebanyak 222 orang pegawai atau sebesar 56,35%, lulusan S-2 sebanyak 94 pegawai atau 23,86% dan kemudian serta lulusan SLTA sebanyak 35 pegawai atau 8,88%. Artinya, dengan tingkat pendidikan yang baik (lulusan S-1 dan S-2), pegawai di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah memiliki kompetensi secara akademis yang mendukung dalam menjalankan tugas pokok fungsinya masing masing.

Sebaran pegawai juga dapat dikelompokkan berdasarkan struktur seperti terlihat pada Gambar berikut.

Gambar 2.4.
Sebaran Pegawai Berdasarkan Struktur Tahun 2022

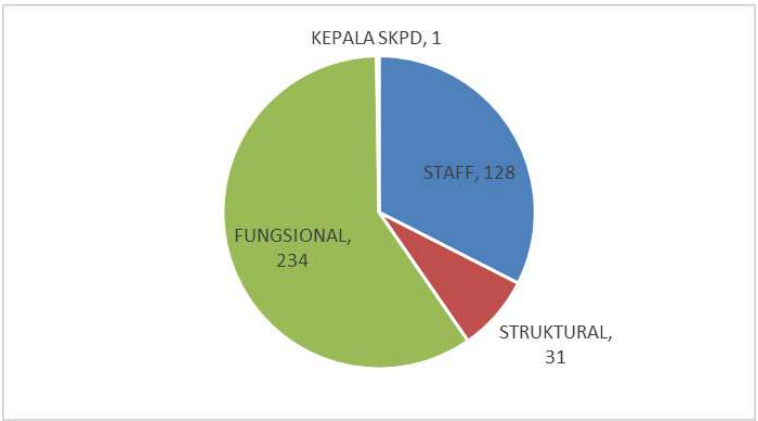

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan sebaran pegawai di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan struktur dimana fungsional sebanyak 2 3 4 pegawai atau 59,39%. Sementara untuk jabatan struktural berjumlah sebanyak 31 pegawai atau 7,87% dan jabatan staff sebanyak 128 pegawai atau 32,49%.

Tabel 2.1.
Aset dan Sarana Prasarana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2018 s/d 2021

No	Nama Bidang Barang	Keadaan Per 31- Desember-2018		Keadaan Per 31- Desember-2019		Keadaan Per 31- Desember-2020		Keadaan Per 31- Desember-2021	
		Jumlah Barang	Jumlah harga (Rp)	Jumlah Barang	Jumlah harga (Rp)	Jumlah Barang	Jumlah harga (Rp)	Jumlah Barang	Jumlah harga (Rp)
1	TANAH								
	Tanah	24	90.352.753.000	24	90.352.753.000	24	90.352.753.000	24	90.352.753.000
2	PERALATAN MESIN								
	Alat Besar	30	317.786.664	27	316.916.998	27	316.916.998	27	316.916.998
	Alat Angkutan	76	3.812.240.235	92	10.488.088.115	94	10.847.576.292	95	11.005.626.292
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.774	3.795.013.548	418	3.597.089.890	418	3.597.089.890	487	3.892.906.730
	Alat Pertanian	399	2.114.340.000	131	2.103.239.925	131	2.103.239.925	133	2.148.239.925
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	9.575	13.661.072.347	4.664	13.299.586.603	4.831	13.614.106.603	5.054	14.589.209.603
	Alat Studio dan Komunikasi	273	1.657.716.018	230	1.817.205.085	242	1.834.305.085	275	2.114.108.085
	Alat Kedokteran	173	550.242.305	127	541.292.525	127	541.292.525	127	541.292.525
	Alat Laboratorium	629	7.420.529.740	397	7.890.914.043	414	8.876.396.543	442	9.111.382.743
	Alat Komputer	726	5.195.845.085	768	5.568.628.145	786	5.673.278.145	916	6.919.482.945
	Alat Peraga	1	2.336.400	1	2.336.400	1	2.336.400	17	211.718.320
	Peralatan Olah Raga			1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000
	Alat Persenjataan / keamanan								
3	GEDUNG DAN BANGUNAN								
	Bangunan Gedung	117	52.562.783.646	121	53.425.462.980	132	56.660.544.130	151	57.510.532.130
	Bangunan Monumen								
	Tugu Titik/Kontrol Pasti	1							
4	JALAN DAN IRIGASI								
	Jalan dan Jembatan								
	Bangunan Air / Irigasi	1	4.317.600	1	4.317.600	1	4.317.600	1	4.317.600

No	Nama Bidang Barang	Keadaan Per 31- Desember-2018		Keadaan Per 31- Desember-2019		Keadaan Per 31- Desember-2020		Keadaan Per 31- Desember-2021	
		Jumlah Barang	Jumlah harga (Rp)	Jumlah Barang	Jumlah harga (Rp)	Jumlah Barang	Jumlah harga (Rp)	Jumlah Barang	Jumlah harga (Rp)
	Instalasi	13	664.890.192	13	664.890.192	13	743.895.492	14	763.895.492
	Jaringan	5	107.706.800	5	107.706.800	5	107.706.800	5	107.706.800
5	ASET TETAP LAINNYA								
	Buku Perpustakaan	1.697	129.988.870	2.785	156.471.092	2.831	162.022.092	2.999	193.742.092
	Barang Bercorak seni dan Budaya	31	79.613.505	29	78.285.500	29	78.258.500	29	78.258.500
	Hewan Ternak dan Tanaman	6	9.500.000	6	9.500.000	6	9.500.000	6	9.500.000
6	KONSTRUKSI DLM PENGERJAAN								
	JUMLAH KESELURUHAN	15.551	182.438.675.955	9.840	184.853.720.348	10.115	196.116.507.320	10.806	200.473.200.280

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat kondisi aset dan sarana prasarana per 31 Desember 2019 yang terdiri dari tanah, peralatan mesin, gedung bangunan, jalan dan irigasi, aset tetap lainnya dimana terjadi perkembangan dan penambahan nilai aset dari per 31 Desember 2018, dari Rp. 182.438.675.955,- menjadi Rp.184.853.720.348,- atau mengalami peningkatan nilai di tahun 2019 sebesar Rp.2.415.044.393,- . Pada tahun 2020 penambahan nilai aset menjadi Rp. 196.116.507.320,- (per 31 – Desember 2020) dan di tahun 2021 meningkat menjadi Rp. 200.473.200.280,- (per 31 Desember 2021).

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan kondisi capaian indikator di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Gambaran kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dijelaskan berdasarkan realisasi capaian target Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2018-2023 berdasarkan Urusan Wajib dan Pilihan yang diampu, yaitu Urusan Ketenagakerjaan; Urusan Transmigrasi. Selengkapnya diuraikan sebagaimana terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.1.
Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	Tujuan 1 : Mengurangi jumlah pengangguran																			
	Persentase pengangguran yang ditangani	%				24,05	25,86	27,37	28,15	28,55	25,91	10,10	19,70	28,02		1,08	0,39	0,72	1,00	
	Tujuan 2 : Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah																			
	Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai				71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	71,00	84,25	85,25	85,00		1,00	1,17	1,17	1,15	
	Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja daerah																			
	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah	%				N/A	N/A	N/A	28,57	57,14	N/A	N/A	N/A	34,00		N/A	N/A	N/A	1,19	
B	Sasaran 2 : Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja																			
	Persentase peningkatan tenaga kerja yang kompeten	%				6,89	7,09	7,39	7,89	8,19	7,16	11,08	5,34	12,20		1,04	1,56	0,72	1,55	

	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di Jawa Tengah (Rp/Juta)	Rp/juta				54,58	54,59	54,60	54,61	54,62	56,88	55,01	55,91	57,11		1,04	1,01	1,02	1,05	
	Sasaran 3: Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja																			
	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%				69,04	69,54	70,09	70,47	71,01	70,27	37,07	50,63	70,52		1,02	0,53	0,72	1,00	
	Persentase Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja Baru di Sektor Informal	%				56,00	59,00	62,00	65,00	68,00	56,02	40,05	43,42	55,26		1,00	0,68	0,70	0,85	
	Sasaran 4: Meningkatnya perlindungan tenaga kerja dalam hubungan Industrial dan jaminan sosial																			
	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	%				90,00	92,50	93,00	95,50	96,00	92,53	91,43	89,74	98,57		1,03	0,99	0,96	1,03	
	Persentase pekerja / buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	%				87,11	87,26	87,41	87,56	87,70	93,16	96,56	97,60	97,70		1,07	1,11	1,12	1,12	
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)					N/A	N/A	N/A	90,56	91,67	N/A	N/A	N/A	90,83		N/A	N/A	N/A	1,00	

	Sasaran 5 : Meningkatnya kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3) dan lingkungan kerja																		
	Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan	%				94,86	92,09	89,26	86,21	82,97	94,43	90,56	89,51	88,10		1,00	0,98	1,00	1,02	
	Sasaran 6 : Meningkatnya penempatan transmigran pada daerah tujuan transmigrasi																		
	Persentase penempatan transmigran terhadap animo transmigrasi	%				3,37	3,38	3,39	3,40	3,41	6,10	0,00	0,79	5,28		1,81	0,00	0,23	1,55	
	Persentase kenaikan calon transmigran dilatih di bidang pertanian	%				3,37	0,00	2,54	3,40	3,60	3,95	0,00	0,79	3,99				0,31	1,17	
	Sasaran 7: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah																		
	Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai				71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	71,00	84,25	85,25	85,00		1,00	1,17	1,17	1,15	
	Sasaran 7 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah																		
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai				74,50	74,75	75,00	75,25	75,50	76,95	78,34	77,23	80,12		1,03	1,05	1,03	1,06	
	Program																			

	Perencanaan Tenaga Kerja																			
	Persentase kabupaten/kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Yang Dilakukan Pembinaan	%				N/A	N/A	N/A	28,57	57,14	N/A	N/A	N/A	34,00		N/A	N/A	N/A	1,19	
C	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja																			
	Persentase kenaikan pencari kerja dan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	%				6,80	7,09	7,39	7,89	8,19	7,16	4,99	5,34	12,20		1,05	0,70	0,72	1,55	
	Persentase kenaikan lembaga pelatihan yang terakreditasi	%				31,00	33,00	35,00	37,50	38,50	31,00	5,46	3,54	37,50		1,00	0,17	0,10	1,00	
	Persentase kenaikan perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas	%				3,10	3,90	4,00	4,10	4,20	3,10	0,31	0,81	4,01		1,00	0,08	0,20	0,98	
	Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang industri	%				1,12	1,33	1,12	1,33	1,12	1,44	2,97	1,85	4,13		1,29	2,23	1,65	3,11	
	Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang pertanian	%				50,00	8,33	7,69	7,69	6,67	100,00	23,07	8,16	9,44		2,00	2,77	1,06	1,23	
	Persentase kenaikan tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas atau kewirausahaan	%				47,06	28,00	21,88	17,95	13,04	88,24	4,78	5,40	13,38		1,88	0,17	0,25	0,75	

	Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa, bahasa asing, budaya dasar dan pekerjaan migran	%				20,00	33,00	25,00	20,00	16,00	82,00	16,91	46,59	68,72		4,10	0,51	1,86	3,44	
	Persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi	%				1,00	1,25	1,50	2,00	2,25	1,00	1,12	0,77	2,45		1,00	0,90	0,51	1,23	
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja																			
	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%				69,04	69,54	70,09	70,47	71,01	69,10	36,20	50,63	70,52		1,00	0,52	0,72	1,00	
	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%				69,04	69,54	70,09	N/A	N/A	69,10	36,20	50,63	N/A	N/A	1,00	0,52	0,72		
	Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru di sektor informal	%				56,00	59,00	62,00	65,00	68,00	56,02	40,05	43,42	55,26		1,00	0,68	0,70	0,85	
	Persentase peningkatan pencari kerja yang di tempatkan di sektor formal					N/A	N/A	N/A	60,00	71,01	N/A	N/A	N/A	70,52		N/A	N/A	N/A	1,18	
	Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan																			
	Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan					87,11	87,26	87,41	87,56	87,70	93,16	96,56	97,60	97,70		1,07	1,11	1,12	1,12	
	Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan					15,00	22,00	29,00	36,00	43,00	15,02	15,65	16,02	36,24		1,00	0,71	0,55	1,01	

	struktur dan skala upah																		
	Persentase peningkatan jumlah LKS Bipartit yang terbentuk					43,77	44,66	45,65	46,62	47,61	46,27	47,59	49,63	54,59		1,06	1,07	1,09	1,17	
	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial					90,00	92,50	93,00	95,50	96,00	92,53	91,43	89,74	98,57		1,03	0,99	0,96	1,03	
	Persentase perusahaan yang memenuhi ketentuan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama					22,68	23,05	23,42	N/A	N/A	23,73	24,29	24,36	N/A	N/A	1,05	1,05	1,04	N/A	N/A
	Program Peningkatan Kepatuhan Dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan																			
	Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan					94,86	92,09	89,26	N/A	N/A	94,43	91,92	89,51	N/A	N/A	1,00	1,00	1,00	N/A	N/A
	Persentase peningkatan perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3					24,94	25,29	25,54	25,89	26,14	25,45	30,56	25,55	25,90		1,02	1,21	1,00	1,00	
	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan					N/A	N/A	N/A	89,56	89,57	N/A	N/A	N/A	89,56		N/A	N/A	N/A	1,00	
	Program Pengembangan dan Penempatan Transmigrasi																			

	Persentase kenaikan transmigran yang ditempatkan memiliki rumah dan lahan usaha					3,37	3,38	3,39	3,40	3,41	6,10	0,00	N/A	N/A	N/A	1,81	0,00	N/A	N/A	N/A
	Persentase kenaikan calon transmigram dilatih di bidang pertanian					3,37	3,38	3,39	3,40	3,41	3,95	0,00	0,79	3,99		1,17	0,00	0,23	1,17	
	Persentase penempatan transmigran terhadap animo transmigrasi					3,37	3,38	3,39	3,40	3,41	6,10	0,00	0,79	5,28		1,81	0,00	0,23	1,55	
	Persentase kenaikan calon transmigran dilatih di bidang pertanian					3,37	3,38	3,39	3,40	3,41	3,95	0,00	0,79	3,99		1,17	0,00	0,23	1,17	
	Persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang di fasilitasi					N/A	N/A	N/A	3,18	3,60	N/A	N/A	N/A	5,28		N/A	N/A	N/A	1,66	
	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah																			
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		1,00	1,00	1,00	1,00	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		1,00	1,00	1,00	1,00	

	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		1,00	1,00	1,00	1,00	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		1,00	1,00	1,00	1,00	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		1,00	1,00	1,00	1,00	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		1,00	1,00	1,00	1,00	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		1,00	1,00	1,00	1,00	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		1,00	1,00	1,00	1,00	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		1,00	1,00	1,00	1,00	

	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		1,00	1,00	1,00	1,00	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		1,00	1,00	1,00	1,00	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		1,00	1,00	1,00	1,00	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		1,00	1,00	1,00	1,00	
	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			1,00	1,00	1,00	0,00	

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa 20 Indikator target kinerja urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang diampu oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 20 indikator RPJMD/IKU. Berdasarkan evaluasi hasil perencanaan pada tahun 2018-2023, dari 20 indikator sebanyak 20 indikator telah tercapai, dalam artian semua target indikator pada tahun 2022 telah tercapai seluruhnya.

Tabel 2.2.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

No	Uraian	Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun (Rp.000)					APBD pada Tahun (Rp.000)					Realisasi Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (Rp. 000)					Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Pendapatan						5.375.000	5.375.000	4.250.000	3.500.000	3.844.850	5.915.605,528	5.915.605,528	5.632.189,040	2.538.422,500	194.825,000	110,06	110,06	132,52	72,53	5,07	-306.030,000	-1.144.156,106
2	Belanja	54.631.667	66.202.125	137.198.821	101.320.993	111.000.000	128.258.917	95.236.787	100.753.877	99.020.993	114.451.470	120.869.395,717	92.095.777,971	96.399.253,357	96.072.012,396	15.544.808,314	94,24	96,70	95,68	97,02	13,58	-2.761.489,400	-21.064.917,481
3	Pembiayaan																						

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi belanja program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tenaga Tahun 2019-2023 mengalami penurunan, yaitu realisasi Belanja pada tahun 2019 sebesar Rp. 120.869.395.717,- (94,24 %) dari alokasi anggaran sebesar Rp.128.258.917.000,-), tahun 2020 menjadi Rp.92.095.777.971.000,- (96,7% dari alokasi anggaran sebesar Rp.95.236.787.000,-), sedangkan realisasi belanja pada tahun 2021 meningkat menjadi sebesar Rp.96.399.253.971.000,- (95,68 % dari Rp. 100.753.877.000,-) dan ditahun 2022 realisasi belanjanya menjadi Rp.96.072.012.396 (97,02 % dari Rp. 114.451.470.000,-)

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pengembangan Pembangunan dan Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi memiliki tantangan dan peluang. Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi diuraikan dengan membagi kedalam bidang pelayanan yang diberikan, selengkapnya diuraikan sebagai berikut:

1. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tantangan pengembangan pelayanan Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu:

a. Jumlah pengangguran di Jawa Tengah masih relatif tinggi sehingga membutuhkan banyak mekanisme untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan memperluas kesempatan kerja.
b. Mengembangkan Aplikasi e-Makaryo yang mempermudah akses pencari kerja dan pengguna tenaga kerja dalam memperoleh informasi pasar kerja/lowongan kerja dan pengguna tenaga kerja dalam merekrut karyawan sesuai dengan kebutuhan pengguna tenaga kerja/perusahaan tersebut.
c. Melakukan sosialisasi informasi dan peluang kerja serta penyuluhan bimbingan jabatan/ karir serta memfasilitasi pemetaan bakat dan minat calon pencari kerja
d. Pengoptimalan Aplikasi e-Makaryo yang terintegrasi dengan aplikasi Pusat (SIAP KERJA), Daerah (Kabupaten/kota), dan aplikasi Swasta terdaftar (TOP KARIR) dan sinergitas dengan lembaga pendidikan, pelatihan dan penempatan tenaga kerja.
e. Jumlah TKA yang dipekerjakan masih relatif banyak sehingga masih diperlukan mekanisme pengendalian.
f. Adanya kecenderungan perusahaan untuk tetap mempekerjakan TKA tanpa batas waktu.
g. Perlu adanya peningkatan kualitas dari pencaker untuk bisa

mengisi lowongan-lowongan kerja yang tersedia.

Peluang pengembangan pelayanan Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu:

h. Undang-Undang : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
i. Peluang kesempatan kerja antar kerja antar daerah dan adanya kebijakan pemerintah mengenai KUR guna pengembangan kewirausahaan/UMKM.
j. Dengan adanya ekonomi industri digital atau revolusi industri akan tumbuh jabatan baru / berkembang kurang lebih 17.000.000 lapangan kerja yang dimasuki. Dalam era digital ini juga akan banyak pekerjaan yang hilang atau distrupsi.
k. Untuk mendukung Program Penanggulangan Kemiskinan, dalam perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat diperlukan identifikasi sasaran manfaat yang ditujukan pada kriteria masyarakat miskin yang dipersyaratkan.

2.Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas

Tantangan pengembangan pelayanan bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas yaitu:

a. Globalisasi dan persaingan bebas bagi tenaga kerja didalam negeri maupun di Luar Negeri serta pengakuan sertifikasi kompetensi oleh Perusahaan/ Pelaku Usaha yang belum bisa dipenuhi oleh tenaga kerja.
b. Dunia usaha membutuhkan tenaga kerja terampil/ kompetensi sesuai dengan keahlian sektor perusahaan/ industri serta pelatihan kerja yang dilaksanakan belum mengacu pada kebutuhan pasar/ pengguna tenaga kerja.
c. Produktivitas sangat diharapkan di perusahaan baik produk maupun jasa namun masih rendah dan minimnya penerapan produktivitas dalam dunia kerja.

   Peluang pengembangan pelayanan bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas yaitu:

d. Terbitnya Peraturan Presiden No.68/2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Oleh karena itu Provinsi Jawa Tengah harus membentuk Tim TKDV (Tim Koordinasi Daerah Vokasi) yang diantaranya anggota Tim tersebut dari Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah serta KADIN. Saat ini sedang menunggu Petunjuk Teknis dari Kemenko – PMK.
e. Terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 1

Tahun 2023 tentang Lembaga Produktivitas Nasional, dan yang mendasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 50 Tahun 2005 tentang Lembaga Produktivitas Daerah yang perlu dilakukan penyesuaian dengan dinamika perubahan lingkungan strategis, baik skala nasional, regional maupun global sebagai upaya peningkatan produktivitas nasional lintas sektor maupun daerah.

f. Ketua Dewan Pengarah Lembaga Produktivitas Nasional mengkoordinasikan kerja sama yang dibangun lembaga pelayanan peningkatan Produktivitas secara nasional, baik sektor pemerintah maupun swasta. Sedangkan di tingkat Daerah dikoordinasikan Gubernur/Bupati/Walikota.
g. Gubernur dan bupati/walikota mengkoordinasikan kerjasama yang dibangun lembaga pelayanan peningkatan Produktivitas di tingkat Daerah. Dan mengatur pembentukan jejaring lembaga lembaga pelayanan peningkatan Produktivitas dimaksud.
h. Tersedia jabatan-jabatan dalam dunia kerja yang membutuhkan kompetensi khusus/tertentu serta persaingan tenaga kerja semakin kompetitif.
i. Jumlah perusahaan besar dan menengah memadai untuk mendukung program pemagangan serta perusahaan yang memahami program pemagangan terbatas sehingga yang bersedia mendukung masih rendah.
j. Dengan berkembangnya digital ekonomi atau revolusi industri 4.0 akan banyak jabatan jabatan dalam dunia kerja akan tergeser atau dengan kata lain akan ada jabatan pekerjaan yang tumbuh/ berkembang dan jenis pekerjaan yang hilang.
k. Melakukan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja dengan meningkatkan kompetensi lembaga, Instruktur dan tenaga pelatihan, mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja yang dilatih maupun yang sudah bekerja di perusahaan, dan meningkatkan jumlah Asesor di Balai Latihan Kerja (BLK) guna menjadikan BLK juga berfungsi sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) tenaga kerja.
l. Untuk mendukung Program Penanggulangan Kemiskinan, bagi masyarakat / pencari kerja diperlukan identifikasi sasaran manfaat yang ditujukan pada kriteria masyarakat miskin yang dipersyaratkan.

3. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial

Tantangan pengembangan pelayanan bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial yaitu:

a. Di Jawa Tengah, persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) sebesar 23,89 persen/atau jumlah perusahaan yang memiliki PP sebanyak 4641 dari jumlah perusahaan yang memiliki perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih : sebanyak 19.427 perusahaan . Dan untuk perusahaan yang belum mempunyai Peraturan Perusahaan (PP) sangat perlu untuk ditingkatkan kesadaran pengusaha untuk membuat atau menyusun Peraturan Perusahaan (PP).

   Peluang pengembangan pelayanan bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial yaitu:

b. Undang- Undang No: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
c. Jumlah perusahaan yang menjadi peserta aktif Jamsostek sebanyak 89.016 perusahaan Tahun 2022. Masih terdapat peluang sebanyak 3.781 perusahaan dan 92.797 tenaga kerja yang belum menjadi peserta aktif jaminan sosial tenaga kerja.
d. Jumlah Perusahaan di Jawa Tengah yang wajib membuat LKS Bipartit berjumlah 6.641 perusahaan sedangkan yang sudah membentuk LKS Bipartit sebanyak 2.107 perusahaan. Jadi masih ada peluang sebanyak 4.852 perusahaan.
e. Jumlah perusahaan yang telah menyusun Struktur dan Skala Upah 7040 perusahan , dari jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (dalam PP atau PKB) atau perusahaan yng memiliki jumlah tenaga kerja 10 orang atau lebih sejumlah 19.427 perusahaan. Sehingga perlu untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja yang berkelanjutan sesuai dengan perkembangan pasar kerja melalui penerapan Struktur Upah dan Skala Upah di Perusahaan.
f. Melakukan sosialisasi dan pembinaan hubungan industrial ke perusahaan serta peningkatan kapasitas perangkat hubungan industrial (Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Organisasi Pengusaha, Lembaga Kerjasama Bipartit, Lembaga Kerjasama Tripartit, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama, Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Peraturan Perundang-undangan Ketenaga-kerjaan)

4. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan

Tantangan pengembangan pelayanan bidang Pengawasan Ketenagakerjaan yaitu:

a. Masih terdapat sejumlah kecelakaan kerja pada perusahaan.
b. Rendahnya tingkat perlindungan dan pengawasan terhadap kesehatan dan perlindungan tenaga kerja.
c. Beralihnya Pegawai Pengawasan Ketenagakerjaan di Kab/Kota menjadi Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (beralihnya Kewenangan berdasar UU 23 Tahun 2014)

   Peluang pengembangan pelayanan bidang Pengawasan Ketenagakerjaan yaitu:
d. Terbitnya Undang – Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang juga mengatur perubahan terkait hubungan kerja.
e. Adanya dukungan kebijakan dari segi program dan penganggaran yang responsif gender (ARG);
f. Adanya regulasi terkait pelaksanaan peraturan dibidang norma ketenagakerjaan bagi pengusaha atau pemberi kerja.
g. Dalam rangka penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) yaitu program nasional dan kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak melalui pengawasaan norma kerja perempuan dan anak yaitu pengurangan pekerja anak/anak yang bekerja yang dikembalikan ke dunia pendidikan dengan penarikan pekerja anak dikembalikan ke dunia sekolah;
h. Mengoptimalkan peran pengawas ketenagakerjaan dalam melakukan pembinaan tentang pentingnya penerapan norma ketenagakerjaan di perusahaan, menerapkan SMK3, terutama kepada perusahaan yang sudah wajib SMK3 dan peningkatan kompetensi pengawas yang berkaitan dengan norma ketenagakerjaan.
i. Pelaksanaan teknis pengawasan ketenagakerjaan menjadi kewenangan Provinsi sehingga memerlukan sarana prasarana, personil, peralatan dan biaya untuk mendukung program dan kegiatan pengawasan ketenagakerjaan di Jawa Tengah yaitu di 6 (enam) satuan kerja pengawasan ketenagakerjaan yang menempati kantor Eks Bakorwil Provinsi Jawa Tengah berlokasi di Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Magelang, Kabupaten Banyumas, Kota Pekalongan, Kabupaten Pati.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU–ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Permasalahan yang dihadapi Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi dalam upaya pengembangan pelayanan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yang didasarkan pada fungsi bidang pelayanan dijelaskan pada Tabel berikut ini.

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Urusan/Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Tenaga Kerja		
a	Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Tengah dari tahun 2018 sebesar 4,47 persen menurun menjadi 4,44 persen dan tahun 2020 meningkat menjadi 6,48 persen atau dengan jumlah pengangguran sebesar 1,21 Juta (TPT laki - laki banyak mengalami peningkatan di tahun 2020 Sakernas Agustus 2020) Tahun 2021 TPT menurun menjadi 5,95% Tahun 2022 TPT menurun menjadi 5,57 %	TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) di Jawa Tengah Tahun 2022 sebesar 5,57 persen, masih lebih rendah dibandingkan TPT nasional (5,86 persen) dan TPT Provinsi Jawa Barat (8,31 persen), tetapi masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur (5,49 persen) dan DIY (4,06 persen) (Sakernas 2022 Agustus)	Dengan adanya Pandemi Covid 19 yang berakibat kegiatan ekonomi tidak berjalan dengan normal , sehingga banyak perusahaan atau pelaku usaha tidak beroperasi atau tutup sehingga tenaga kerjanya banyak menganggur yang juga menyumbang peningkatan penganggur terbuka dan setengah penganggur yang menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk miskin. Dan di tahun 2022 , kondisi membaik dari sebelumnya walaupun covid memang belum usai. Tetapi sudah mulai pemulihan ekonomi.
	Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Tengah Tahun 2018 ; TPT = 4,47 persen terdiri :TPT Laki –		

No	Urusan/Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	laki : 4,78 persen ; TPT Perempuan : 4,08 persen		
	Tahun 2019 ; TPT = 4,44 persen terdiri :TPT Laki – laki : 4,74 persen ; TPT Perempuan : 4,02 persen		
	Tahun 2020 ; TPT = 6,48 persen terdiri : TPT Laki – laki : 7,13 persen ; TPT Perempuan : 5,57 persen		
	Tahun 2021 ; TPT = 5,95 persen terdiri : TPT Laki – laki : 6,54 persen ; TPT Perempuan : 5,14 persen		
	Tahun 2022 ; TPT = 5,57 persen terdiri : TPT Laki – laki : 5,75 persen ; TPT Perempuan : 5,31 persen		
b.	Data TPAK : (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) di jawa Tengah dari Tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan . Tahun 2019 -2021 , TPAK perempuan mengalami peningkatan , TPAK laki- laki mengalami penurunan.	Tingkat partisipasi angkatan kerja , mereka yang sudah dan bersedia bekerja di jateng mengalami peningkatan , terutama untuk perempuan mengalami peningkatan dibanding laki - laki	Adanya kondisi peningkatan pasokan penawaran tenaga kerja
	Tahun 2018 = TPAK : 68,56 persen terdiri TPAK Laki – laki : 81,19 persen ; TPAK Perempuan :		

No	Urusan/Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	56,41 persen		
	Tahun 2019 = TPAK : 68,62 persen terdiri TPAK Laki – laki : 82,43 persen ; TPAK Perempuan : 55,33 persen		
	Tahun 2020 = TPAK : 69,43 persen terdiri TPAK Laki – laki : 81,68 persen TPAK Perempuan : 57,54 persen		
	Tahun 2021 = TPAK : 69,58 persen terdiri TPAK Laki – laki : 81,94 persen TPAK Perempuan : 57,58 persen		
	Tahun 2022 = TPAK : 70,84 persen terdiri TPAK Laki – laki : 83,74 persen TPAK Perempuan : 58,31 persen		
c	Jumlah penduduk Miskin diJawa Tengah dari tahun 2018 sebesar 11,32 persen mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi sebesar 10,80 persen dan meningkat di tahun 2020 menjadi 11,41 persen Jumlah Penduduk miskin tahun 2021 11,79% Jumlah Penduduk miskin tahun 2022 10,93 % atau 3,83 Juta orang (Maret 2022)	Jumlah penduduk Miskin di Jateng tahun 2021 meningkat menjadi 11,79% persen dan di tahun 2022 turun menjadi 10,93 %. (Maret 2022)	Dengan adanya Pandemi Covid 19 yang berakibat kegiatan ekonomi tidak berjalan dengan normal , sehingga banyak perusahaan atau pelaku usaha tidak beroperasi sehingga tenaga kerjanya banyak menganggur yang juga menyumbang peningkatan jumlah penduduk miskin. Tahun 2022 , Pandemi Covid belum usai walaupun kondisi sudah membaik dari tahun 2021.

No	Urusan/Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
d.	Penduduk Usia Muda 15 - 24 Tahun yang sedang tidak sekolah,bekerja atau mengikuti pelatihan atau Not In Employment, Education dan Training (NEET) di Jawa Tengah dari tahun 2019 sebesar 1.120.197 dari Jumlah Penduduk Usia Muda 15-24 tahun sebesar 5.510.447 atau NEET sebesar 20,33 persen menurun menjadi 19,70 persen di tahun 2020 (Feb) dengan NEET : 1.086.746 dan Penduduk Usia Muda : 5.516.110 orang Penduduk Usia Muda 2021 sebanyak 5.388.228 dan NEET sebanyak 1.298.297 Penduduk Usia Muda 2022 sebanyak 5.389.460 dan NEET sebanyak 1.101.412 orang	Jumlah NEET yang cukup tinggi mengisyaratkan bahwa dalam masyarakat terdapat sekelompok orang yang dapat mengalami ketergantungan secara permanen pada orang tua atau dapat menjadi beban ekonomi keluarga . Lalu pada ruang lingkup yang lebih luas yaitu kehidupan bermasyarakat .	Banyaknya penduduk usia muda yang tidak sedang bersekolah atau mengikuti pelatihan atau tidak sedang bekerja (dalam 4 minggu terakhir) sebelum disurvei tersebut perlu menjadi dasar dalam penentuan cakupan sasaran supaya dapat mengikuti pelatihan , sekolah ataupun bekerja atau sebagai dasar untuk peningkatan cipta kerja atau kesempatan kerja
	NEET merupakan penganggur terbuka muda yang sedang tidak mengikuti atau memperoleh pendidikan dan pelatihan(tergolong bukan angkatan kerja yang tidak sedang mengikuti		

No	Urusan/Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	pendidikan/ pelatihan)		
e.	Masih rendahnya persentase pengangguran yang ditangani	Rendahnya peningkatan tenaga kerja yang kompeten dan daya saing tenaga kerja	Masih terbatas nya sarpras dan berkurangnya Instruktur di BLK Pemerintah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) formasi baru belum sebanding dengan yang pensiun serta persebarannya
			Terbatasnya staf/pegawai yang dapat memahami SKKNI
			Terbatas fasilitasi kegiatan untuk UJK bagi Tenaga Kerja Indonesia
			Program pemagangan baik DN (Dalam Negeri) dan LN (Luar negeri)masih kurang memasyarakat serta Pemahaman program pemagangan masih terbatas belum sesuai dengan ketentuan/pedoman
			Rendahnya Jumlah peningkatan Lembaga Pelatihan Kerja yang terakreditasi
			Menindaklanjuti Perpres Nomor : 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi . Sampai saat ini belum dibentuk TKDV dan akan dibentuk TKDV (Tim Koordinasi Daerah Vokasi) menunggu Juknis dari kemenko – PMK .
		Rendahnya produktivitas tenaga kerja	Rendahnya semangat etos kerja dan disiplin serta produktivitas
			Identifikasi Kebutuhan pelatihan belum dapat dilakukan dengan baik (jejaring/kerjasama, kejuruan unggulan)
			Adanya pandemi Covid 19 menyebabkan berbagai kegiatan tidak berjalan sebagaimana biasanya, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan protokol kesehatan dan melakukan redesign kurikulum dan metode pendekatan human digital skill dan metode blended training
			Rendahnya perusahaan ataupun pelaku usaha dan atau masyarakat

No	Urusan/Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			yang menerapkan peningkatan produktivitas di tempat kerja
			Di Jawa Tengah , belum dibentuk LPD (Lembaga Produktivitas Daerah) sebagai pelaksana di Daerah mendasarkan Inpres 1 Tahun 2023 tentang Lembaga Produktivitas Nasional .
		Rendahnya penempatan pencari kerja pada pasar kerja	Informasi peluang kerja dan mekanisme penempatan tenaga kerja belum sepenuhnya dipahami masyarakat
			Dukungan personel kabupaten/kota dan provinsi serta sarana dan prasarana pendataan penempatan tenaga kerja kurang memadai
			Jumlah SDM yang menangani penempatan atau pengantar kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja yang membutuhkan fasilitasi penempatan
			Belum optimalnya pembinaan kelembagaan penempatan tenaga kerja karena keterbatasan personel, sarana dan prasarana
			Perlunya optimalisasi dan pengembangan aplikasi e- Makaryo dalam mempermudah akses bagi pencari kerja dan pengguna tenaga kerja dalam memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan /lowongan .
		Belum optimalnya penempatan dan penyerapan tenaga kerja sektor informal/usaha rumahan	Bantuan sarana usaha tidak mudah diberikan, terkendala pada aturan
			Permodalan dari lembaga keuangan tidak mudah diberikan tanpa jaminan serta suku bunga yang dianggap masih memberatkan
			Kompetensi SDM baik Provinsi maupun Kab/Kota belum seluruhnya memadai dalam menguasai sektor informal/kewirausahaan
			Dukungan sarana dan prasarana infrastruktur sebagai penunjang perekonomian pedesaan belum

No	Urusan/Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			seluruhnya memadai
			Tidak mudah dalam memasarkan produk, terutama di lokasi terpencil
			Masih rendahnya motivasi dan semangat masyarakat untuk terjun di sektor informal
		Belum optimalnya perusahaan yang memenuhi ketentuan menyusun Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Belum optimalnya peran lembaga Unsur Tripartit / optimalnya dialog sosial Unsur Hubungan Industrial.
			Rendahnya kepatuhan dan kesadaran Pengusaha dalam pembuatan Peraturan Perusahaan (PP)
			Rendahnya partisipasi Serikat Pekerja/Buruh dalam penyusunan Hukum otonom Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
			Masih rendahnya perusahaan yang memenuhi ketentuan menyusun Peraturan Perusahaan atau menyusun Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
			Tidak ada data Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja yang update sejak di berlakukannya Perijinan Berusaha PPJP melalui sistem OSS (online single submission) sehingga pembinaan Hubungan industrial tidak dapat berjalan optimal
		Belum optimalnya perlindungan tenaga kerja dan kesejahteraan tenaga kerja atau pengupahan	Masih rendahnya penyediaan fasilitas kesejahteraan Pekerja di perusahaan.
			Perlunya perlindungan dasar pekerja melalui penetapan UMP (Upah Minimum Provinsi), UMK (Upah Minimum Kab/Kota), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota
			Rendahnya kesadaran pengusaha untuk membuat SuSu (Struktur Skala Upah) yang adil dan proporsional di perusahaan
			Belum maksimalnya tindak lanjut

No	Urusan/Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			PP No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang terkait dengan kewajiban pelaksanaan Struktur dan Skala Upah
		Belum optimalnya pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan	Masih lemahnya kelembagaan hubungan industrial
			Pembinaan dan sosialisasi dari mediator hubungan Industrial untuk program jamsostek Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja masih kurang;
			Perlunya koordinasi efektif tindak lanjut UU Cipta Kerja, terkait pengupahan, hubungan kerja, PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan jaminan sosial
			Banyak mediator di kabupaten/kota yang dipindah tugaskan di luar bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
		Belum optimalnya jaminan sosial tenaga kerja	Program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah masih belum optimal.
			Di era pandemi covid sebagian besar perusahaan terdampak, sehingga fokus pada penataan kembali usahanya
		Belum optimalnya peningkatan penerapan norma ketenagakerjaan	Masih tingginya angka kecelakaan dan penyakit akibat kerja dan belum terlaksananya standarisasi K3 di tempat kerja
			Kurangnya pegawai pengawas KK (Ketenagakerjaan), baik pegawai pengawas KK (Ketenagakerjaan) umum maupun spesialis dibandingkan dengan jumlah perusahaan dan obyek K3
			Masih banyaknya pekerja anak yang bekerja sektor informal
			Masih kurangnya perlindungan hak normatif pekerja perempuan di sektor formal maupun informal
			Belum adanya peraturan/regulasi yang mengatur perlindungan

No	Urusan/Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			pekerja perempuan di sektor informal
			Masih lemahnya kebijakan perlindungan dan penempatan TKI ke luar negeri karena belum ada petunjuk pelaksanaan Undang-undang Pelindungan Pekerjaan Migran Indonesia
			Masih tingginya aduan / kasus ketenagakerjaan
	Belum optimalnya Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) dalam pembangunan ketenagakerjaan	Belum optimalnya implementasi dari Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD)	Meningkatnya permasalahan ketenagakerjaan akan menghambat pembangunan ekonomi, sehingga target kesejahteraan masyarakat tidak tercapai .
			Terbatasnya jumlah pegawai /ASN yang telah memahami ilmu perencana-an tenaga kerja makro dan perencanaan tenaga kerja mikro serta mengimple- mentasikannya .
			Belum maksimalnya tindak lanjut kolaborasi dan koordinasi antara Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Daerah (Kabupaten/Kota/Provinsi) sebagai leading /koordinator dalam penciptaan lapangan kerja secara sektoral
			Belum optimalnya pembinaan terkait perencanaan tenaga kerja daerah terhadap Kab/Kota atau Provinsi serta stake holder terkait dalam pembangunan ketenagakerjaan
			Belum maksimalnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan dan program / kegiatan / sub kegiatan pada pembangunan ketenagakerjaan dalam : a. Pendayagunaan Angkatan Kerja (AK) b. Pemerataan Kesempatan Kerja c. Perlindungan Tenaga Kerja d. Kesejahteraan pekerja dan keluarga
			Perlunya Koordinasi efektif tindak lanjut bahwa Perencanaan Tenaga kerja merupakan pedoman atau

No	Urusan/Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Pembangunan Ketenagakerjaan (UU No.13 Tahun 2003 pasal 7 ayat 1)
			Dan Permendagri 86 Tahun 2017 ;
			Permendagri 90 Tahun 2019 ;
			Kemendagri 050/3708 Tahun 2020 (Pemuthakiran Permendagri 90) ;
			Permendagri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraaan Pemerintah Daerah
2.	Transmigrasi		
	Jumlah penduduk Miskin di Jateng tahun 2020 meningkat menjadi 11 , 41 persen Jumlah Penduduk miskin tahun 2021 sebanyak 11,79 Persen Jumlah Penduduk miskin tahun 2022 sebanyak 10,93 Persen (3,83 Juta orang)	Rendahnya jumlah penempatan calon transmigran ke daerah tujuan transmigrasi dibandingkan animo calon transmigran .	Jumlah animo calon transmigran tidak sebanding dengan target/kuota yang diberikan dari Pusat (Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi)
			Rendahnya rata-rata tingkat pendidikan calon transmigran

3.2. Penentuan Isu- Isu Strategis

a. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan kondisi capaian indikator di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Gambaran kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi diuraikan sebagai berikut:

Pencari kerja yang ditempatkan selama periode Tahun 2018 – 2019 mengalami peningkatan, pada tahun 2018 ditempatkan sebanyak 167.247 orang meningkat menjadi 210.889 orang ditahun 2019. Namun terjadi penurunan di tahun 2020 menjadi 81.835 karena Pandemi Covid an meningkat di tahun 2021 sebesar 136.611 orang , menjadi 227.088 di tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa ada peningkatan jumlah tenaga kerja di Jawa Tengah yang ditempatkan sesuai kompetensinya dipasar kerja. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel.3.2.a.1
Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 (%)

Tahun	Pencari Kerja yang Terdaftar	Pencari Kerja yang Ditempatkan	Persentase
2018	240.246	167.247	69,61
2019	300.098	210.889	70,27
2020	220.763	81.835	37,07
2021	269.810	136.611	50,63
2022	322.041	227.088	70,52

Sumber: Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2022

Jumlah perusahaan dan jumlah tenaga kerja (Pekerja Penerima Upah) yang telah mengikuti program Jamsostek selama periode tahun 2018-2022 terus mengalami peningkatan, mengindikasikan bahwa kesadaran perusahaan dan tenaga kerja terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan semakin meningkat.

Tabel. 3.2.a.2
Perkembangan Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja yang Mengikuti Program Jamsostek di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022

No	Tahun	Jumlah Perusahaan (Unit)	Jumlah Tenaga Kerja (Orang) Peserta Program Jamsostek
1	2018	56.574	1.698.265
2	2019	69.866	1.781.754
3	2020	76.196	1.908.465
4	2021	83.511	2.003.518
5	2022	89.016	3.196.431

Sumber: Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2022

Kepesertaan pekerja/buruh sektor non formal (Bukan Penerima Upah) mengikuti program Jamsostek atau yang lebih dikenal dengan Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja (TKLHK) berfluktuasi selama tahun 2018-2022. Pada tahun 2020 mengalami penurunan dan pada tahun 2021 menjadi 310.785 orang yang mengalami penurunan yang sangat signifikan disebabkan dampak pandemi Covid-19. Kemudian mengalami peningkatan yang cukup tinggi di tahun 2022 menjadi 584.958 orang , hal ini dikarenakan pertambahan dari sektor informal seperti pelaku usaha UMKM, kelautan dan perikanan (nelayan), Perum Perhutani (LMDH Kehutanan), Perangkat Desa (ASN/Non ASN), dan sebagainya.

Tabel. 3.2.a.3
Perkembangan Jumlah Pekerja Sektor Non Formal yang Mengikuti Program Jamsostek di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022

No	Tahun	Jumlah Tenaga Kerja (orang) Peserta Program Jamsostek
1	2018	1.465.847
2	2019	1.378.435
3	2020	892.866
4	2021	310.785
5	2022	584.958

Sumber: Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2022

Jumlah kasus Hubungan Industrial (HI) selama tahun 2018-2022 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2021, jumlah kasus hubungan industrial sebanyak 35 kasus yang 100 persen terselesaikan. Tahun berikutnya jumlah kasus hubungan industrial yang diselesaikan mediator meningkat seiring dengan pembinaan dan pencegahan perselisihan hubungan industrial serta pengawasan ketenagakerjaan. Sehingga di tahun 2022, jumlah kasus perselisihan yang terjadi sebanyak 69 kasus yang 100 persen dapat terselesaikan.

Tabel. 3.2.a.4
Jumlah Kasus dan Status Penyelesaian Hubungan Industrial di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022

No	Tahun	Jumlah Kasus	Status
1	2018	265	100% terselesaikan
2	2019	124	100% terselesaikan
3	2020	96	100% terselesaikan
4	2021	35	100% terselesaikan
5	2022	69	100% terselesaikan

Sumber: Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2022

Not in Employment, Education or Training (NEET) adalah penduduk usia 15-24 tahun (Angkatan kerja / kelompok umur muda) yang sedang tidak bekerja, tidak sekolah atau mengikuti pelatihan . Jumlah NEET di Jawa Tengah relatif meningkat sejak tahun 2017 dari 1.044.465 orang menjadi 1.205.564 orang pada tahun 2019, demikian pula pada tahun 2020 meningkat menjadi 1.298.297 orang. Pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 1.210.735 orang dan di tahun 2022 menurun menjadi 1.102.412 orang. Hal tersebut menandakan bahwa dalam masyarakat masih terdapat sekelompok orang yang termasuk dalam angkatan kerja atau kelompok usia muda yang bila fenomena NEET secara masif dan berkepanjangan akan berpotensi memberikan dampak negative yang lebih besar, baik pada diri dan lingkungannya .

Pada lingkup keluarga, NEET akan mengalami ketergantungan secara permanen pada orang tua dan dapat menjadi beban ekonomi keluarga. Pada ruang lingkup yang lebih luas yaitu dalam kehidupan bermasyarakat , NEET dianggap sebagai sekompok orang yang tidak hanya membahayakan stabilitas negara tetapi juga merusak tatanan masyarakat yang dapat berdampak terburuk yang mungkin terjadi adalah terhambatnya roda perekonomian suatu negara terlebih pada negara yang memiliki penduduk usia muda yang tinggi dan negara harus mengimpor Tenaga kerja (TKA) untuk membantu proses pelaksanaan industri, pembangunan dan perekonomian di negaranya.

Tabel. 3.2.a.5
Jumlah *Not in Employment, Education or Training (NEET)* di Jawa Tengah
Tahun 2018 – 2022

No	Tahun	Jumlah *NEET* (orang)	Penduduk Usia Kerja Muda	Persentase
1	2018	1.171.567	5.521.380 orang	21,21
2	2019	1.205.564	5.524.810 orang	21,82
3	2020	1.298.297	5.407.899 orang	24,00
4	2021	1.097.209	5.388.228 orang	20,36
5	2022	1.101.412	5.389.460 orang	20,43

Sumber: Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2022

Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah dokumen yang harus dimiliki oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan pada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disusun oleh perusahaan selama periode tahun 2018-2022 mengalami peningkatan, meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2019. Hal ini menunjukkan masih kurang optimalnya perusahaan yang memenuhi ketentuan menyusun Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Kemudian tahun berikutnya mengalami peningkatan jumlah Peraturan Perusahaan (PP) dan PKB (Perjanjian Kerja Bersama). Pada tahun 2022 jumlahnya meningkat menjadi 4.641 PP dan 661 PKB menjadi seiring dengan bertambahnya perusahaan yang baru, maka semakin bertambah pula jumlah peraturan perusahaan yang disahkan dan juga telah banyak dilaksanakan pembinaan terkait dengan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 3.2.a.6
Jumlah Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
Tahun 2018 – 2022

No	Tahun	Jumlah *Peraturan Perusahaan (PP)*	Jumlah Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
1	2018	4.857	830
2	2019	3.967	579
3	2020	4.230	614
4	2021	4.540	661
5	2022	5.245	787

Sumber: Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2022

Sedangkan untuk urusan Transmigrasi, realisasi pengiriman transmigran Tahun 2012 hingga tahun 2017 cenderung menurun, yaitu pada tahun 2012 sebesar 700 KK (12,28%) dan pada tahun 2017 sebesar 155 KK (7,01%), namun pada tahun 2016 pernah mencapai sebesar 13,26%, dan meningkat di tahun 2018 sebesar 169 KK serta menjadi 189 KK di tahun 2019 . Kemudian data terakhir yaitu di tahun 2020 persentase capaian sebesar 0% dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Realisasi penempatan didasarkan dari SPP (Surat Pemberitahuan Penempatan) yang diterbitkan oleh Pusat, antara lain disebabkan oleh belum siapnya lokasi penempatan.

Pada tahun 2021 penempatan atau pengiriman transmigrasi mengalami penurunan yaitu sejumlah 10 KK dan meningkat di tahun 2022 menjadi 53 KK (Kepala Keluarga). Hal ini disebabkan karena ketergantungan pada KUota yang ditetapkan oleh Pusat atau Kementerian Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Capaian pengiriman transmigran Jawa Tengah dari Tahun 2012 - 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel. 3.2.a.7
Capaian Pengiriman Transmigran
Asal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 – 2022

Tahun	*Animo (KK)*	*Kuota/Target Pusat (KK)*	*Realisasi Penempatan (KK)*	*Persentase Realisasi Penempatan Terhadap Animo*
2012	5.697	870	700	12,28
2013	4.760	540	471	9,89
2014	3.624	142	122	3,36
2015	2.408	239	179	7,43
2016	2.397	326	318	13,26
2017	2.211	155	153	7,01
2018	2.246	170	169	7,52
2019	2.358	243	185	7,84
2020	1.263	0	0	0
2021	1.267	10	10	0,79
2022	1.003	53	53	5,28
Jumlah	**28.964**	**2.748**	**2.360**	**14,59**

Sumber : Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2022

b. Sasaran Jangka Menengah dari Renstra K/L;

Telaah kebijakan nasional menyangkut kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah yaitu melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan pada agenda dan sasaran pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian merupakan bagian dari agenda dan sasaran pembangunan nasional, pembangunan bidang ekonomi,pembangunan lintas bidang dan pembangunan wilayah demi terwujudnya visi dan misi pembangunan nasional adalah sebagai berikut :

1. Kementerian Ketenagakerjaan - Pembangunan ketenagakerjaan dalam kerangka agenda dan sasaran pembangunan nasional

   Visi dan misi Kementerian Ketenagakerjaan merupakan bagian dari visi danmisi pembangunan nasional, pembangunan bidang ekonomi, pembangunanlintas bidang dan pembangunan wilayah demi terwujudnya visi dan misipembangunan nasional. Berikut adalah visi dan misi KementerianKetenagakerjaan.

1). Visi

Kementerian Ketenagakerjaan melaksanakan visi Presiden-Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu, "Indonesia Majuyang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"

Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 adalah;

a. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
b. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
c. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
d. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
e. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
f. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
g. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
h. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
i. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Kementerian Ketenagakerjaan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden; poin a, poin b, poin c, poin g, poin h dan poin i. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Tahun 2020- 2024 tersebut yaitu:

a. memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif, kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
b. menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi dan hubungan kelembagaan, dan
c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Ketenagakerjaan.

1) Tujuan Kementerian Ketenagakerjaan

Kementerian Ketenagakerjaan memiliki tujuan:

a. mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing menghadapi dinamika pasar kerja yang fleksibel;
b. mewujudkan reformasi peraturan yang mendorong percepatan investasi dan penciptaan lapangan kerja;
c. meningkatkan perluasan penempatan tenaga kerja baik dalam danluar negeri dalam rangka penciptaan lapangan keija;
d. meningkatkan produktivitas tenaga kerja Indonesia yang sesuaikebutuhan dunia usaha dan dunia industri di masa datang;
e. mewujudkan hubungan industrial dan dialog socialketenagakerjaan yang mendorong tumbuhnya suasana kerja yangkondusif;
f. mewujudkan perluasan dan kualitas perlindungan tenaga kerjayang mendorong produktivitas tenaga kerja berkelanjutan;
g. mewujudkan tata kelola ketenagakerjaan yang efisien dan efektif dalam menghadapi perubahan dunia yang dinamis.

2.) Sasaran Strategis Kementerian Ketenagakerjaan

Dalam rangka mendukung visi, misi presiden, agenda dan sasaran pembangunan nasional secara lebih terukur, maka ditetapkan sasaran strategis Kementerian Ketenagakerjaan sebagai berikut:

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, KementerianKetenagakerjaan menuangkannya ke dalam dua sasaran strategis, yakni:

a. Meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing dan iklimhubungan industrial yang kondusif dalam menghadapi pasar kerja fleksibel. Peningkatan daya saing tenaga kerja dan iklim hubunganindustrial yang kondusif perlu menjadi sasaran strategis dalam periode 2020-2024. Masalah daya saing tenaga kerja yang rendah ini berkaitan dengan kualitas SDM yang rendah, karena tenagakerja masih didominasi oleh lulusan SD (40,7 persen), sementara tidak semua tenaga kerja lulusan pendidikan yang lebih tinggimemiliki kesiapan dan kapasitas sesuai kebutuhan dunia kerja.

Mismatch keterampilan, kesenjangan kualitas pendidikanAntar

wilayah, keterbatasan talenta untuk siap dilatih dan bekerja menjadi isu-isu yang perlu ditangani dalam peningkatan kualitas tenaga kerja. Oleh sebab itu, produktivitas dan daya saing manusia Indonesia masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan Global Human Capital Index oleh World Economic Forum (WEF) 2017, peringkat SDM Indonesia berada pada posisi 65 dari 130 negara, tertinggal dibandingkan Malaysia (peringkat33), Thailand (peringkat 40), dan Vietnam (peringkat 64).

Meskipun produktivitas tenaga kerja Indonesia mengalami peningkatan, yaitu dari 81,9 juta rupiah/orang pada tahun 2017 menjadi 84,07 juta rupiah/orang pada tahun 2018, produktivitas tenaga kerja Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia. Selain itu, pertumbuhan PDB Indonesiasebesar 4,9 persen di tahun 2017, hanya 0,6 persen yang bersumber dari Total Factor Productivity (TFP). Sisanya 2,8 persen pertumbuhan ekonomi bersumber dari modal kapital dan 1,5 persen persen dari modal manusia.

Kebutuhan tenaga kerja terampil, kreatif, inovatif dan adaptif belum dapat dipenuhi secara optimal. Rendahnya kualitas tenaga kerja yang belum merespon perkembangan kebutuhan pasar kerjamerupakan salah satu penyebab mengapa produktivitas dan daya saing Indonesia masih tertinggal. Saat ini proporsi pekerja berkeahlian menengah dan tinggi di Indonesia hanya sekitar 39,57
persen (Sakemas Agustus, 2018), lebih rendah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya.

Lebih lanjut, dalam menghadapi pasar kerja yang fleksibel,diperlukan tenaga kerja yang adaptif yang mampu menunjang perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi. Hal ini dapatdilakukan salah satunya melaluireformasi ketenagakerjaan melalui upaya penciptaan iklim ketenagakerjaan yang kondusifyang didukung oleh hubungan industrial yang harmonis,penguatan collective bargaining, penyempumaan peraturanketenagakerjaan, peningkatan keahlian dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan

peran pemerintah daerah, serta peningkatan perlindungan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luarnegeri.

b. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik. Dari aspek tatakelola pemerintahan yang baik diharapkan menuju pada Pemerintahan yang dinamis (*Dynamic Govermental*) yaitu suatu tata kelola pemerintahan yang responsif atas aspirasi masyarakat, perubahan lingkungan strategis pembangunan yang cepat tanggapdan mampu mengelola perubahan.

2. Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

Visi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi tahun 2020-2024 mengacu kepada Visi Presiden dan Wakil Presiden. Visi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal tahun 2020-2024 adalah:

"Terwujudnya perdesaan yang memiliki keunggulan kolaboratif dan daya saing".

Pengertian dari visi tersebut adalah :

Perdesaan adalah wilayah desa-desa atau kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi baik di daerah tertinggal maupun di daerah tidak tertinggal yang menjadi wilayah kerja sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Keunggulan Kolaboratif adalah kondisi yang diharapkan agar perdesaan memiliki kemampuan untuk membentuk kemitraan dengan wilayah/kawasan lainnya yang efektif dan bermanfaat dan saling menguntungkan untuk lebih meningkatkan keunggulan daya saing.

Keunggulan Daya Saing adalah kondisi yang diharapkan agar perdesaan di Indonesia memiliki kinerja yang lebih baik dalam meningkatkan nilai tambah dibandingkan dengan negara lainnya baik di aras regional maupun internasional.

Misi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024

Visi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 akan dapat dicapai melalui misi sebagai berikut:

1. Mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan
2. Meningkatkan penatakelolaan ekonomi dan investasi perdesaan
3. Membangun dan mengembangkan kawasan transmigrasi
4. Menyerasikan kebijakan dan program pembangunan daerah tertinggal
5. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perdesaan
6. Meningkatkan penatakelolaan pemerintahan yang baik dan bersih

1). Tujuan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2020-2024

Tujuan yang ingin dicapai pada kurun 2020-2024 sesuai dengan visi dan misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, sebagai berikut:

1. Terwujudnya Desa Mandiri
2. Terwujudnya integrasi perdesaan dan perkotaan
3. Tumbuh dan berkembangnya investasi perdesaan
4. Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan
5. Terentaskannya daerah tertinggal
6. Terwujudnya sumber daya manusia perdesaan unggul
7. Terwujudnya tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya

2) Sasaran Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2020-2024

Sasaran Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2020-2024 sejalan dengan tujuan yang akan dicapai, seperti yangdisajikan pada Tabel Sasaran Strategis Kementerian berikut dibawah ini sebagai berikut : SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2020-2024

Sasaran Strategis Kemendesa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2020-2024

No	Tujuan	Sasaran Strategis
1	Terwujudnya desa mandiri	Meningkatnya 10.000 desa tertinggal menjadi desa berkembang
		Meningkatnya 5.000 desa berkembang menjadi desa mandiri
2	Terwujudnya integrasi perdesaan dan perkotaan	Meningkatnya 11 kawasan perdesaan yang berkembang sebagai pusat pertumbuhan untuk mengintegrasikan perdesaan dan perkotaan
		Meningkatnya 43 kawasan perdesaan yang berkembang menjadi mandiri sebagai pusat pertumbuhan untuk mengintegrasikan perdesaan dan perkotaan
		Meningkatnya 6 kawasan perdesaan yang mandiri menjadi berdaya saing sebagai pusat pertumbuhan untuk mengintegrasikan perdesaan dan perkotaan
3	Tumbuh dan berkembangnya investasi produk unggulan perdesaan	Meningkatnya investasi produk unggulan produk perdesaan rata-rata per tahun sebesar 5%
4	Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan	Meningkatnya 13 kawasan transmigrasi yang berkembang

c. Implikasi Sasaran Jangka Menengah dari Renstra PD Kab/Kota

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah dari Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang Tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas layanan ketenagakerjaan
Indikator Tujuan :
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di bidang ketenagakerjaan

Sasaran :

1.) Meluasnya Kesempatan Kerja Bagi Masyarakat dan Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Indikator Sasaran : Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)

2.) Meningkatnya kualitas Hubungan Industrial dan Kualitas Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Indikator Sasaran : Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak

Sedangkan tujuan dan sasaran untuk kesekretariatan sebagai berikut :

Tujuan 2: Meningkatkan kinerja perangkat daerah yang akuntabel dan pelayanan publik yang cerdas,cepat dan responsif.
Indikator Tujuan 2: Persentase indikator kinerja sasaran strategis perangkat daerah yang mencapai target .

Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang Tahun 2023 sd 2026 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang
Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun ke-			
			2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya kualitas layanan ketenagakerjaan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di bidang ketenagakerjaan	85	85	90	90
	Meluasnya Kesempatan Kerja Bagi Masyarakat dan Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Kesempatan kerja	97	97	97	97
	Meningkatnya kualitas Hubungan Industrial dan Kualitas Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	30,37	31,17	32,01	32,8
Meningkatkan kinerja perangkat daerah yang akuntabel dan pelayanan publik yang Cerdas, Cepat dan Responsif		SAKIP OPD	65	70	70	75
	Meningkatnya capaian kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	70	80	80	80

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang, Hasil Perumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2023-2026

Berdasarkan sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang Tahun 2023 – 2026, dapat dilihat bahwa ada keterkaitan erat dengan pengembangan bidang urusan tenaga kerja dan transmigrasi, khususnya dari Provinsi Jawa Tengah . Oleh karena Dinas ketenagakerjaan Kab. Batang mendukung capaian kinerja bidang urusan tenaga kerja dan transmigrasi Provinsi Jawa Tengah , yang diampu oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

Untuk melaksanakan program pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan ketrasnmigrasian dilakukan dengan program bidang urusan tenaga kerja dan transmigrasi yang dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah sesuai nomennklatur Permendagri 90 Tahun 2019 dan pemuthakirannya Kepmendagri No.050 Tahun 2020 dan pemutahkhirannya dengan Kepmendagri No. 050/5889 tahun 2021 adalah sebagai berikut :

a. Program Perencanaan Tenaga Kerja

b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.

c. Program Penempatan TenagaKerja

d. Program Hubungan Industrial

e. Program Pengawasan Ketenagakerjaan

f. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

d. Implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bagi Perangkat Daerah

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dilakukan merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029. Disebutkan dalam pasal 9, pengembangan Kawasan industri masuk dalam pengembangan Kawasan budidaya yang meliputi mengembangkan dan melestarikan Kawasan peruntukan industri untuk mewujudkan nilai tambah dan meningkatkan perekonomian daerah dan/atau nasional.

Berdasarkan telaahan dokumen tersebut ,tidak ada keterkaitan erat/langsung dengan RTRW maupun KLHS dalam pengembangan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.

Tabel 3.5.

Implikasi RTRW dan KLHS pada

Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

No.	Kebijakan RTRW/KLHS	Tupoksi DinasTenaga Kerjadan Transmigrasi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
I	**RTRW**	Tugas :		Penghambat
	Pola Ruang dan Struktur Ruang RTRW	melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepadaDaerah	1. Rendahnya peningkat-an tenaga kerja yang kompeten 2. Rendahnya penempat-an pencari kerja pada pasar kerja 3. Belum optimalnya penyelesai an perselisih-an hubungan industrial 4. Belum optimalnya peningkatan penerapan norma ketenagaker jaan	1. Berkurangnya Instruktur di BLK PemerintahDaerah 2. Terbatasnya staf/pegawai yang dapat memahami SKKNI 3. Terbatas fasilitasi kegiatan untuk UJK bagi Tenaga Kerja Indonesia 4. Pemahaman program pemagangan masih terbatas belum sesuai dengan ketentuan/ pedoman 5. Identifikasi Kebutuhan pelatihan belum dapat dilakukan dengan baik (jejaring/ kerja sama kejuruan unggulan)
				6. Jumlah SDM yang menangani penempatan/ penga ntar kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja yang membutuhkan fasilitasi

No.	Kebijakan RTRW/KLHS	Tupoksi DinasTenaga Kerjadan Transmigrasi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
I	**RTRW**	Tugas :		Penghambat
				penempatan 7. Dukungan sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam operasional kegiatan 8. Masih lemahnya kelembagaan hubungan industrial 9. Pembinaan dan sosialisasi dari mediator hubungan Industrial untuk program jamsostek Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja masihkurang; 10. Banyak mediator di kabupaten/kota yang dipindah tugaskan di luar bidang Hubungan Industrial dan JaminanSosial 11. Belum tersedianya data mengenai produktivitas usaha marginal dan kondisi pasar kerja yang valid di kabupaten/kota 12. Pembinaan dan

No.	Kebijakan RTRW/KLHS	Tupoksi DinasTenaga Kerjadan Transmigrasi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
I	**RTRW**	Tugas :		Penghambat
				sosialisasi dari mediator hubungan Industrial untuk program jamsostek Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja masih kurang;

No.	Kebijakan RTRW/KLHS	Tupoksi DinasTenaga Kerjadan Transmigrasi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
I	**RTRW**	Tugas :		Penghambat
				13. Banyak mediator di kabupaten/kota yang dipindah tugas atau pindah / mutase/promosi di luar bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 14. Belum tersedianya data mengenai produktivitas usaha-usaha marginal dan kondisi pasar kerja yang valid di kabupaten/kota 15. Kurangnya pegawai pengawas ketenagakerjaan (KK) dibandingkan jumlah perusahaan dengan jumlah perusahaan, yaitu pengawas KK sebanyak 146 orang, PPNS sebanyak 39 orang dan sepesialis sebanyak 40orang. 14. Masih banyaknya pekerja anak yang bekerja sektor informal, yaitu jumlah pekerja anak berdasarkan data BPS .

				15. Masih kurangnya perlindungan hak normatif pekerja perempuan di sektor formal maupun informal. Belum optimalnya perusahaan dalam menerapkan peraturan perundangan ketenagakerjaan terkait cuti melahirkan, cuti gugur kandungan, cuti haid, Penyediaan pojok laktasi, diskriminasi jabatan dan pengupahan pekerja perempuan. 16. Belum adanya peraturan/regulasi yang mengatur perlindungan pekerja perempuan di sektor informal, hanya Undang- Undang Nomor : 80 Tahun 1957 tentang Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 100 Mengenai Pengupahan Yang Sama Bagi Buruh Laki-Laki Dan Wanita untuk

				Pekerjaan yang Sama Nilainya dan Undang-Undang No. 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan) 17. Masih lemahnya kebijakan perlindungan dan penempatan TKI ke luar negeri dan kurangnya koordinasi kelembagaan penempatanTKI

No.	Kebijakan RTRW/KLHS	Tupoksi DinasTenaga Kerjadan Transmigrasi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
II.	**Program Indikatif KLHS** Permasalahan dari target TPB belum tercapai, belum menjadi target, belum ada data :	**Fungsi**		**Pendorong**
	1. Target peningkatan laju pertumbuhan PDRB, PDRB per kapita dan PDB per tenaga kerja 2. Rata-rata upah pekerja per jam 3. Pekerja informal Sektor non pertanian 4. Tingkat setengah Pengangguran dan pengangguran terbuka 5. Usia muda (15 -24 Tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau pelatihan (NEET) 6. Peserta program Jaminan sosial bidang ketenagakerjaan 7. Pelayanan penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (TKLN) berdasarkan okupasi	1. Perumusan Kebijakan bidang pelatihan kerja dan produktivitas, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, hubungan industrial dan jaminan sosial, dan pengawasan ketenagakerjaan; 2. Pelaksanaan kebijakandi bidang pelatihan kerja dan produktivitas, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, hubungan industrial dan jaminan sosial, dan pengawasan		1. Informasi peluang kerja dan mekanisme penempatan tenaga kerja 2. Dukungan personel pendataan tenaga kerja 3. Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan yang terkait dengan standar Skala Upah

		ketenagakerjaan; 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pelatihan kerja dan produktivitas, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, hubungan industrial dan jaminan sosial, dan pengawasan		
	Isu Strategis Terkait Kondisi Lingkungan Hidup:			
	1. Penurunan lahan pertanian irigasi dan tadah hujan dan meningkatnya kawasan peruntukan industri akan merubah			

No.	Kebijakan RTRW/KLHS	Tupoksi DinasTenaga Kerjadan Transmigrasi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	proporsi tenaga kerja berdasarkan lapangan pekerjaan 2. Menurunnya kemandirian ekonomi daerah	ketenagakerjaan; 4. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas;dan 5. Pelaksanaan fungsi kedinasan yang lain diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya		
	Skenario :			
	1. Kapasitas Prasarana air baku yang baru mencapai 58,5% dari total layanan rumah tangga, perkotaan dan industri 2. Kenaikan laju pertumbuhan PDRB dan total PDRB per kapita belum sesuai dengan target nasional 3. Masih adanya tingkat pengangguranterbuka berdasarkan jenis kelamin dankelompok umur 4. Belum seluruh tenaga kerja menjadipeserta program jaminan sosial bidangketenagakerjaan			
	Rekomendasi			

	1. Peningkatan kapasitas prasaran air baku sampai dengan 69,95% dari total layanan rumah tangga, perkotaan dan industri 2. Meningkatkan laju pertumbuhan PDRB sampai dengan 7% 3. Meningkatkan PDRB per kapita sampai dengan 41,74 juta dari target nasional 50juta 4. Memasukkan indikator dalam rencana pembangunan untuk tingkat penganggur an terbuka meskipun telah mencapai target nasional yaitu 4,57% dari target nasional 5,5% 5. Mendorong perusahaan untuk mendaftarkan seluruh tenaga kerjauntuk menjadi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerj aan			

Berangkat dari telaahan dan kondisi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian tersebut, maka dirumuskan isu-isu strategis kedepannya itu diantaranya :

i. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Tengah dari tahun 2018 sebesar 4,47 persen menurun menjadi 4,44 persen dan tahun 2020 meningkat menjadi 6,48 persen atau dengan jumlah pengangguran sebesar 1,21 Juta (TPT laki - laki banyak mengalami peningkatan di tahun 2020 Sakernas Agustus 2020). Dan di tahun 2021 TPT menurun menjadi 5,95 persen dan ditahun 2022 menjadi 5,57 persen (Sakernas , Agustus 2021 dan 2022)

ii. Persentase tenaga kerja kelompok RT 20 persen berpenghasilan terendah yang bekerja kurang dari 15 jam per minggu target tahun 2020 sebesar 5,65 persen realisasinya 7,95 persen, sedangkan target tahun 2021 sebesar 5,6 persen realisasi 5,51 persen, dan target di tahun 2022 sebesar 5,55 persen .

iii. Tingginya Angkatan Kerja yang Bekerja dengan Jam Kerja Kurang Dari 35 jam (1-34 jam) per minggu / pekerja tidak penuh sebagai berikut :

Tahun	2020	2021	2022
Setengah penganggur	1,51 jt ; 8,6 %	1,29 jt ; 7,23 %	0,99 jt; 5,39 %
Pekerja paruh waktu	4,32 jt ;24,65%	4,37 jt ; 24,5 %	4,27 jt; 23,2 %
Pekerja tidak penuh	5,83 jt ;33,25%	5,66 jt; 31,73 %	5,26 jt; 28,59 %

iv. Jumlah penduduk Miskin di Jawa Tengah dari tahun 2018 sebesar 11,32 persen mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi sebesar 10,80 persen dan meningkat di tahun 2020 menjadi 11,41 persen dan di tahun 2021 menjadi 11,79 persen dan menurun di tahun 2022 penduduk miskin menjadi 3,83 Juta orang atau 10,93 persen.

v. Penduduk Usia Muda 15 - 24 Tahun yang sedang tidak sekolah,bekerja atau mengikuti pelatihan atau Not In Employment, Education dan Training (NEET) di Jawa Tengah dari tahun 2019 sebesar 1.120.197 dari Jumlah Penduduk Usia Muda 15-24 tahun sebesar 5.510.447 atau NEET sebesar 20,33 persen menurun menjadi 19,70 persen di tahun 2020 dengan NEET : 1.298.297 dan Penduduk Usia Muda : 5.407.899 orang, menurun ditahun 2021 dengan NEET : 1.097.209 orang dan Penduduk Usia Muda : 5.388.228 orang dan meningkat menjadi 1.101.412 dan Penduduk Usia Muda : 5.389.460 orang .

vi. Berkaitan dengan *isu Link and Match* antara kompetensi tenaga kerja dan lowongan pekerjaan/jabatan pekerjaan diharapkan dengan terbitnya Terbitnya Peraturan Presiden No.68/2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Akan memberikan solusi dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja . Oleh karena itu Provinsi Jawa Tengah harus membentuk Tim TKDV (Tim Koordinasi Daerah Vokasi) yang diantaranya anggota Tim tersebut dari Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah serta KADIN. Saat ini sedang menunggu Petunjuk Teknis dari Kemenko – PMK.

vii. Berkaitan dengan isu peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja , diharapkan dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2023 tentang Lembaga Produktivitas Nasional, yang mendasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 50 Tahun 2005 tentang Lembaga Produktivitas Daerah. Akan memberikan peluang dan tantangan bagi daerah dalam menetapkan langkah – langkah untuk mengkoordinasikan kerja sama dan dibangun lembaga pelayanan peningkatan produktivitas di tingkat Daerah . Serta mengatur pembentukan jejaring lembaga pelayanan peningkatan produktivitas .

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah selama 3 (tiga) tahun ke depan . Adapun rumusan Tujuan dan Sasaran sebagai berikut :

a. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut : " Meningkatnya Pengurangan Pengangguran".

b. Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 untuk mencapai Tujuan tersebut adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja Daerah.
2. Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja.
3. Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja.
4. Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial.
5. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Norma Ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3) Dan Lingkungan Kerja.

Untuk Sasaran dan indikatornya yang berkaitan dengan kesekretariatan ditetapkan sebagai berikut:

6. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah.
7. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Resiko Perangkat Daerah.

Selengkapnya relasi rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi akan tersaji pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Kinerja			Kondisi Kinerja Akhir
					2021	2022	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tujuan 1 : Meningkatnya pengurangan pengangguran		Persentase pengangguran yang ditempatkan	Persentase	19,7	28,02	28,6	28,64	28,7	28,7
		Sasaran 1.1 : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah	Persentase	-	34	62,85	68,57	74,28	74,28
		Sasaran1.2:Meningkatnya Kompetensi Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di Jawa Tengah (Juta Rp)	(Juta Rp)	55,91	57.11	56,00	56,50	57,00	57,00
			Persentase peningkatan tenaga kerja yang kompeten	Persentase	5,34	9,70	9,24	10,15	10,53	10,53

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Kinerja			Kondisi Kinerja Akhir
					2021	2022	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Sasaran 1.3 : Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Persentase	50,63	70,52	71,04	71,06	71,08	71,08
		Sasaran 1.4 : Meningkatnya perlindungan tenaga kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persentase	-	90,56	91,07	91,58	92,09	92,09
		Sasaran 1.5 : Meningkatnya Kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3 dan lingkungan Kerja)	Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan	Persentase	89,51	88,1	81,53	80,96	80,38	80,39

Untuk Tujuan dan Sasaran serta indikatornya yang berkaitan dengan kesekretariatan ditetapkan sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Kinerja			Kondisi Kinerja Akhir
					2021	2022	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah		Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah				90	91	92	92
		Sasaran 2.1 : Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai kepuasan masyarakat	Nilai/Angka	85,25	85	85,1	85,2	85,25	85,25
		Sasaran 2.2 : Meningkatnya kualitas pengelolaan resiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Resiko Indeks (MRI) perangkat daerah	Nilai/Angka	N/A	3,00	3,01	3,02	3,03	3,03

4.2 Manajemen Resiko Strategis Perangkat Daerah

Manajemen risiko merupakan proses pengelolaan terhadap risiko mulai identifikasi, analisis dan evaluasi risiko dan termasuk rencana pemantauan dan rencana komunikasi. Proses manajemen risko dalam penyusunan Renstra PD dilakukan pada konteks strategis sampai dengan operasional. Untuk level strategis perangkat daerah dilakukan proses manajemen resiko pada konteks risiko strategis yang hasilnya sebagi berikut :

Tabel 4.2

Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	Persentase Kabupaten /kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah	Kebijakan, Strategi dan Program Pembangunan urusan tenaga kerja yang ditetapkan kurang tepat .	12	Kurangnya pemahaman dari Kab/kota dalam menyusun dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah	Kurang tepatnya dalam menentukan target persediaan tenaga kerja dan kebutuhan tenaga kerja serta neraca tenaga kerja dalam perencanaan ke depan .	- Melakukan Pembinaan dan Pendampingan pada Aparatur pegawai didaerah (Kab/Kota /Prov) dalam menyusun dokumen RTKD . '- Melakukan Reviu terhadap RTKD Provinsi Jawa Tengah tiap tahun . - Untuk menilai keakurasian hasil perkiraan 6 indikator dalam RTKD dengan	Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desember

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
						realisasi yang diterbitkan BPS pada tiap tahunnya. - Menyampaikan hasil analisis untuk bahan kebijakan dan evaluasi kebijakan, Strategi dan Program Pembangunan urusan tenaga kerja .		
Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Persentase peningkatan tenaga kerja yang kompeten	Terjadinya gratifikasi saat melakukan verifikasi untuk rekomendasi LPK	12	Pengelola LPKS / Lembaga Pelatihan Kerja Swasta ingin cepat mendapat rekomendasi LPK tersebut, supaya dapat dengan cepat untuk melatih pencaker tanpa dilakukan verifikasi oleh Dinas	1.Kompetensi calon tenaga kerja tersebut tidak terjamin kelayakannya akibat lembaga pelatihan yang menyelenggarakan pelatihan tersebut belum dinyatakan	-Intensifikasi dalam peningkatan kapasitas pegawai terkait etos kerja dan budaya kerja supaya berintegritas yang tinggi . - Merencanakan pembuatan aplikasi di tahun 2024	Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	Januari - Desember

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
				ketenagakerjaan setempat/ verifikator untuk merekrut peserta pelatihan dengan job order/permintaan khususnya dari luar negeri.	layak menyelenggarakan pelatihan/belum diverifikasi . - 2.Pemalsuan dokumen negara termasuk kasus Pidana - 3.Dimungkinkan ada indikasi terjadinya gratifikasi dalam pelayanan dalan verifikasi ijin LPK			
Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga	Tingkat produktivitas tenaga kerja di jawa Tengah (	Produktivitas dan kompetensi tenaga kerja kurang	16	Kurangnya pemahaman produktivitas di perusahaan	Produktivitas tenaga kerja kurang optimal, sehingga perusahaan	- Sosialisasi , pelatihan pelatihan peningkatan produktivitas , pengukuran produktivitas baik	Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	Januari - Desember

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
kerja	dalam juta rupiah)	memadai			tidak mendapat nilai tambah yang tinggi (tetap) dan menyebabkan upah tenaga kerja tidak naik secara signifikan	untuk pencari kerja , tenaga kerja di perusahaan dan wirausaha baru di masyarakat serta pengusaha / pengelola perusahaan.		
Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	Pemberdayaan Masyarakat kurang tepat sasaran	12	Penentuan lokasi kegiatan pemberdayaan masyarakat berdasarkan usulan yang masuk ke Disnakertans jateng.	Tidak terserapnya tenaga kerja baru di sektor informal	1. Penyuluhan di masyarakat tentang peluang kerja di sektor Informal. 2. Kolaborasi dan kerjasama lintas sektor dengan stake holder terkait dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja sektor informal.	Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	Januari - Desember
Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	Pencari kerja yang belum dapat ditempatkan, karena	16	Pencari kerja kurang mendapatkan informasi mengenai kondisi pasar	Pencari kerja yang belum ditempatkan menambah jumlah penganggura	Sosialisasi, Penyuluhan dan Bimbingan, Pembekalan, Pengembangan Aplikasi	Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	Januari - Desember

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
kesempatan kerja		tidak memenuhi kebutuhan pasar kerja		kerja	n.			
Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	Calon Transmigrasi mengundurkan diri saat pemberangkatan ke daerah tujuan penempatan transmigrasi	12	Rentang waktu pemberangkatan cukup lama,calon transmigran mencari kerja yang lain	Penempatan transmigran tidak terpenuhi targetnya.	Sosialisasi	Kepala Dinas Nakertrans	6 bulan setiap tahun

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Meningkatnya perlindungan tenaga kerja dalam hubungan industrial dan jaminan sosial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Perusahaan tidak menerapkan tata kelola kerja yang layak	12	Perusahaan tidak mengetahui, memahami atau tidak mau melaksanakan aturan tentang PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur dan Skala Upah dan BPJS Ketenagakerjaan	1. Tidak kondusifnya hubungan industrial yang ada di perusahaan 2. Terdapat sanksi bagi perusahaan yang tidak membuat PP, membentuk LKS Bipartit, menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah, dan mendaftarkan pekerja/buruh pada BPJS Ketenagakerjaan 3. Terdapat disharmonisasi dalam hubungan	Pembinaan : PP/PKB ; LKS Bipartit ; Struktur dan Skala Upah ; kepesertaan Jaminan sosial (BPJS Ketenaga-kerjaan)	Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	Januari - Desember

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
					industrial yang menyebabkan tidak kondusifnya hubungan industrial di masyarakat yang berdampak pada kepercayaan publik/masyarakat secara umum dan khususnya pengusaha dan pekerja/buruh berkaitan dengan pelaksanaan tata kerja yang layak (PP, LKS Bipartit, Struktur dan skala upah, dan BPJS			

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
					Ketenagakerjaan), sehingga akan menimbulkan gejolak di masyarakat, misalnya: unjuk rasa.			
Meningkatnya Kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3 dan lingkungan	Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan	Pemalsuan dokumen pengujian K3 oleh Pihak Penguji Independen (PJK3) dengan mencantumkan nama	12	PJK3 ingin cepat memberikan rekomendasi untuk penerbitan Surat Keterangan Layak Uji K3 di perusahaan tanpa dilakukan	1.Keselamatan tenaga kerja di Perusahaan tersebut tidak terjamin kelayakannya akibat hasil riksa uji yang dilaksanakan belum	Aplikasi SIKATIGA yang menggunakan Barcode rentan untuk disalahgunakan , sehingga membutuhkan kebijakan dan langkah strategis baik dalam penyempurnaan Aplikasi SIKATIGA	Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	Januari - Desember (Setiap Tahun)

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Kerja)		pegawai pengawas ketenagakerjaan dan tanpa diketahui oleh pengawas yang bersangkutan.		verifikasi K3 oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang bersangkutan.	dinyatakan layak/belum diverifikasi oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan spesialis tertentu. - 2. Pemalsuan dokumen negara termasuk kasus Pidana - 3. Pegawai pengawas ketenagakerjaan dirugikan nama baik dan integritasnya.	tersebut dan untuk memitigasi terjadinya pemalsuan dokumen Uji K3 .		

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

1. Sasaran meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja Daerah ditempuh dengan strategi berikut :
   - Meningkatkan Pembinaan dan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) di Daerah (Kab/Kota/Provinsi) melalui Pembinaan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro dan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro di daerah.
2. Sasaran Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja ditempuh dengan strategi sebagai berikut :
   - Meningkatkan Kompetensi, Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja, serta Penguatan Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi di BLK Pemerintah dan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, Koordinasi dan Penguatan Jejaring Kerjasama Pengembangan Pelatihan, serta Harmonisasi Regulasi.
3. Sasaran meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja ditempuh dengan strategi sebagai berikut :
   - Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja dalam dan Luar Negeri serta Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Peningkatan Kualitas Kinerja Lembaga Penempatan Tenaga Kerja, Optimalisasi Fungsi Pengantar Kerja, Pemberdayaan TKI Purna, Penca dan Lansia, Pembinaan Tenaga Kerja Pendamping Tenaga Kerja Asing, dan Penyelenggaraan Model-Model Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja (BKO, BKK, JMF).
4. Sasaran meningkatnya perlindungan tenaga kerja dalam hubungan Industrial dan jaminan sosial ditempuh dengan strategi sebagai berikut :
   - Meningkatkan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif untuk Menciptakan Hubungan Industrial Kondusif dan Harmonis, serta Perlindungan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Peningkatan Koordinasi dalam Penetapan Upah Minimum Provinsi/Kab/Kota/Sektoral Provinsi dan Kab/Kota, Peningkatan Peran Lembaga Kerjasama Bipartit dan Lembaga Kerjasama Tripartit, Mendorong Perusahaan dalam Kepesertaan Jaminan Sosial dan Fasilitas Sarana Kesejahteraan Bagi Tenaga Kerja Baik Diluar Maupun Didalam Hubungan Kerja, dan Pengembangan Data dan

Informasi Hubungan Industrial dalam Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.

5. Sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3) dan lingkungan kerja ditempuh dengan strategi sebagai berikut :
   - Meningkatkan Pengawasan, Pemeriksaan dan Pembinaan Ketenagakerjaan dalam dan Luar Negeri, Penerapan SM-K3 (Sistem Manajemen K3), Pengawasan Standarisasi dan Sertifikasi K3, serta Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Norma Ketenagakerjaan.

5.2 Kebijakan

1. Meningkatkan Pembinaan dan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) di Daerah (Kab/Kota/Provinsi) melalui Pembinaan, Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro dan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro di daerah ditempuh dengan arah kebijakan sebagai berikut :
   - Melakukan penyusunan rencana tenaga kerja daerah dan pembinaanya baik secara Makro dan Mikro
2. Strategi Meningkatkan Kompetensi, Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja serta Penguatan Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi di BLK Pemerintah dan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, Koordinasi dan Penguatan Jejaring Kerjasama Pengembangan Pelatihan, serta Harmonisasi Regulasi ditempuh dengan arah kebijakan sebagai berikut:
   - Meningkatkan kompetensi, produktivitas dan daya saing tenaga kerja secara kontinyu dan komprehensif hingga memperoleh sertifikat kompetensi.
3. Strategi Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja dalam dan Luar Negeri Serta Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Peningkatan Kualitas Kinerja Lembaga Penempatan Tenaga Kerja, Optimalisasi Fungsi Pengantar Kerja, Pemberdayaan TKI Purna, Penca dan Lansia, Pembinaan Tenaga Kerja Pendamping Tenaga Kerja Asing, dan Penyelenggaraan Model-Model Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja (BKO, BKK, JMF) ditempuh dengan arah kebijakan sebagai berikut :
   - Meningkatkan Perlindungan Tenaga Kerja dalam dan Luar Negeri difokuskan pada pra dan pasca penempatan, optimalisasi peran lembaga penempatan tenaga kerja, dan memperluas akses informasi pasar kerja.
   - Meningkatkan Koordinasi dan Integrasi Kerjasama Pelaksanaan Transmigrasi Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Tujuan Transmigrasi
4. Strategi Meningkatkan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif untuk Menciptakan Hubungan Industrial Kondusif dan Harmonis serta

Perlindungan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Peningkatan Koordinasi Dalam Penetapan Upah Minimum Provinsi/Kab/Kota/ Sektoral Provinsi Dan Kab/Kota, Peningkatan Peran Lembaga Kerjasama Bipartit Dan Lembaga Kerjasama Tripartit, Mendorong Perusahaan Dalam Kepesertaan Jaminan Sosial dan Fasilitas Sarana Kesejahteraan Bagi Tenaga Kerja Baik di luar Maupun Didalam Hubungan Kerja, dan Pengembangan Data dan Informasi Hubungan Industrial dalam Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama ditempuh dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- Menjaga dan Meningkatkan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif untuk Menciptakan Hubungan Industrial Kondusif dan Harmonis, serta Penguatan dan Pengelolaan Data dan Informasi Hubungan Industrial dengan fokus penetapan sistem pengupahan yang berkeadilan, pemberdayaan Lembaga Kerjasama Bipartit dan pengesyahan peraturan perusahaan, peningkatan kepersertaan jaminan sosial.

5. Strategi Meningkatkan Pengawasan, Pemeriksaan dan Pembinaan Ketenagakerjaan dalam dan Luar Negeri, Penerapan SM-K3 (Sistem Manajemen K3), Pengawasan Standarisasi dan Sertifikasi K3, serta Meningkatkan Kepatuhan terhadap Norma Ketenagakerjaan ditempuh dengan arah kebijakan sebagai berikut:
   - Meningkatkan Koordinasi Pengawasan, Pemeriksaan dan Pembinaan Ketenagakerjaan Dalam dan Luar Negeri melalui Penerapan SM-K3 (Sistem Manajemen K3), Pengawasan Standarisasi dan Sertifikasi K3, serta Peningkatan Deteksi Dini Potensi Bahaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja, serta Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Norma Ketenagakerjaan dengan dilakukan secara berkesinambungan diprioritas pada perusahaan-perusahaan yang memiliki penyerapan tenaga kerja besar dan diprioritaskan pada perusahaan-perusahaan yang memiliki resiko keselamatan tenaga kerja menengah dan besar.

Selengkapnya relasi dan sinergitas tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
1	Tujuan 1 : Meningkatnya pengurangan pengangguran			
		Sasaran 1.1 : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	Meningkatkan Pembinaan dan kualitas Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) di Daerah (Kab/Kota/Provinsi) melalui Pembinaan, Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro dan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro di daerah.	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro dan Mikro, baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Sasaran1.2: Meningkatnya Kompetensi Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dalam rangka meningkatkan kualitas angkatan kerja dan peningkatan produktivitas melalui transformasi pelatihan dan penempatan tenaga kerja sesuai kebutuhan pengguna tenaga kerja . Meningkatkan Kompetensi, Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja, serta Penguatan Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Melalui Pelaksanaan Pelatihan kerja berdasarkan Klaster Kompetensi di BLK Pemerintah dan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta , serta lembaga pendidikan melalui Koordinasi dan Penguatan Jejaring Kerjasama Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas , Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Kerja .	- Melaksanakan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi Pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi. - melakukan koordinasi lintas lembaga dan kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja. - melakukan survey dan penilaian akrediatasi kepada lembaga pelatihan kerja. - melakukan konsultasi produktivitas kepada perusahaan menengah. melakkukan pengukuran produktivitas tingkat daerah provinsi. - meningkatkan sarana dan prasarana pelatiha kerja - penguatan jejaring kerjasama pelatihan dan peningkatan produktivitas.

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Sasaran 1.3 : Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja dalam dan Luar Negeri serta Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja, Pelayanan Antar Kerja , Pengelolaan Informasi Pasar Kerja , Pelindungan PMI (Pekerja Migran Indonesia) dan pemberdayaan PMI dan atau keluarga pekerja migran, Peningkatan Kualitas Kinerja Lembaga Penempatan Tenaga Kerja, Optimalisasi Fungsi Pengantar Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja melalui Padat Karya Produktif, Pembekalan/Pemberdayaan dan pengembangan kewirausahaan bagi Masyarakat Penganggur termasuk tenaga kerja khusus/Penca dan Lanjut Usia , Pembinaan lanjutan bagi wirausaha baru , fasilitasi bagi wirausaha binaan dlam mengakses pasar , Pembinaan Tenaga Kerja Pendamping Tenaga Kerja Asing, dan Penyelenggaraan Model-Model Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja (BKO, BKK, JMF) Serta melakukan perluasan kesempatan kerja melalui transmigrasi dan pelatihan calon transmigrasi	- Menyiapkan sumber daya pelayanan antar kerja. - penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja. - melaksanakan pelayanan antar kerja (AKL-Antar Kerja Lokal, AKAD-Antar Kerja Antar Daerah, AKAN-Antar Kerja Antar Negara). - meningkat penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri. - pengelolaan informasi pasar kerja, pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online. - perlindungan PMI (pekerja migran Indonesia) dan pemberdayaan PMI & keluarganya. - perluasan kesempatan kerja melalui Padat Karya Produktif, pemberdayaan dan pengembangan kewirausahaan bagi masyarakat penganggur termasuk tenaga kerja khusus/penca/difabel dan Lansia. - pembinaan wirausaha baru dan fasilitasi dalam mengakses pasar. - pembinaan TKA (tenaga kerja asing), penyediaan sumber daya perijinan LPTKS secara terintegrasi. - penyelenggaraan model-model penyebarluasan informasi pasar kerja. - melakukan perluasan kesempatan kerja melalui transmigrasi dan pelatihan calon

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				transmigrasi.

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Sasaran 1.4 : Meningkatnya perlindungan tenaga kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial	Meningkatkan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif untuk Menciptakan Hubungan Industrial Kondusif dan Harmonis, serta Perlindungan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Peningkatan Koordinasi dalam Penetapan Upah Minimum Provinsi/Kab/Kota/Sektoral Provinsi dan Kab/Kota, Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi , Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja, Pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Keja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi melalui Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi atau Peningkatan Peran Lembaga Kerjasama Bipartit dan Lembaga Kerjasama Tripartit, Mendorong Perusahaan dalam Kepesertaan Jaminan Sosial dan Fasilitas Sarana Kesejahteraan Bagi Tenaga Kerja Baik di luar Maupun di dalam Hubungan Kerja, Penyelenggaraan Veifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha Federasi dan konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi ; dan pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait Hubungan Industrial , Pendaftaran	- pengesahan peraturan perusahaan terkait hubungan industrial - pendaftaran perjanjian kerja bersama terkait hubungan industrial - penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja - pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berdampak pada kepentingan di satu daerah provinsi. - penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi, dan konfederasi serikat pekerja serta non afiliasi. - pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah provinsi - pembinaan pengupahan skala provinsi. - penetapan upah minimum provinsi. - penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK). - pengembangan pelaksanaan jaminam sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial, Penyelenggaraan Pendataan, Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial dan Dan pengembangab hubungan industrial yang adaptif terhadap perkembangan dunia kerja dan menjamin kesejahteraan pekerja yang berkesinambungan .	

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Sasaran 1.5 : Meningkatnya Kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3 dan lingkungan Kerja)	Meningkatkan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan melalui Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di perusahaan melalui Pemeriksaan dan Pembinaan Ketenagakerjaan dalam dan luar negeri, Penarikan Pekerja Anak Untuk dikembalikan ke sekolah, Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di perusahaan melalui penanganan kasus ketenagakerjaan, Penerapan SM-K3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja), Pengawasan Standarisasi dan Sertifikasi K3, Pengujian higiene perusahaan, kesehatan kerja; Pengujian keselamatan dan kesehatan kerja , ergonomi dan psikologi kerja serta Meningkatkan Kepatuhan terhadap peraturan perundangan - undangan Ketenagakerjaan.	- pengawasan pelaksanaan norma kerja di perusahaan - penegakkan hukum ketenagakerjaan diperusahaan - pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan - penarikan pekerja anak untuk dikembalikan di sekolah - penerapan SM-K3 (sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja) - penanganan kasus ketenagakerjaan - pengawasan standarisasi dan sertifikasi K3, pengujian higiene perusahaan, kesehatan kerja - pengujian keselamatan dan kesehatan kerja, ergonomi, dan psikologi kerja
2	Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah			

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Sasaran 2.1 : Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan publik , berupa pelayanan informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Perangkat Daerah melalui survei kepuasan masyarakat secara mandiri (9 unsur) dan atau menyediakan berbagai pelayanan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian berbasis elektronik / digital .	- meningkatkan pelayanan publik melalui pelayanan informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, serta melakukan survey kepuasan masyarakat, dan menyediakan berbagai pelayanan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian berbasis elektronik/digital dengan adanya PPID (pejabat pengelola informasi dan dokumentasi)
		Sasaran 2.2 : Meningkatnya kualitas pengelolaan resiko perangkat daerah	Meningkatkan kualitas penilaian mandiri terhadap pengelolaan resiko melalui Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berbasis resiko terintegrasi di perangkat daerah .	- melakukan penilaian mandiri SPIP berbasis resiko terintegrasi di perangkat daerah dengan menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP Manajemen Resiko yang telah terintegrasi dengan perencanaan

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu tiga tahun (2024-2026), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Pada rencana strategis tahun 2024 – 2026 ini disusun rencana program dan kegiatan,sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Renstra Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah mendasarkan hasil pohon kerja dan cascading yang telah disusun. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah yang akan dilaksanakan mencakup program pokok :

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
3. Program Penempatan Tenaga Kerja
4. Program Hubungan Industrial
5. Program Pengawasan Ketenagakerjaan
6. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi.
7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ;

Untuk mendukung program pokok tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar akan dilaksanakan program penunjang yaitu :

Alur tujuan, sasaran, Indikator Kinerja Kelompok Sasaran, Strategi, Kebijakan, Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 selengkapnya tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Meningkatkan Penurangan Pengangguran									24.972.631.000		14.094.170.000		17.784.881.000		17.784.881.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Persentase pengangguran yang ditempatkan	%	28,6		28,64		28,7		28,7		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	Meningkatnya Kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaa (Norma Kerja, Norma K3 dan lingkungan Kerja) *	n							4.219.805.000		3.076.629.000		3.369.805.000		3.369.805.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan *	%	81,53	4.219.805.000	80,96	3.076.629.000	80,38	3.369.805.000	80,38	10.666.239.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN **						4.219.805.000		3.076.629.000		3.369.805.000		3.369.805.000		
						Persentase peningkatan perusahaan memiliki kategori baik dalam	%	26,4	2.169.805.000	26,67	1.122.329.000	26,94	1.369.805.000	26,94	4.661.939.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						penerapan K3 **											
		2.07.06.1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan ***					2.169.805.000		1.122.329.000		1.369.805.000		1.369.805.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan ***	Laporan	60,16	2.169.805.000	60	1.122.329.000	65	1.369.805.000	185,16	4.661.939.000		Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Pekalongan, Kab. Pati, Kab. Banyumas, Kab. Magelang dst
		2.07.06.1.01.03			Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan ****				2.169.805.000		1.122.329.000		1.369.805.000		1.369.805.000		
						Jumlah perusahaan yang menerapkan K3 ****	Unit	128	2.169.805.000	135	1.122.329.000	143	1.369.805.000	143	4.661.939.000		Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Pekalongan, Kab. Pati, Kab.

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
																	Banyumas, Kab. Magelang dst
						Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan **	%	89,58	2.050.000.000	89,59	1.954.300.000	89,6	2.000.000.000	89,6	6.004.300.000	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan WASNAKER	
		2.07.06.1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan ***					2.050.000.000		1.954.300.000		2.000.000.000		2.000.000.000		
						Persentase penanganan kasus ketenagakerjaan ***	%	55,17	316.343.000	56,43	334.485.000	56,95	316.343.000	56,95	967.171.000	SEKSI PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN	
		2.07.06.1.01.02			Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan ****				316.343.000		334.485.000		316.343.000		316.343.000		
						Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan ****	Kasus	130	316.343.000	156	334.485.000	170	316.343.000	170	967.171.000	SEKSI PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN	Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Pekalongan, Kab. Pati, Kab. Banyumas, Kab. Magelan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
																	g dst
						Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Keselamatan dan Kesehatan kerja ***	%	29,41	422.074.000	30	387.141.000	30,53	422.074.000	30,53	1.231.289.000	SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	
		2.07.06.1.01.03			Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan ****				422.074.000		387.141.000		422.074.000		422.074.000		
						Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3 ****	Unit	155	422.074.000	160	387.141.000	165	422.074.000	165	1.231.289.000	SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Pekalongan, Kab. Pati, Kab. Banyumas, Kab. Magelang dst
						Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan	%	62,08	1.311.583.000	62,21	1.232.674.000	62,32	1.261.583.000	62,32	3.805.840.000	SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	
		2.07.06.1.01.01			Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan ****				1.311.583.000		1.232.674.000		1.261.583.000		1.261.583.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						Jumlah pekerja anak yg dikembalikan ke dunia pendidikan ****	Orang	30	313.490.000	30	313.490.000	30	313.490.000	30	940.470.000	SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	Kab. Banjarnegara
						Jumlah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan pemeriksaan ****	Unit	30	60.423.000	30	60.423.000	30	60.423.000	30	181.269.000	SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	Kab Cilacapt, Kab Banyumas, Kab. Purbalingga
						Jumlah perusahaan yang dilakukan pemeriksaan norma kerja	Unit	650	720.000.000	700	644.203.000	750	670.000.000	750	2.034.203.000	SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Pekalongan, Kab. Pati, Kab. Banyumas, Kab. Magelang dst
						Jumlah Perusahaan yang menerapkan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di tempat kerja ****	Unit	30	46.470.000	30	46.470.000	30	46.470.000	30	139.410.000	SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Pekalongan, Kab. Pati,

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
																	Kab. Banyumas, Kab. Magelang dst
						Jumlah Perusahaan yang menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang dilakukan pemeriksaan ****	Unit	40	60.200.000	40	60.200.000	40	60.200.000	40	180.600.000	SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Pekalongan, Kab. Pati, Kab. Banyumas, Kab. Magelang dst
						Jumlah peserta yang mengikuti FGD optimalisasi pengawasan norma ketenagakerjaan ****	Orang	160	50.000.000	160	57.888.000	160	50.000.000	160	157.888.000	SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	35 Kab/Kota Prov. Jateng
						Jumlah peserta yang mengikuti rakor pengawasan ketenagakerjaan ****	Orang	50	61.000.000	50	50.000.000	50	61.000.000	50	172.000.000	SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	35 Kab/Kota Prov. Jateng
	Meningkatnya Kompetensi Dan Produktivitas Tenaga								13.277.750.000		5.126.410.000		7.500.000.000		7.500.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Kerja *																
						Persentase peningkatan tenaga kerja yang kompeten *	%	9,24	10.620.694.000	10,15	3.394.717.000	10,53	5.793.944.000	10,53	19.809.355.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA **						10.620.694.000		3.394.717.000		5.793.944.000		5.793.944.000		
						Persentase kenaikan lembaga pelatihan yang terakreditasi **	%	38,14	1.192.089.000	30,59	992.089.000	31,42	1.092.089.000	31,42	3.276.267.000	Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS	Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Salatiga Kab. Demak Kab. Cilacap Kab. Magelang dst
		2.07.03.1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi					966.976.000		766.976.000		866.976.000		866.976.000		
						Persentase penganggur atau pencari kerja yang dilatih pemagangan dalam dan luar negeri ***	%	30,77	966.976.000	27,69	766.976.000	29,23	866.976.000	29,23	2.600.928.000	SEKSI PELATIHAN DAN PEMAGANGAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		2.07.03.1.01.01			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster				867.341.000		667.341.000		767.341.000		767.341.000		
						Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi ****	Orang	185	867.341.000	190	667.341.000	190	767.341.000	190	2.302.023.000	SEKSI PELATIHAN DAN PEMAGANGAN	
		2.07.03.1.01.02			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja ****				99.635.000		99.635.000		99.635.000		99.635.000		
						Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana dan prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas ****	Unit	10	99.635.000	11	99.635.000	11	99.635.000	11	298.905.000	SEKSI PELATIHAN DAN PEMAGANGAN	
		2.07.03.1.02		Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja ***					225.113.000		225.113.000		225.113.000		225.113.000		
						Persentase LPK yang dilakukan pembinaan kelembagaan dalam penilaian akreditasi lembaga ***	%	29,09	225.113.000	26,67	225.113.000	27,59	225.113.000	27,59	675.339.000	SEKSI STANDARISASI DAN SERTIFIKASI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		2.07.03.1.02.01			Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja				225.113.000		225.113.000		225.113.000		225.113.000		
						Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi ****	Unit	35	225.113.000	35	225.113.000	35	225.113.000	35	675.339.000	SEKSI STANDARISASI DAN SERTIFIKASI	
						Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang industri **	%	2,88	3.914.406.000	3,2	619.525.000	3,49	1.613.406.000	3,49	6.147.337.000	Balai Latihan Kerja Cilacap Kelas A	
		2.07.03.1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi					3.914.406.000		619.525.000		1.613.406.000		1.613.406.000		
						Persentase identifikasi keseluruhan pelatihan dan promosi pelatihan berbasis kompetensi ***	%	100	37.235.000	100	182.290.000	100	37.235.000	100	256.760.000	SEKSI PEMASARAN	
		2.07.03.1.01.01			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster				37.235.000		182.290.000		37.235.000		37.235.000		
						Jumlah animo pendaftar pelatihan berbasis kompetensi ****	Orang	150	0	100	136.599.000	150	0	150	136.599.000	SEKSI PEMASARAN	
						Jumlah dokumen TNA ****	Dokumen	1	37.235.000	1	45.691.000	1	37.235.000	1	120.161.000	SEKSI PEMASARAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi /kesepakatan dan kerjasama dg. BLK	%	20	182.290.000	30	37.235.000	40	182.290.000	40	401.815.000	SEKSI PEMASARAN	
		2.07.03.1.01.02			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja ****				182.290.000		37.235.000		182.290.000		182.290.000		
						Jumlah Kesepakatan/naskah kerjasama dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Unit	2	182.290.000	3	37.235.000	4	182.290.000	4	401.815.000	SEKSI PEMASARAN	
						Persentase penganggur diberikan pelatihan kompetensi di bidang industri ***	%	12,61	694.881.000	10,2	400.000.000	12	393.881.000	12	1.488.762.000	SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.01.01			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster				694.881.000		400.000.000		393.881.000		393.881.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi di Bidang Industri pada Tahun n ****	Orang	308	694.881.000	339	400.000.000	373	393.881.000	373	1.488.762.000	SEKSI PELATIHAN	
						Persentase penganggur diberikan pelatihan kompetensi di bidang industri - DBHCHT (Dana Bagi HasilCukai Hasil Tembakau) ***	%	24,94	0	24,49	0	24,8	0	24,8	0	SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.01.01			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster				0		0		0		0		
						Jumlah Tenaga kerja yang mendapat pelatihan basis kompetensi di tahun n (DBHCHT) ****	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKSI PELATIHAN	
						Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja ***	%	100	3.000.000.000	0	0	0	1.000.000.000	100	4.000.000.000	SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.01.03			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja ****				3.000.000.000		0		1.000.000.000		1.000.000.000		
						Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja ****	Unit	1	3.000.000.000	1	0	1	1.000.000.000	1	4.000.000.000	SEKSI PELATIHAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa, bahasa asing, budaya dasar dan pekerja migran **	%	46,9	2.423.385.000	46,98	778.504.000	47,13	1.122.385.000	47,13	4.324.274.000	Balai Latihan Kerja Semarang 1 Kelas A	
		2.07.03.1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi					2.423.385.000		778.504.000		1.122.385.000		1.122.385.000		
						Persentase identifikasi keseluruhan pelatihan dan promosi pelatihan berbasis kompetensi ***	%	33,33	0	33,33	278.546.000	33,33	0	33,33	278.546.000	SEKSI PEMASARAN	
		2.07.03.1.01.01			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster				0		278.546.000		0		0		
						Jumlah animo pendaftar pelatihan berbasis kompetensi ****	Orang	0	0	0	164.768.000	0	0	0	164.768.000	SEKSI PEMASARAN	
						Jumlah dokumen TNA ****	Dokumen	0	0	0	113.778.000	0	0	0	113.778.000	SEKSI PEMASARAN	
						Persentase jumlah calon tenaga kerja atau calon tenaga kerja Migran Indonesia (CPMI/CTKI/Calon magang dalam & luar negeri) yang diberikan pelatihan ***	%	1,33	1.535.649.000	0,67	476.000.000	1,33	734.649.000	1,33	2.746.298.000	SEKSI PELATIHAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		2.07.03.1.01.01			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster				1.535.649.000		476.000.000		734.649.000		734.649.000		
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n ****	Orang	144	1.535.649.000	192	476.000.000	256	734.649.000	256	2.746.298.000	SEKSI PELATIHAN	
						Persentase jumlah calon tenaga kerja yang diberikan pelatihan - DBHCHT ***	%	2,4	0	1,8	0	1,801	0	1,801	0	SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.01.01			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster				0		0		0		0		
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n (DBHCHT/Cukai) - (DBHCHT)	Orang	160	0	160	0	176	0	176	0	SEKSI PELATIHAN	
						Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi /kesepakatan dan kerjasama dg. BLK Semarang 1 ***	%	25	137.736.000	20	23.958.000	33,33	137.736.000	33,33	299.430.000	SEKSI PEMASARAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		2.07.03.1.01.02			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja ****				137.736.000		23.958.000		137.736.000		137.736.000		
						Jumlah Kesepakatan/naskah kerjasama dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n ****	Dokumen	0	137.736.000	0	23.958.000	0	137.736.000	0	299.430.000	SEKSI PEMASARAN	
						Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja ***	%	100	750.000.000	100	0	100	250.000.000	100	1.000.000.000	SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.01.03			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja ****				750.000.000		0		250.000.000		250.000.000		
						Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja ****	Unit	2	750.000.000	0	0	0	250.000.000	2	1.000.000.000	SEKSI PELATIHAN	
						Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang pertanian **	%	9,45	2.308.230.000	9,5	213.349.000	9,55	1.307.230.000	9,55	3.828.809.000	Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Kelas A	
		2.07.03.1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi					2.308.230.000		213.349.000		1.307.230.000		1.307.230.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						Persentase identifikasi keseluruhan pelatihan dan promosi pelatihan berbasis kompetensi ***	%	66,67	78.413.000	66,67	78.413.000	66,67	78.413.000	66,67	235.239.000	SEKSI PEMASARAN	
		2.07.03.1.01.01			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster				78.413.000		78.413.000		78.413.000		78.413.000		
						Jumlah animo pendaftar pelatihan berbasis kompetensi ****	Orang	528	42.851.000	581	42.851.000	639	42.851.000	639	128.553.000	SEKSI PEMASARAN	
						Jumlah dokumen TNA (Training NeedAsesment) ****	Dokumen	1	35.562.000	1	35.562.000	1	35.562.000	1	106.686.000	SEKSI PEMASARAN	
						Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi /kesepakatan dan kerjasama dg. BPK	%	40	22.337.000	40	22.337.000	40	22.337.000	40	67.011.000	SEKSI PEMASARAN	
		2.07.03.1.01.02			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja ****				22.337.000		22.337.000		22.337.000		22.337.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						Jumlah Kesepakatan/naskah kerjasama dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n ****	Dokumen	0	22.337.000	0	22.337.000	0	22.337.000	0	67.011.000	SEKSI PEMASARAN	
						Persentase penganggur diberikan pelatihan di bidang Pertanian - DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai HasilTembakau) ***	%	6,4	0	4,8	0	6,4	0	6,4	0	SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.01.01			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster				0		0		0		0		
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi di Bidang Pertanian pada Tahun n	Orang	480	0	480	0	480	0	480	0	SEKSI PELATIHAN	
						Persentase penganggur diberikan pelatihan kerja di bidang Pertanian ***	%	64	707.480.000	64	112.599.000	64	206.480.000	64	1.026.559.000	SEKSI PELATIHAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		2.07.03.1.01.01			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster				707.480.000		112.599.000		206.480.000		206.480.000		
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi di Bidang Pertanian pada Tahun n ****	Orang	96	707.480.000	96	112.599.000	96	206.480.000	96	1.026.559.000	SEKSI PELATIHAN	
						Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja ***	%	100	1.500.000.000	100	0	100	1.000.000.000	100	2.500.000.000	SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.01.03			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja ****				1.500.000.000		0		1.000.000.000		1.000.000.000		
						Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja ****	Unit	4	1.500.000.000	5	0	6	1.000.000.000	6	2.500.000.000	SEKSI PELATIHAN	
						Persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi **	%	2,3	782.584.000	2,35	791.250.000	2,4	658.834.000	2,4	2.232.668.000	Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS	
		2.07.03.1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi					782.584.000		791.250.000		658.834.000		658.834.000		
						Persentase penganggur yang ditingkatkan dan disertifikasi kompetensinya ***	%	75	782.584.000	50	791.250.000	66,67	658.834.000	66,67	2.232.668.000	SEKSI STANDARISASI DAN SERTIFIKASI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		2.07.03.1.01.01			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster				782.584.000		791.250.000		658.834.000		658.834.000		
						Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi yang tersertifikasi ****	Orang	225	782.584.000	225	791.250.000	225	658.834.000	225	2.232.668.000	SEKSI STANDARISASI DAN SERTIFIKASI	
						Tingkat produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah *	Juta Rupiah	56	2.657.056.000	56,5	1.731.693.000	57	1.706.056.000	57	6.094.805.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA **						2.657.056.000		1.731.693.000		1.706.056.000		1.706.056.000		
						Persentase kenaikan perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas **	%	4,4	649.077.000	4,6	649.077.000	4,68	649.077.000	4,68	1.947.231.000	Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS	Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Salatiga Kab. Demak Kab. Cilacap Kab. Magelang dst
		2.07.03.1.03		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan					649.077.000		649.077.000		649.077.000		649.077.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Menengah ***													
						Persentase lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas	%	21	649.077.000	20,67	649.077.000	21	649.077.000	21	1.947.231.000	SEKSI PRODUKTIVITAS	
		2.07.03.1.03.01			Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah ****				649.077.000		649.077.000		649.077.000		649.077.000		
						Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi / Peningkatan Produktivitas ****	Unit	35	649.077.000	35	649.077.000	35	649.077.000	35	1.947.231.000	SEKSI PRODUKTIVITAS	
						Persentase kenaikan tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas dan/atau	%	13,13	2.007.979.000	13,22	1.082.616.000	13,3	1.056.979.000	13,3	4.147.574.000	Balai Latihan Kerja Semarang 2 Kelas A	
		2.07.03.1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi					2.007.979.000		739.036.000		1.056.979.000		1.056.979.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						Jumlah lembaga (penyedia dan pengguna tenaga kerja) yang telah melakukan koordinasi / kesepakatan dan kerjasama dengan BLK dibagi Jumlah kebutuhan lembaga (penyedia dan pengguna tenaga) seluruhnya yang harus dilakukan kesepakatan /koordinasi dan kerjasama pada program pelatihan yang dilaksanakan di BLK berdasarkan hasil identifikasi pelatihan / TNA	Unit	19	423.098.000	19	369.518.000	19	423.098.000	19	1.215.714.000		
		2.07.03.1.01.02			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja ****				423.098.000		369.518.000		423.098.000		423.098.000		
						Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada	Unit	0	423.098.000	0	369.518.000	0	423.098.000	0	1.215.714.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						Tahun n ****											
						Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah,swasta dan pendidikan diberikan pelatihan kewirausahaan (DBHCHT) ***	%	71	0	71	0	71	0	71	0	SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.01.01			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster				0		0		0		0		
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n - (DBHCHT) ****	Orang	725	0	750	0	750	0	750	0	SEKSI PELATIHAN	
						Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah,swasta dan pendidikan dilakukan identifikasi pelatihan dan pemasaran peningkatan produktivitas atau kewirausahaan	%	4,77	634.881.000	4,77	369.518.000	4,77	383.881.000	4,77	1.388.280.000	SEKSI PEMASARAN	
		2.07.03.1.01.01			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan				634.881.000		369.518.000		383.881.000		383.881.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster												
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n ****	Orang	600	634.881.000	600	369.518.000	600	383.881.000	600	1.388.280.000	SEKSI PEMASARAN	
						Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja ***	%	100	950.000.000	100	0	100	250.000.000	100	1.200.000.000	SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.01.03			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja ****				950.000.000		0		250.000.000		250.000.000		
						Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja ****	Unit	8	950.000.000	9	0	10	250.000.000	10	1.200.000.000	SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.03		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah ***					0		334.080.000		0		0		
						Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah,swasta dan pendidikan diberikan pelatihan peningkatan produktivitas atau	%	0	0	0	334.080.000	0	0	0	334.080.000	SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.03.01			Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah ****				0		334.080.000		0		0		
						Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan	Unit	10	0	10	334.080.000	10	0	10	334.080.000	SEKSI PELATIHAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						Produktivitas ****											
		2.07.03.1.04		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi ***					0		9.500.000		0		0		
						Persentase pengukuran produktivitas tenaga kerja di perusahaan ***	%	0	0	0	9.500.000	0	0	0	9.500.000	SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.04.01			Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja ****				0		9.500.000		0		0		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah ****	Dokumen	2	0	2	9.500.000	2	0	2	9.500.000	SEKSI PELATIHAN	
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja								300.000.000		300.000.000		490.000.000		490.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja daerah *	%	62,85	300.000.000	68,57	300.000.000	74,28	490.000.000	74,28	1.090.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA **						300.000.000		300.000.000		490.000.000		490.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja **	%	62,85	300.000.000	68,57	300.000.000	74,28	490.000.000	74,28	1.090.000.000	SEKRETARIAT	
		2.07.02.1.01		Penyusunan Rencana Tenaga (RTK) ***	Kerja				300.000.000		300.000.000		490.000.000		490.000.000		
						Persentase kabupaten/kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Yang Dilakukan Pembinaan ***	%	28,57	300.000.000	31,43	300.000.000	34,29	490.000.000	34,29	1.090.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	Kab Karanganya, Kota Surakarta, Kota Kebumen Kab. Purworejo Kab. Tegal Kab. Pekalongan dst
		2.07.02.1.01.01			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro ****				170.000.000		170.000.000		250.000.000		250.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan tenaga kerja daerah provinsi ****	Dokumen	1	65.000.000	1	65.000.000	1	120.000.000	3	250.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
						Jumlah dokumen perencanaan tenaga kerja daerah provinsi ****	Dokumen	1	65.000.000	1	65.000.000	1	120.000.000	3	250.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
						Jumlah kab/kota yang di bina dalam penyusunan Rencana Kerja (RTK) Makro ****	Kabupaten/Kota	20	105.000.000	20	105.000.000	20	130.000.000	60	340.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						Jumlah kab/kota yang di bina dalam penyusunan Rencana Kerja (RTK) Makro ****	Kabupaten /Kota	20	105.000.000	20	105.000.000	20	130.000.000	60	340.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		2.07.02.1.01.02			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro ****				130.000.000		130.000.000		240.000.000		240.000.000		
						Jumlah kab/kota yang dibina dalam penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Mikro ****	Kabupaten /Kota	20	55.000.000	20	55.000.000	20	120.000.000	60	230.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
						Jumlah kab/kota yang dibina dalam penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Mikro ****	Kabupaten /Kota	20	55.000.000	20	55.000.000	20	120.000.000	60	230.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
						Jumlah perusahaan yang mengikuti bimtek penyusunan rencana tenaga kerja (RTK) Mikro ****	Unit	20	75.000.000	20	75.000.000	20	120.000.000	60	270.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
						Jumlah perusahaan yang mengikuti bimtek penyusunan rencana tenaga kerja (RTK) Mikro ****	Unit	20	75.000.000	20	75.000.000	20	120.000.000	60	270.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
	Meningkatnya penempatan tena kerja dan perluasan kesempatan kerja *	ga							4.776.000.000		3.242.979.000		4.076.000.000		4.076.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						Persentase tenaga kerja yang ditempatkan *	%	71,04	4.776.000.000	71,06	3.242.979.000	71,08	4.076.000.000	71,08	12.094.979.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA **						4.480.000.000		2.946.979.000		3.780.000.000		3.780.000.000		
						Persentase peningkatan pencari kerja yang ditempatkan disektor formal **	%	71,03	210.000.000	71,05	210.000.000	71,07	210.000.000	71,07	630.000.000	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi PENTA	35 Kab/Kota Prov. Jateng
		2.07.04.1.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja ***					210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000		
						Persentase penempatan tenaga kerja melalui mekanisme layanan antar kerja : Antar Kerja Lokal (AKL) ; Antar Kerja Antar Daerah (AKAD),Antar Kerja Antar Negara	%	19,37	210.000.000	19,41	210.000.000	19,5	210.000.000	19,5	630.000.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
		2.07.04.1.03.02			Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online ****				210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000		
						Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja ****	Orang	500	210.000.000	500	210.000.000	500	210.000.000	500	630.000.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
						Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru disektor Informal **	%	68,1	4.270.000.000	68,3	2.736.979.000	68,5	3.570.000.000	68,5	10.576.979.000	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi PENTA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		2.07.04.1.01		Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota ***					3.980.875.000		2.447.854.000		3.280.875.000		3.280.875.000		
						Persentase penganggur diberikan pelayanan antar kerja Lintas Daerah Kab/Kota ***	%	60	1.419.042.000	57,14	1.419.042.000	58,94	1.419.042.000	58,94	4.257.126.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
		2.07.04.1.01.01			Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja ****				85.000.000		85.000.000		85.000.000		85.000.000		
						Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya ****	Orang	50	85.000.000	250	85.000.000	250	85.000.000	250	255.000.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
		2.07.04.1.01.02			Pelayanan Antar Kerja ****				1.197.453.000		1.197.453.000		1.197.453.000		1.197.453.000		
						Jumlah masyarakat memperoleh informasi peluang, mekanisme dan prosedur kerja ****	Orang	1150	1.099.170.000	1150	1.099.170.000	1150	1.099.170.000	1150	3.297.510.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
						Jumlah perusahaan dilakukan Job Canvassing / Monitoring Penempatan Tenaga Kerja ****	Unit	10	67.500.000	15	67.500.000	15	67.500.000	15	202.500.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
						Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD ****	Orang	75	30.783.000	80	30.783.000	80	30.783.000	80	92.349.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		2.07.04.1.01.03			Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja ****				61.589.000		61.589.000		61.589.000		61.589.000		
						Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan ****	Orang	100	61.589.000	100	61.589.000	100	61.589.000	100	184.767.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
		2.07.04.1.01.04			Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)				75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		
						Jumlah stakeholder yang terkoordinasi dalam penempatan tenaga kerja ****	Unit	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	225.000.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
						Persentase penganggur diberikan pemberdayaan dan atau perluasan kesempatan kerja disektor informal	%	51,85	2.561.833.000	47,5	1.028.812.000	50	1.861.833.000	50	5.452.478.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
		2.07.04.1.01.05			Perluasan Kesempatan Kerja ****				2.561.833.000		1.028.812.000		1.861.833.000		1.861.833.000		
						Jumlah masyarakat berpartisipasi dalam pengurangan pengangguran melalui kegiatan Padat Karya ****	Orang	200	1.402.951.000	150	208.222.000	150	702.951.000	150	2.314.124.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
						Jumlah petugas lapangan/ pendamping wirausaha mengikuti pemanduan ****	Orang	35	36.118.000	35	46.618.000	35	36.118.000	35	118.854.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja ****	Orang	400	1.092.100.000	600	728.093.000	600	1.092.100.000	600	2.912.293.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
						Jumlah wirausaha baru binaan mengikuti pembinaan lanjutan/ upgrading/ short course ****	Orang	10	30.664.000	50	45.879.000	50	30.664.000	50	107.207.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
		2.07.04.1.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purn Penempatan) di Daerah Provins ***	a i				259.165.000		259.165.000		259.165.000		259.165.000		
						Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia atau TKI Purna / PMI diberikan perlindungan melalui pemberdayaan perluasan kesempatan kerja di sektor informal ***	%	75	182.995.000	50	182.995.000	60	182.995.000	60	548.985.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
		2.07.04.1.04.04			Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan ****				182.995.000		182.995.000		182.995.000		182.995.000		
						Jumlah Keluarga PMI mengikuti pemberdayaan dan pengembangan kewirausahaan ****	Orang	20	32.636.000	40	32.636.000	40	32.636.000	40	97.908.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan ****	Orang	75	114.032.000	100	114.032.000	100	114.032.000	100	342.096.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
						Jumlah stakeholder PMI Purna yang terkoordinasi dalam upaya pengembangan Desmigratif ****	Unit	80	36.327.000	75	36.327.000	75	36.327.000	75	108.981.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
						Persentase calon pekerja migran indonesia yang mengikuti pembekalan pra pemberangkatan ***	%	2,83	76.170.000	1,51	76.170.000	2,26	76.170.000	2,26	228.510.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
		2.07.04.1.04.01			Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) ****				63.630.000		63.630.000		63.630.000		63.630.000		
						Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya ****	Orang	50	26.860.000	60	26.860.000	60	26.860.000	60	80.580.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
						Jumlah stakeholder yang terkoordinasi dalam pelindungan PMI ****	Unit	50	36.770.000	100	36.770.000	100	36.770.000	100	110.310.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
		2.07.04.1.04.03			Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran ****				12.540.000		12.540.000		12.540.000		12.540.000		
						Jumlah Layanan Terpadu Penempatan PMI yang terkoordinasi ****	Unit	9	12.540.000	10	12.540.000	10	12.540.000	10	37.620.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		2.07.04.1.05		Pengesahan RPTKA Perpanjan yang tidak mengandung Peruba Jabatan, Jumlah TKA, dan Loka Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ***	gan han si				29.960.000		29.960.000		29.960.000		29.960.000		
						Persentase pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung perubahan Jabatan, jumlah TKA dan Lokasi pada perusahaan pengguna TKA (Tenaga Kerja Asing) ***	%	100	29.960.000	100	29.960.000	100	29.960.000	100	89.880.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
		2.07.04.1.05.01			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				29.960.000		29.960.000		29.960.000		29.960.000		
						Jumlah perusahaan pengguna TKA terverifikasi dan layanan penggunaan TKA ****	Dokumen	15	3.000.000	15	3.000.000	15	3.000.000	15	9.000.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
						Jumlah Stakeholder menerima informasi kebijakan pengendalian dan penggunaan TKA ****	Unit	60	26.960.000	60	26.960.000	60	26.960.000	60	80.880.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI **						296.000.000		296.000.000		296.000.000		296.000.000		
						Persentase kenaikan calon transmigran dilatih bidang	%	3,61	76.000.000	3,71	76.000.000	3,81	76.000.000	3,81	228.000.000	Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Kelas A	Kab. Purworejo, Kab. Magellang, Banjarnegara dst
		3.32.03.1.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi ***					76.000.000		76.000.000		76.000.000		76.000.000		
						Persentase calon transmigran yang diberikan pelatihan ***	%	80	76.000.000	80	76.000.000	80	76.000.000	80	228.000.000	SEKSI PELATIHAN	
		3.32.03.1.01.06			Pelatihan Transmigrasi ****				76.000.000		76.000.000		76.000.000		76.000.000		
						Jumlah calon transmigran yang mendapatkan pelatihan dibidang pertanian ****	Orang	40	76.000.000	45	76.000.000	50	76.000.000	50	228.000.000	SEKSI PELATIHAN	
						Persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang di fasilitasi **	%	3,61	220.000.000	3,71	220.000.000	3,81	220.000.000	3,81	660.000.000	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi PENTA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		3.32.03.1.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi ***					220.000.000		220.000.000		220.000.000		220.000.000		
						Persentase calon transmigran dari kab/kota yang difasilitasi ***	%	10	220.000.000	8,57	220.000.000	11,43	220.000.000	11,43	660.000.000	SEKSI TRANSMIGRASI	35 Kab/Kota Prov. Jateng
		3.32.03.1.01.01			Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				220.000.000		220.000.000		220.000.000		220.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi ****	Laporan	20	220.000.000	20	220.000.000	20	220.000.000	20	660.000.000	SEKSI TRANSMIGRASI	
	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja, hubungan								2.399.076.000		2.348.152.000		2.349.076.000		2.349.076.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	industrial dan jaminan sosial																
						Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS	%	91,07	2.399.076.000	91,58	2.348.152.000	92,09	2.349.076.000	92,09	7.096.304.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL **						2.399.076.000		2.348.152.000		2.349.076.000		2.349.076.000		
						Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS	%	98	343.609.000	98,2	343.609.000	98,4	343.609.000	98,4	1.030.827.000	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial HI JAMSOS	
		2.07.05.1.01		Pengesahan Peraturan Perusah dan Pendaftaran Perjanjian Kerj Bersama untuk yang Mempunya Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota ***	aan a i				343.609.000		343.609.000		343.609.000		343.609.000		
						Persentase perusahaan yang telah memiliki PP dan PKB ***	%	26,87	343.609.000	26,97	343.609.000	27,08	343.609.000	27,08	1.030.827.000	SEKSI KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		2.07.05.1.01.01			Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial ****				133.794.000		133.794.000		133.794.000		133.794.000		
						Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online ****	Unit	140	133.794.000	140	133.794.000	140	133.794.000	140	401.382.000	SEKSI KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	35 Kab/Kota Prov. Jateng
		2.07.05.1.01.02			Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial ****				35.606.000		35.606.000		35.606.000		35.606.000		
						Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online ****	Unit	170	35.606.000	170	35.606.000	170	35.606.000	170	106.818.000	SEKSI KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	35 Kab/Kota Prov. Jateng
		2.07.05.1.01.03			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja ****				174.209.000		174.209.000		174.209.000		174.209.000		
						Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek ****	Laporan	70	174.209.000	70	174.209.000	70	174.209.000	70	522.627.000	SEKSI KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						Persentase peningkatan jumlah LKS Bipartit yang terbentuk **	%	49,75	1.057.701.000	49,77	1.052.976.000	49,8	1.007.701.000	49,8	3.118.378.000	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial HI JAMSOS	
		2.07.05.1.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah					1.057.701.000		1.052.976.000		1.007.701.000		1.007.701.000		
						Persentase Peningkatan Jumlah LKS Bipartit yang terbentuk ***	%	49,74	610.722.000	49,79	605.997.000	49,81	560.722.000	49,81	1.777.441.000	SEKSI SYARAT KERJA DAN JAMINAN SOSIAL	
		2.07.05.1.02.01			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi				291.997.000		241.997.000		241.997.000		241.997.000		
						Jumlah LKS yang terbentuk untuk mencegah perselisihan hubungan industrial ****	Unit	20	291.997.000	20	241.997.000	20	241.997.000	20	775.991.000	SEKSI SYARAT KERJA DAN JAMINAN SOSIAL	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		2.07.05.1.02.03			Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh				45.275.000		90.550.000		45.275.000		45.275.000		
						Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang DiverifikasI ****	Unit	2000	45.275.000	2000	90.550.000	2000	45.275.000	2000	181.100.000	SEKSI SYARAT KERJA DAN JAMINAN SOSIAL	
		2.07.05.1.02.04			Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah				273.450.000		273.450.000		273.450.000		273.450.000		
						Jumlah LKS Tripartit yang Dibina ****	Unit	1	273.450.000	1	273.450.000	1	273.450.000	1	820.350.000	SEKSI SYARAT KERJA DAN JAMINAN SOSIAL	
						Persentase perushaan yang telah dibina pembutan LKS Bipratit dalam penyusunan sistem pengupahan skala provinsi ***	%	80	446.979.000	80	446.979.000	80	446.979.000	80	1.340.937.000	SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA	
		2.07.05.1.02.05			Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi ****				446.979.000		446.979.000		446.979.000		446.979.000		
						Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi ****	Unit	290	446.979.000	290	446.979.000	290	446.979.000	290	1.340.937.000	SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial **	%	96,15	515.543.000	96,69	515.543.000	97,7	515.543.000	97,7	1.546.629.000		
		2.07.05.1.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah					515.543.000		515.543.000		515.543.000		515.543.000		
						Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan oleh Mediator hubungan Industrial sesuai ketentuan ***	%	96,15	193.322.000	96,69	193.322.000	97,7	193.322.000	97,7	579.966.000		
		2.07.05.1.02.02			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi				193.322.000		193.322.000		193.322.000		193.322.000		
						Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan ****	Kasus	125	193.322.000	126	193.322.000	127	193.322.000	127	579.966.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						Prosentase perusahaan dengan kategori rawan / setengah rawan	%	36,7	322.221.000	36	322.221.000	35,5	322.221.000	35,5	966.663.000		
		2.07.05.1.02.01			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi				322.221.000		322.221.000		322.221.000		322.221.000		
						Jumlah perselisihan yang dicegah ****	Kasus	222	322.221.000	218	322.221.000	214	322.221.000	214	966.663.000		
						Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah **	%	44,27	482.223.000	45,54	436.024.000	46,81	482.223.000	46,81	1.400.470.000	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial HI JAMSOS	
		2.07.05.1.03		Penetapan Upah Minimum Prov (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Up Minimum Sektoral Kabupaten/K (UMSK) ***	insi ah ota				482.223.000		436.024.000		482.223.000		482.223.000		
						Persentase pembinaan sistem pengupahan pada kab/Kota ***	%	2,28	482.223.000	2,16	436.024.000	2,28	482.223.000	2,28	1.400.470.000	SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTER	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
																AAN TENAGA KERJA	
		2.07.05.1.03.01			Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) ****				260.627.000		265.352.000		260.627.000		260.627.000		
						Jumlah Penetapan UMP ****	Laporan	1	260.627.000	1	265.352.000	1	260.627.000	1	786.606.000	SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA	
		2.07.05.1.03.03			Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)				50.924.000		0		50.924.000		50.924.000		
						Jumlah penetapan UMK ****	Laporan	1	50.924.000	1	0	1	50.924.000	1	101.848.000	SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA	
		2.07.05.1.03.05			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				170.672.000		170.672.000		170.672.000		170.672.000		
						Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ****	Orang	180	170.672.000	180	170.672.000	180	170.672.000	180	512.016.000	SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA	
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi									97.027.369.000		93.150.520.000		103.800.931.000		103.800.931.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
di perangkat daerah																	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	90		91		92		92		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah *								94.982.830.000		91.505.981.000		101.620.874.000		101.620.874.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Indeks Kepuasan Masyarakat *	Angka	85,1	94.982.830.000	85,2	91.505.981.000	85,25	101.620.874.000	85,25	288.109.685.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI **						94.982.830.000		91.505.981.000		101.620.874.000		101.620.874.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah **	%	100	2.072.401.000	100	1.445.910.000	100	1.585.910.000	100	5.104.221.000	Balai Latihan Kerja Semarang 1 Kelas A	Kota Semarang
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangk Daerah ***	at				45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ***	Dokumen	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	3	135.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ****				45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	45.000.000	12	45.000.000	12	45.000.000	36	135.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daera pada Perangkat Daerah ***	h				0		0		0		0		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ***	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0		
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD ****				0		0		0		0		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0		
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ***					251.935.000		251.935.000		251.935.000		251.935.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ***	%	100	251.935.000	100	251.935.000	100	251.935.000	100	755.805.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan				55.796.000		55.796.000		55.796.000		55.796.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan ****	Paket	1	55.796.000	1	55.796.000	1	55.796.000	3	167.388.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****				0		0		0		0		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	0	1	0	1	0	3	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ****				20.225.000		20.225.000		20.225.000		20.225.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan ****	Paket	1	20.225.000	1	20.225.000	1	20.225.000	3	60.675.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor ****				33.000.000		33.000.000		33.000.000		33.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan ****	Paket	0	33.000.000	0	33.000.000	0	33.000.000	0	99.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.280.000		20.280.000		20.280.000		20.280.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan ****	Paket	1	20.280.000	1	20.280.000	1	20.280.000	3	60.840.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ****				0		0		0		0		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan ****	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material ****				32.634.000		32.634.000		32.634.000		32.634.000		
						Jumlah paket bahan/material kantor yang disediakan ****	Paket	1	32.634.000	1	32.634.000	1	32.634.000	3	97.902.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu ****				0		0		0		0		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu ****	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****				90.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah ****	Laporan	1	90.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000	3	270.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ***					41.000.000		41.000.000		41.000.000		41.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ***	Unit	4	41.000.000	6	41.000.000	9	41.000.000	19	123.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.04			Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor ****				0		0		0		0		
						Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang disedikan ****	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel ****				0		0		0		0		
						Jumlah paket mebel yang disediakan ****	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya ****				41.000.000		41.000.000		41.000.000		41.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan ****	Unit	1	41.000.000	1	41.000.000	1	41.000.000	3	123.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya ****				0		0		0		0		
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan ****	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.08			Pengadaan Aset Tak Berwujud ****				0		0		0		0		
						Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan ****	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.09			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****				0		0		0		0		
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan ****	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****				0		0		0		0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan ****	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Ur Pemerintahan Daerah ***	usan				1.020.466.000		953.975.000		1.033.975.000		1.033.975.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ***	Laporan	1	1.020.466.000	1	953.975.000	1	1.033.975.000	3	3.008.416.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat ****				7.660.000		7.660.000		7.660.000		7.660.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat ****	Laporan	1	7.660.000	1	7.660.000	1	7.660.000	3	22.980.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ****				281.400.000		281.400.000		281.400.000		281.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan ****	Laporan	1	281.400.000	1	281.400.000	1	281.400.000	3	844.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				731.406.000		664.915.000		744.915.000		744.915.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	731.406.000	1	664.915.000	1	744.915.000	3	2.141.236.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Dae Penunjang Urusan Pemerintaha Daerah ***	rah n				714.000.000		154.000.000		214.000.000		214.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	4	714.000.000	4	154.000.000	4	214.000.000	12	1.082.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau				24.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	24.000.000	1	24.000.000	1	24.000.000	3	72.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel ****				0		0		0		0		
						Jumlah mebel yang dipelihara ****	Unit	1	0	1	0	1	0	3	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ****				0		0		0		0		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara ****	Unit	1	0	1	0	1	0	3	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya ****				90.000.000		40.000.000		90.000.000		90.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara ****	Unit	0	90.000.000	0	40.000.000	0	90.000.000	0	220.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ****				600.000.000		90.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit	1	600.000.000	1	90.000.000	1	100.000.000	3	790.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah **	%	100	1.361.564.000	100	949.061.000	100	1.110.313.000	100	3.420.938.000		
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangk Daerah ***	at				34.936.000		31.200.000		34.936.000		34.936.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ***	Dokumen	12	34.936.000	12	31.200.000	12	34.936.000	36	101.072.000		
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ****				34.936.000		31.200.000		34.936.000		34.936.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	34.936.000	1	31.200.000	1	34.936.000	3	101.072.000		
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daera pada Perangkat Daerah ***	h				9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ***	Dokumen	1	9.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	3	27.000.000		
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD ****				9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	9.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	3	27.000.000		
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ***					218.148.000		218.148.000		218.148.000		218.148.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ***	%	100	218.148.000	100	218.148.000	100	218.148.000	100	654.444.000		
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan				10.679.000		10.679.000		10.679.000		10.679.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan ****	Paket	1	10.679.000	1	10.679.000	1	10.679.000	3	32.037.000		
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****				33.397.000		33.397.000		33.397.000		33.397.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	33.397.000	1	33.397.000	1	33.397.000	3	100.191.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ****				16.698.000		16.698.000		16.698.000		16.698.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan ****	Paket	1	16.698.000	1	16.698.000	1	16.698.000	3	50.094.000		
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor ****				15.148.000		15.148.000		15.148.000		15.148.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan ****	Paket	0	15.148.000	0	15.148.000	0	15.148.000	0	45.444.000		
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.029.000		20.029.000		20.029.000		20.029.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan ****	Paket	1	20.029.000	1	20.029.000	1	20.029.000	3	60.087.000		
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ****				0		0		0		0		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan ****	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0		
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material ****				14.797.000		14.797.000		14.797.000		14.797.000		
						Jumlah paket bahan/material kantor yang disediakan ****	Paket	1	14.797.000	1	14.797.000	1	14.797.000	3	44.391.000		
		X.XX.01.1.			Fasilitasi				7.400.000		7.400.00		7.400.000		7.400.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		06.08			Kunjungan Tamu ****						0						
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu ****	Laporan	1	7.400.000	1	7.400.000	1	7.400.000	3	22.200.000		
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah ****	Laporan	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	300.000.000		
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ***					50.000.000		0		0		0		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ***	Unit	1	50.000.000	1	0	1	0	3	50.000.000		
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel ****				0		0		0		0		
						Jumlah paket mebel yang disediakan ****	Unit	3	0	5	0	7	0	15	0		
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya ****				0		0		0		0		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan ****	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0		
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya ****				0		0		0		0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan ****	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0		
		X.XX.01.1.07.08			Pengadaan Aset Tak Berwujud ****				50.000.000		0		0		0		
						Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan ****	Unit	1	50.000.000	1	0	1	0	3	50.000.000		
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****				0		0		0		0		
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan ****	Unit	3	0	0	0	0	0	3	0		
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Ur Pemerintahan Daerah ***	usan				655.534.000		506.767.000		654.283.000		654.283.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ***	Laporan	1	655.534.000	1	506.767.000	1	654.283.000	3	1.816.584.000		
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat ****				7.400.000		7.400.000		7.400.000		7.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat ****	Laporan	1	7.400.000	1	7.400.000	1	7.400.000	3	22.200.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ****				84.367.000		84.367.000		84.367.000		84.367.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan ****	Laporan	1	84.367.000	1	84.367.000	1	84.367.000	3	253.101.000		
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				563.767.000		415.000.000		562.516.000		562.516.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	563.767.000	1	415.000.000	1	562.516.000	3	1.541.283.000		
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Dae Penunjang Urusan Pemerintaha Daerah ***	rah n				393.946.000		183.946.000		193.946.000		193.946.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	393.946.000	1	183.946.000	1	193.946.000	3	771.838.000		
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau				45.246.000		45.246.000		45.246.000		45.246.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya ****	Unit	1	45.246.000	1	45.246.000	1	45.246.000	3	135.738.000		
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel ****				0		0		0		0		
						Jumlah mebel yang dipelihara ****	Unit	1	0	1	0	1	0	3	0		
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ****				0		0		0		0		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara ****	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0		
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya ****				9.700.000		9.700.000		9.700.000		9.700.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara ****	Unit	1	9.700.000	1	9.700.000	1	9.700.000	3	29.100.000		
		X.XX.01.1.09.08			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud ****				0		0		0		0		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara ****	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0		
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ****				288.000.000		88.000.000		88.000.000		88.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit	1	288.000.000	1	88.000.000	1	88.000.000	3	464.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****				51.000.000		41.000.000		51.000.000		51.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit	1	51.000.000	1	41.000.000	1	51.000.000	3	143.000.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah **	%	100	1.889.477.000	100	1.147.655.000	100	1.200.549.000	100	4.237.681.000	Balai Latihan Kerja Semarang 2 Kelas A	Kota Semarang
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangk Daerah ***	at				43.200.000		43.200.000		43.200.000		43.200.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ***	Dokumen	1	43.200.000	1	43.200.000	1	43.200.000	3	129.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ****				43.200.000		43.200.000		43.200.000		43.200.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	43.200.000	1	43.200.000	1	43.200.000	3	129.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daera pada	h				0		0		0		0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Perangkat Daerah ***													
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ***	Dokumen	1	0	1	0	1	0	3	0		
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD ****				0		0		0		0		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	0	1	0	1	0	3	0		
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ***					210.390.000		210.390.000		210.390.000		210.390.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ***	%	100	210.390.000	100	210.390.000	100	210.390.000	100	631.170.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan				25.137.000		25.137.000		25.137.000		25.137.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan ****	Paket	1	25.137.000	1	25.137.000	1	25.137.000	3	75.411.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ****				34.846.000		34.846.000		34.846.000		34.846.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga	Paket	1	34.846.000	1	34.846.000	1	34.846.000	3	104.538.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						yang disediakan ****											
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor ****				0		0		0		0		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan ****	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				29.163.000		29.163.000		29.163.000		29.163.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan ****	Paket	1	29.163.000	1	29.163.000	1	29.163.000	3	87.489.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material ****				32.614.000		32.614.000		32.614.000		32.614.000		
						Jumlah paket bahan/material kantor yang disediakan ****	Paket	0	32.614.000	0	32.614.000	0	32.614.000	0	97.842.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu ****				8.630.000		8.630.000		8.630.000		8.630.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu ****	Laporan	1	8.630.000	1	8.630.000	1	8.630.000	3	25.890.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****				80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah ****	Laporan	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	3	240.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ***					57.123.000		57.123.000		57.123.000		57.123.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ***	Unit	21	57.123.000	21	57.123.000	21	57.123.000	63	171.369.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.04			Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor ****				0		0		0		0		
						Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang disedikan ****	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel ****				0		0		0		0		
						Jumlah paket mebel yang disediakan ****	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya ****				0		0		0		0		
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan ****	Unit	1	0	1	0	1	0	3	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.08			Pengadaan Aset Tak Berwujud ****				0		0		0		0		
						Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan ****	Unit	1	0	0	0	0	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				57.123.000		57.123.000		57.123.000		57.123.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan ****	Unit	1	57.123.000	1	57.123.000	1	57.123.000	3	171.369.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Ur Pemerintahan Daerah ***	usan				587.702.000		545.880.000		598.774.000		598.774.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ***	Laporan	27	587.702.000	27	545.880.000	27	598.774.000	81	1.732.356.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat ****				7.660.000		7.660.000		7.660.000		7.660.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat ****	Laporan	1	7.660.000	1	7.660.000	1	7.660.000	3	22.980.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ****				120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan ****	Laporan	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	3	360.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				460.042.000		418.220.000		471.114.000		471.114.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	460.042.000	1	418.220.000	1	471.114.000	3	1.349.376.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Dae Penunjang Urusan Pemerintaha Daerah ***	rah n				991.062.000		291.062.000		291.062.000		291.062.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	10	991.062.000	12	291.062.000	15	291.062.000	37	1.573.186.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	7	50.000.000	7	50.000.000	7	50.000.000	21	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel ****				12.135.000		12.135.000		12.135.000		12.135.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara ****	Unit	2	12.135.000	2	12.135.000	2	12.135.000	6	36.405.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ****				60.182.000		60.182.000		60.182.000		60.182.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara ****	Unit	1	60.182.000	1	60.182.000	1	60.182.000	3	180.546.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya ****				27.550.000		27.550.000		27.550.000		27.550.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara ****	Unit	27	27.550.000	27	27.550.000	27	27.550.000	81	82.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.08			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud ****				0		0		0		0		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara ****	Unit	1	0	1	0	1	0	3	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ****				800.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit	2	800.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	6	1.000.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****				41.195.000		41.195.000		41.195.000		41.195.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit	1	41.195.000	1	41.195.000	1	41.195.000	3	123.585.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah **	%	100	78.701.557.000	100	83.680.493.000	100	90.108.682.000	100	252.490.732.000	SEKRETARIAT	Kota Semarang, Kab, Pati, Kota Pekalongan, Kota

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
																	Surakarta, Kab. Magelang, Kab. Banyumas
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangk Daerah ***	at				63.945.192.000		74.820.025.000		75.445.192.000		75.445.192.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ***	Dokumen	1	63.945.192.000	1	74.820.025.000	1	75.445.192.000	3	214.210.409.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ****				63.000.000.000		73.924.833.000		74.500.000.000		74.500.000.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN ****	Orang	420	63.000.000.000	450	73.924.833.000	480	74.500.000.000	480	211.424.833.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ****				623.880.000		573.880.000		623.880.000		623.880.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	623.880.000	1	573.880.000	1	623.880.000	3	1.821.640.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi				229.152.000		229.152.000		229.152.000		229.152.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah ****	Dokumen	1	229.152.000	1	229.152.000	1	229.152.000	3	687.456.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun				60.530.000		60.530.000		60.530.000		60.530.000		
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	1	60.530.000	1	60.530.000	1	60.530.000	3	181.590.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.08			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran ****				31.630.000		31.630.000		31.630.000		31.630.000		
						Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran ****	Dokumen	1	31.630.000	1	31.630.000	1	31.630.000	3	94.890.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daera pada Perangkat Daerah ***	h				55.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ***	Dokumen	1	55.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000	3	165.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		X.XX.01.1.03.01			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD ****				0		0		0		0		
						Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	0	0	0	0	7	0	7	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD ****				55.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	55.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000	3	165.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.06			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0		0		0		0		
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Laporan	0	0	0	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.04		Administrasi Pendapatan Daera Kewenangan Perangkat Daerah	h ***				54.490.000		54.490.000		54.490.000		54.490.000		
						Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah ***	Laporan	1	54.490.000	1	54.490.000	1	54.490.000	3	163.470.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		X.XX.01.1.04.02			Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah ****				0		0		0		0		
						Jumlah dokumen hasil analisis serta pengembangan retribusi daerah dan kebijakan retribusi daerah ****	Dokumen	0	0	0	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.04.07			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah ****				54.490.000		54.490.000		54.490.000		54.490.000		
						Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah ****	Laporan	1	54.490.000	1	54.490.000	1	54.490.000	3	163.470.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ***					350.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ***	%	100	350.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	550.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya ****				0		0		0		0		
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan ****	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		X.XX.01.1.05.05			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai ****				250.000.000		0		0		0		
						Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai ****	Dokumen	0	250.000.000	0	0	1	0	1	250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi ****				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan ****	Orang	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	30	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.10			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan ****				0		0		0		0		
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan	Orang	20	0	20	0	20	0	60	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.11			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan ****				0		0		0		0		
						Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan ****	Orang	20	0	20	0	20	0	60	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat					2.451.000.000		2.226.000.000		3.109.000.000		3.109.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Daerah ***													
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ***	%	100	2.451.000.000	100	2.226.000.000	100	3.109.000.000	100	7.786.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan				65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan ****	Paket	1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	3	195.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****				0		0		250.000.000		250.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	0	1	0	1	250.000.000	3	250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ****				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan ****	Paket	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor ****				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan ****	Paket	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	3	450.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan ****	Paket	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	3	375.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ****				6.000.000		6.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan ****	Dokumen	1	6.000.000	1	6.000.000	1	30.000.000	3	42.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu ****				140.000.000		140.000.000		250.000.000		250.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu ****	Laporan	1	140.000.000	1	140.000.000	1	250.000.000	3	530.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****				1.200.000.000		1.100.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah ****	Laporan	1	1.200.000.000	1	1.100.000.000	1	1.300.000.000	3	3.600.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD ****				0		0		0		0		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerahJumlah dokumen	Laporan	1	0	1	0	1	0	3	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah ****											
		X.XX.01.1.06.11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD ****				665.000.000		540.000.000		839.000.000		839.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah ****	Dokumen	1	665.000.000	1	540.000.000	1	839.000.000	3	2.044.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ***					1.638.000.000		588.000.000		1.370.000.000		1.370.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ***	Unit	6	1.638.000.000	8	588.000.000	10	1.370.000.000	24	3.596.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ****				0		0		0		0		
						Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang	Unit	2	0	2	0	0	0	4	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel ****				78.000.000		78.000.000		150.000.000		150.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						Jumlah paket mebel yang disediakan ****	Paket	1	78.000.000	1	78.000.000	1	150.000.000	3	306.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya ****				460.000.000		410.000.000		900.000.000		900.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan ****	Unit	3	460.000.000	3	410.000.000	7	900.000.000	13	1.770.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya ****				1.000.000.000		0		0		0		
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan ****	Unit	0	1.000.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.08			Pengadaan Aset Tak Berwujud ****				0		0		0		0		
						Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan ****	Unit	1	0	0	0	0	0	1	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.09			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****				0		0		150.000.000		150.000.000		
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan ****	Unit	0	0	0	0	1	150.000.000	1	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		100.000.000		170.000.000		170.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan ****	Unit	1	100.000.000	1	100.000.000	1	170.000.000	3	370.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Ur Pemerintahan Daerah ***	usan				4.673.025.000		4.382.750.000		6.085.000.000		6.085.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ***	Laporan	1	4.673.025.000	1	4.382.750.000	1	6.085.000.000	3	15.140.775.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat ****				35.000.000		35.000.000		55.000.000		55.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat ****	Laporan	1	35.000.000	1	35.000.000	1	55.000.000	3	125.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ****				1.275.000.000		1.275.000.000		1.700.000.000		1.700.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan ****	Laporan	1	1.275.000.000	1	1.275.000.000	1	1.700.000.000	3	4.250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****				170.000.000		170.000.000		250.000.000		250.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	170.000.000	1	170.000.000	1	250.000.000	3	590.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						****											
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.193.025.000		2.902.750.000		4.080.000.000		4.080.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	0	3.193.025.000	0	2.902.750.000	0	4.080.000.000	0	10.175.775.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Dae Penunjang Urusan Pemerintaha Daerah ***	rah n				5.534.850.000		1.454.228.000		3.890.000.000		3.890.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	5.534.850.000	1	1.454.228.000	1	3.890.000.000	3	10.879.078.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau				915.000.000		415.000.000		505.000.000		505.000.000		
						Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya ****	Unit	5	915.000.000	5	415.000.000	5	505.000.000	15	1.835.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel ****				40.000.000		40.000.000		90.000.000		90.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						Jumlah mebel yang dipelihara ****	Unit	10	40.000.000	10	40.000.000	10	90.000.000	30	170.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ****				384.850.000		384.850.000		470.000.000		470.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara ****	Unit	5	384.850.000	5	384.850.000	5	470.000.000	15	1.239.700.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya ****				20.000.000		20.000.000		60.000.000		60.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara ****	Unit	3	20.000.000	5	20.000.000	7	60.000.000	15	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.08			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud ****				250.000.000		94.378.000		350.000.000		350.000.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara ****	Unit	3	250.000.000	3	94.378.000	3	350.000.000	9	694.378.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ****				3.925.000.000		500.000.000		2.100.000.000		2.100.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit	1	3.925.000.000	1	500.000.000	1	2.100.000.000	3	6.525.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****				0		0		185.000.000		185.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit	0	0	0	0	0	185.000.000	0	185.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****				0		0		130.000.000		130.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit	1	0	1	0	1	130.000.000	3	130.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah **	%	100	3.640.021.000	100	1.553.946.000	100	2.643.946.000	100	7.837.913.000	Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Kelas A	Kab. Banjarnegara
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangk Daerah ***	at				37.445.000		37.445.000		37.445.000		37.445.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ***	Dokumen	1	37.445.000	1	37.445.000	1	37.445.000	3	112.335.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ****				37.445.000		37.445.000		37.445.000		37.445.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas	Dokumen	1	37.445.000	1	37.445.000	1	37.445.000	3	112.335.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						ASN											
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daera pada Perangkat Daerah ***	h				0		0		0		0		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ***	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0		
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD ****				0		0		0		0		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0		
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ***					207.356.000		207.356.000		207.356.000		207.356.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ***	%	100	207.356.000	100	207.356.000	100	207.356.000	100	622.068.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan ****	Paket	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	3	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****				26.500.000		26.500.000		26.500.000		26.500.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	26.500.000	1	26.500.000	1	26.500.000	3	79.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ****				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan ****	Paket	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	3	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor ****				0		0		0		0		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan ****	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan ****	Paket	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	3	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ****				2.856.000		2.856.000		2.856.000		2.856.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan ****	Dokumen	1	2.856.000	1	2.856.000	1	2.856.000	3	8.568.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material ****				0		0		0		0		
						Jumlah paket bahan/material kantor yang disediakan ****	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu ****				8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu ****	Laporan	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	3	24.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****				125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah ****	Laporan	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	3	375.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ***					175.000.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ***	Unit	1	175.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	3	525.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.03			Pengadaan Alat Besar ****				0		0		0		0		
						Jumlah unit alat besar yang disediakan ****	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		X.XX.01.1.07.04			Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor ****				0		0		0		0		
						Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang disedikan ****	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel ****				0		0		0		0		
						Jumlah paket mebel yang disediakan ****	Paket	17	0	17	0	17	0	51	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya ****				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan ****	Unit	28	25.000.000	28	25.000.000	28	25.000.000	84	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan ****	Unit	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	12	450.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Ur Pemerintahan Daerah ***	usan				1.054.325.000		968.250.000		1.058.250.000		1.058.250.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Laporan	1	1.054.325.000	1	968.250.000	1	1.058.250.000	3	3.080.825.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						yang disusun ***											
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat ****				7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat ****	Laporan	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	3	22.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ****				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan ****	Laporan	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	300.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****				0		0		0		0		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan ****	Laporan	1	0	1	0	1	0	3	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				946.825.000		860.750.000		950.750.000		950.750.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	946.825.000	1	860.750.000	1	950.750.000	3	2.758.325.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Dae Penunjang Urusan Pemerintaha Daerah ***	rah n				2.165.895.000		165.895.000		1.165.895.000		1.165.895.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	5	2.165.895.000	8	165.895.000	9	1.165.895.000	22	3.497.685.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau				43.395.000		43.395.000		43.395.000		43.395.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	0	43.395.000	0	43.395.000	0	43.395.000	0	130.185.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.03			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				0		0		0		0		
						Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya ****	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		X.XX.01.1.09.04			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor ****				0		0		0		0		
						Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya ****	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel ****				9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara ****	Unit	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000	3	28.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ****				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara ****	Unit	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	3	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya ****				0		0		0		0		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara ****	Unit	1	0	1	0	1	0	3	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.08			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud ****				0		0		0		0		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara ****	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ****				2.000.000.000		0		1.000.000.000		1.000.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit	1	2.000.000.000	1	0	1	1.000.000.000	3	3.000.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****				88.000.000		88.000.000		88.000.000		88.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit	1	88.000.000	1	88.000.000	1	88.000.000	3	264.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	3	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah **	%	100	6.001.970.000	100	1.619.470.000	100	3.709.470.000	100	11.330.910.000	Balai Latihan Kerja Cilacap Kelas A	Kab. Cilacap
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangk Daerah ***	at				58.800.000		58.800.000		58.800.000		58.800.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah ***	Dokumen	1	58.800.000	1	58.800.000	1	58.800.000	3	176.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ****				58.800.000		58.800.000		58.800.000		58.800.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	58.800.000	1	58.800.000	1	58.800.000	3	176.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daera pada Perangkat Daerah ***	h				0		0		0		0		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ***	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0		
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD ****				0		0		0		0		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0		
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ***					220.770.000		223.975.000		220.770.000		220.770.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ***	%	100	220.770.000	100	223.975.000	100	220.770.000	100	665.515.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan				45.650.000		45.650.000		45.650.000		45.650.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan ****	Paket	1	45.650.000	1	45.650.000	1	45.650.000	3	136.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****				15.262.000		18.467.000		15.262.000		15.262.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	15.262.000	1	18.467.000	1	15.262.000	3	48.991.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ****				11.273.000		11.273.000		11.273.000		11.273.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan ****	Paket	1	11.273.000	1	11.273.000	1	11.273.000	3	33.819.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor ****				18.360.000		18.360.000		18.360.000		18.360.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan ****	Paket	0	18.360.000	0	18.360.000	0	18.360.000	0	55.080.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				3.701.000		3.701.000		3.701.000		3.701.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan ****	Dokumen	1	3.701.000	1	3.701.000	1	3.701.000	3	11.103.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ****				0		0		0		0		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan ****	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material ****				31.458.000		31.458.000		31.458.000		31.458.000		
						Jumlah paket bahan/material kantor yang disediakan ****	Paket	1	31.458.000	1	31.458.000	1	31.458.000	3	94.374.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu ****				6.780.000		6.780.000		6.780.000		6.780.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu ****	Laporan	1	6.780.000	1	6.780.000	1	6.780.000	3	20.340.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****				88.286.000		88.286.000		88.286.000		88.286.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah ****	Laporan	1	88.286.000	1	88.286.000	1	88.286.000	3	264.858.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ***					0		0		0		0		
						Jumlah unit barang milik daerah	Unit	1	0	1	0	1	0	3	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ***											
		X.XX.01.1.07.03			Pengadaan Alat Besar ****				0		0		0		0		
						Jumlah unit alat besar yang disediakan ****	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.04			Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor ****				0		0		0		0		
						Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang disedikan ****	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel ****				0		0		0		0		
						Jumlah paket mebel yang disediakan ****	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya ****				0		0		0		0		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan ****	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya ****				0		0		0		0		
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan ****	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.08			Pengadaan Aset Tak Berwujud ****				0		0		0		0		
						Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan ****	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		X.XX.01.1.07.09			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****				0		0		0		0		
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan ****	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan ****	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Ur Pemerintahan Daerah ***	usan				1.176.800.000		1.085.795.000		1.184.300.000		1.184.300.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ***	Laporan	1	1.176.800.000	1	1.085.795.000	1	1.184.300.000	3	3.446.895.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat ****				5.300.000		5.300.000		5.300.000		5.300.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat ****	Laporan	1	5.300.000	1	5.300.000	1	5.300.000	3	15.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ****				264.000.000		255.495.000		264.000.000		264.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan ****	Laporan	1	264.000.000	1	255.495.000	1	264.000.000	3	783.495.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****				0		0		0		0		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan ****	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				907.500.000		825.000.000		915.000.000		915.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	907.500.000	1	825.000.000	1	915.000.000	3	2.647.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Dae Penunjang Urusan Pemerintaha Daerah ***	rah n				4.545.600.000		250.900.000		2.245.600.000		2.245.600.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	4.545.600.000	1	250.900.000	1	2.245.600.000	3	7.042.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau				59.200.000		59.200.000		59.200.000		59.200.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	59.200.000	1	59.200.000	1	59.200.000	3	177.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.03			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				0		0		0		0		
						Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya ****	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.04			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor ****				0		0		0		0		
						Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya ****	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel ****				0		0		0		0		
						Jumlah mebel yang dipelihara ****	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ****				79.150.000		78.150.000		79.150.000		79.150.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara ****	Unit	1	79.150.000	1	78.150.000	1	79.150.000	3	236.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya ****				77.250.000		77.250.000		77.250.000		77.250.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara ****	Unit	1	77.250.000	1	77.250.000	1	77.250.000	3	231.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.08			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud ****				0		0		0		0		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara ****	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ****				4.300.000.000		0		2.000.000.000		2.000.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit	5	4.300.000.000	5	0	3	2.000.000.000	13	6.300.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****				30.000.000		0		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit	0	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****				0		36.300.000		0		0		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit	1	0	1	36.300.000	1	0	3	36.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah **	%	100	1.315.840.000	100	1.109.446.000	100	1.262.004.000	100	3.687.290.000	Balai Keselamatan Kerja Kelas A	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangk Daerah ***	at				42.421.000		37.280.000		42.421.000		42.421.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ***	Dokumen	24	42.421.000	24	37.280.000	24	42.421.000	72	122.122.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ****				37.280.000		37.280.000		37.280.000		37.280.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Laporan	12	37.280.000	12	37.280.000	12	37.280.000	36	111.840.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		X.XX.01.1.02.07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semes				5.141.000		0		5.141.000		5.141.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Laporan	12	5.141.000	12	0	12	5.141.000	36	10.282.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daera pada Perangkat Daerah ***	h				17.799.000		17.799.000		17.799.000		17.799.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ***	Dokumen	1	17.799.000	1	17.799.000	1	17.799.000	3	53.397.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD ****				17.799.000		17.799.000		17.799.000		17.799.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	17.799.000	1	17.799.000	1	17.799.000	3	53.397.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ***					222.776.000		191.078.000		222.776.000		222.776.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ***	%	100	222.776.000	100	191.078.000	100	222.776.000	100	636.630.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan				19.689.000		19.689.000		19.689.000		19.689.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan ****	Paket	12	19.689.000	12	19.689.000	12	19.689.000	36	59.067.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****				37.000.000		37.000.000		37.000.000		37.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	37.000.000	12	37.000.000	12	37.000.000	36	111.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ****				11.250.000		11.250.000		11.250.000		11.250.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan ****	Paket	12	11.250.000	12	11.250.000	12	11.250.000	36	33.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor ****				31.698.000		0		31.698.000		31.698.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan ****	Paket	12	31.698.000	12	0	12	31.698.000	36	63.396.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				23.139.000		23.139.000		23.139.000		23.139.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan ****	Paket	12	23.139.000	121	23.139.000	12	23.139.000	145	69.417.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ****				0		0		0		0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan ****	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu ****				0		0		0		0		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu ****	Laporan	12	0	12	0	12	0	36	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah ****	Laporan	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	36	300.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ***					0		0		0		0		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ***	Unit	5	0	5	0	5	0	15	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ****				0		0		0		0		
						Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		X.XX.01.1.07.04			Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor ****				0		0		0		0		
						Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang disedikan ****	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel ****				0		0		0		0		
						Jumlah paket mebel yang disediakan ****	Paket	1	0	1	0	1	0	3	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya ****				0		0		0		0		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan ****	Unit	2	0	2	0	2	0	6	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya ****				0		0		0		0		
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan ****	Unit	1	0	1	0	1	0	3	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.09			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****				0		0		0		0		
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan ****	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****				0		0		0		0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan ****	Unit	1	0	1	0	0	0	2	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Ur Pemerintahan Daerah ***	usan				796.494.000		693.289.000		742.658.000		742.658.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ***	Laporan	36	796.494.000	36	693.289.000	36	742.658.000	108	2.232.441.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat ****				8.500.000		8.500.000		8.500.000		8.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat ****	Laporan	12	8.500.000	12	8.500.000	12	8.500.000	36	25.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ****				195.789.000		195.789.000		195.789.000		195.789.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan ****	Laporan	12	195.789.000	12	195.789.000	12	195.789.000	36	587.367.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****				0		0		0		0		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						yang disediakan ****											
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				592.205.000		489.000.000		538.369.000		538.369.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	592.205.000	12	489.000.000	12	538.369.000	36	1.619.574.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Dae Penunjang Urusan Pemerintaha Daerah ***	rah n				236.350.000		170.000.000		236.350.000		236.350.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	10	236.350.000	11	170.000.000	12	236.350.000	33	642.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	15	300.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		X.XX.01.1.09.04			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor ****				0		0		0		0		
						Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya ****	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel ****				0		0		0		0		
						Jumlah mebel yang dipelihara ****	Unit	100	0	100	0	100	0	300	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ****				0		0		0		0		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara ****	Unit	40	0	40	0	40	0	120	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya ****				0		0		0		0		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara ****	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.08			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud ****				0		0		0		0		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara ****	Unit	1	0	1	0	1	0	3	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ****				0		0		0		0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit	3	0	3	0	3	0	9	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****				0		0		0		0		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****				136.350.000		70.000.000		136.350.000		136.350.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit	3	136.350.000	3	70.000.000	3	136.350.000	9	342.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat								2.044.539.000		1.644.539.000		2.180.057.000		2.180.057.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Indeks Manajemen Risiko *	Angka	3,01	2.044.539.000	3,02	1.644.539.000	3,03	2.180.057.000	3,03	5.869.135.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI **						2.044.539.000		1.644.539.000		2.180.057.000		2.180.057.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah **	%	0	2.044.539.000	0	1.644.539.000	0	2.180.057.000	0	5.869.135.000	SEKRETARIAT	Kota Semarang
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ***	dan				2.044.539.000		1.644.539.000		2.180.057.000		2.180.057.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan ***	%	5	2.044.539.000	5	1.644.539.000	5	2.180.057.000	5	5.869.135.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ****				1.270.347.000		1.120.347.000		1.461.001.000		1.461.001.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah ****	Dokumen	10	1.270.347.000	10	1.120.347.000	10	1.461.001.000	10	3.851.695.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ****				774.192.000		524.192.000		719.056.000		719.056.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah ****	Laporan	5	774.192.000	5	524.192.000	5	719.056.000	15	2.017.440.000	SUB BAGIAN PROGRAM	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja merupakan prestasi kerja, yaitu perbandingan antara hasil kerja dengan standar yang ditetapkan. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan ditetapkan guna menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang akan dapat dihitung dan diukur dan digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan maupun tahap setelah selesai dan berfungsi.

Sejalan dengan penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka indikator kinerja digunakan sebagai instrumen dalam pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi. Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tahun 2024-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam tiga tahun mendatang, sejalan dan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 . Selengkapnya Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah yang mengacu tujuan dan atau sasaran Renstra Tahun 2024-2026 dan indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah pada tujuan dan sasaran RPD (Rencana Pembangunan Daerah) Tahun 2024-2026 seperti tersaji pada Tabel 7.1 dan 7.2 berikut :

Tabel 7.1

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Kinerja			Kondisi Kinerja Akhir
			2021	2022	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase pengangguran yang ditempatkan	Persentase	19,7	28,02	28,6	28,64	28,7	28,7
2	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah	Persentase	-	34	62,85	68,57	74,28	74,28
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di Jawa Tengah (Juta Rp)	(Juta Rp)	55,91	57,11	56,00	56,50	57,00	57,00
4	Persentase peningkatan tenaga kerja yang kompeten	Persentase	5,34	9,70	9,24	10,15	10,53	10,53
5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Persentase	50,63	70,52	71,04	71,06	71,08	71,08
6	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persentase	-	90,56	91,07	91,58	92,09	92,09
7	Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan	Persentase	89,51	88,1	81,53	80,96	80,38	80,39

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahunan			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Keterangan
		2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Persentase kenaikan lembaga pelatihan yang terakreditasi	3,54	37,50	38,14	30,59	31,42	31,42	
2	Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	5,34	12,20	8,36	8,39	8,51	8,51	
3	Persentase kenaikan tenaga kerja yang tersertifikasi	0,77	2,45	2,3	2,35	2,4	2,4	
4	Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang industri.	1,85	4,13	2,88	3,2	3,49	3,49	
5	Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa, bahasa asing, budaya dasar dan pekerja migran	46,59	68,72	46,90	46.90	46,98	47,13	
6	Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang pertanian	8,16	9,44	9,48	9,6	9,55	9,62	
7	Persentase kenaikan perusahaan yang menerapkan peningkatan	0,81	4,01	4,4	4,6	4,68	4,68	

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahunan			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Keterangan
		2021	2022	2024	2025	2026		
	produktivitas							
8	Persentase kenaikan tenaga kerja yg dilatih peningkatan produktivitas dan atau kewirausahaan	5,4	13,38	13,13	13,22	13,3	13,3	
9	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	50,63	N/A	N/A	N/A	N/A		Indikator tersebut menjadi indikator sasaran OPD
10	Persentase peningkatan pencari kerja yang di tempatkan di sektor formal	N/A	70,52	71,03	71,05	71,07	71,07	
11	Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru disektor Informal	43,42	55,26	68,1	68,3	68,5	68,5	
12	Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	97,6	97,70	98	98,2	98,4	98,4	
13	Persentase Peningkatan Jumlah LKS Bipartit yang terbentuk	49,63	54,59	49,75	49,77	49,8	49,8	
14	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	89,74	98,57	96,15	96,69	97,7	97,7	
15	Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah	16,02	36,24	44,27	45,54	46,81	46,81	

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahunan			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Keterangan
		2021	2022	2024	2025	2026		
16	Persentase perusahaan yang memenuhi ketentuan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama	24,36	N/A	N/A	N/A	N/A		Indikator tersebut menjadi Indikator Kegiatan di tahun selanjutnya
17	Persentase peningkatan perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3	25,55	25,90	26,4	26,67	26,94	26,94	
18	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	N/A	89,56	89,58	89,59	89,6	89,6	Indikator tersebut merupakan indikator program mulai tahun 2022
19	Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan	89,51	N/A	N/A	N/A	N/A		Indikator tersebut menjadi indikator sasaran OPD
20	Persentase kabupaten/kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Yang Dilakukan Pembinaan	N/A	34,00	62,85	68,57	74,28	74,28	Indikator tersebut merupakan indikator program mulai tahun 2022
21	Persentase kenaikan calon transmigran dilatih bidang pertanian	0,79	3,99	3,61	3,71	3,81	3,81	
22	Persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang di fasilitasi	N/A	5,28	3,61	3,71	3,81	3,81	Indikator tersebut merupakan indikator program mulai tahun 2022-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahunan			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Keterangan
		2021	2022	2024	2025	2026		
23	Persentase penempatan transmigran terhadap animo transmigrasi	0,79	5,28	N/A	N/A	N/A		Indikator tersebut merupakan indikator program di tahun 2021-2022

POHON KINERJA

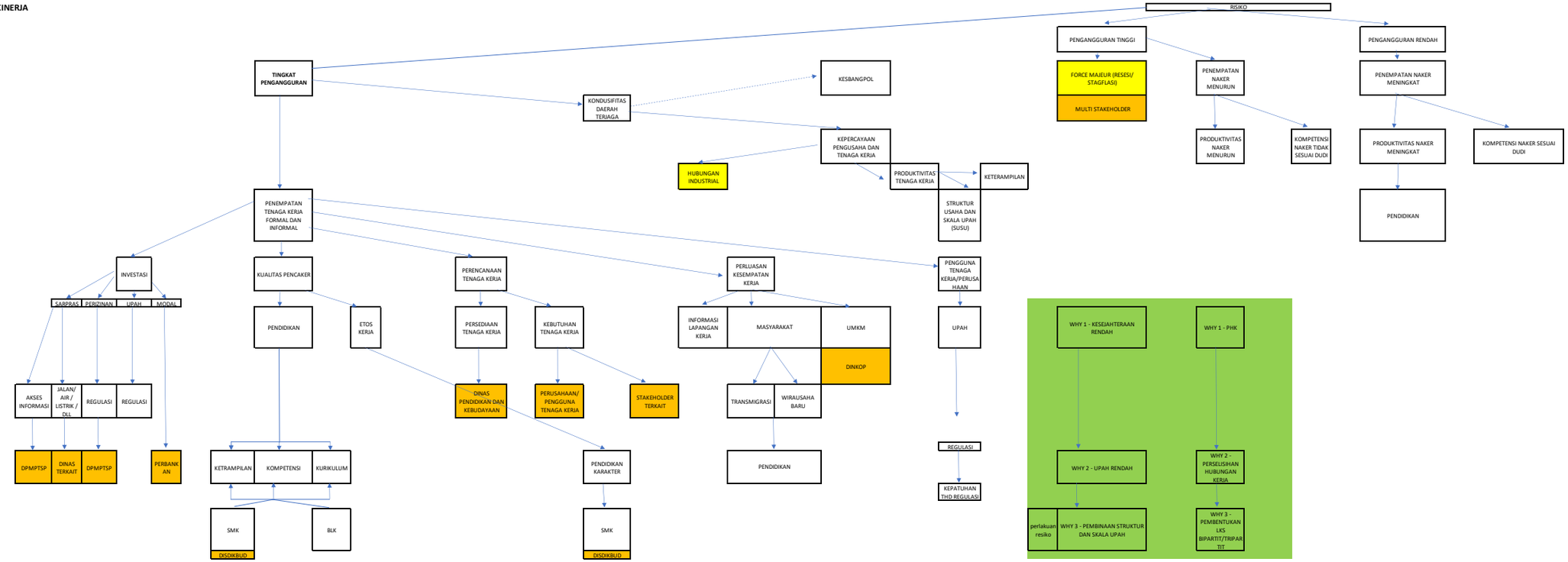

Tabel 1. Identifikasi Risiko

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	Persentase Kabupaten /kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah	Kebijakan, Strategi dan Program Pembangunan urusan tenaga kerja yang ditetapkan kurang tepat .	Resiko Strategis	Kurangnya pemahaman dari Kab/kota dalam menyusun dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah	Kurang tepatnya dalam menentukan target persediaan tenaga kerja dan kebutuhan tenaga kerja serta neraca tenaga kerja dalam perencanaan ke depan .	Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah ; dan masyarakat
2				Banyaknya angkatan kerja yang belum terserap di pasar kerja (penganggur terbuka)	Resiko Strategis	Banyak kab/Kota belum tepat dalam menyusun perkiraan kesempatan kerja	Kurang tepat nya Kebijakan, Strategi dan Program Kegiatan atau Rencana Aksi bidang ketenagakerjaan yang disusun dalam RPJMD Renstra dan Renja OPD	Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah ; dan masyarakat
3				Banyaknya perusahaan padat karya kesulitan mencari tenaga kerja yang dibutuhkan	Resiko Strategis	Banyak perusahaan yang belum menyusun Rencana Tenag Kerja Mikro dan melaporkan kebutuhan tenaga kerja kepada Dinas yang membidangi tenaga kerja setempat (Kab /Prov / Pusat)	Perusahaan belum memberdayakan secara optimal tenaga kerja nya di perusahaan .	Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah ; dan masyarakat
4	Sasaran Strategis	Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Persentase peningkatan tenaga kerja yang kompeten	Kompetensi Pencari Kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja / lowongan pasar kerja .	Resiko Strategis	Pelatihan Kompetensi yang dilakukan kurang tepat sasaran	Tidak terserapnya penempatan tenaga kerja di sektor formal	Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah ; dan masyarakat
5				Terjadinya gratifikasi saat melakukan verifikasi untuk rekomendasi LPK	Resiko Freud	Pengelola LPKS / Lembaga Pelatihan Kerja Swasta ingin cepat mendapat rekomendasi LPK tersebut, supaya dapat dengan cepat untuk melatih pencaker tanpa dilakukan verifikasi oleh Dinas ketenagakerjaan setempat/verifikator untuk merekrut peserta pelatihan dengan job order/permintaan khususnya dari luar negeri.	1. Kompetensi calon tenaga kerja tersebut tidak terjamin kelayakannya akibat lembaga pelatihan yang menyelenggarakan pelatihan tersebut belum dinyatakan layak menyelenggarakan pelatihan/belum diverifikasi . - 2. Pemalsuan dokumen negara termasuk kasus Pidana - 3. Dimungkinkan ada indikasi terjadinya gratifikasi dalam pelayanan dalan verifikasi ijin LPK	Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah ; dan masyarakat
6	Sasaran Strategis	Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja di jawa Tengah (dalam juta rupiah)	Produktivitas dan kompetensi tenaga kerja kurang memadai	Resiko Strategis	Kurangnya pemahaman produktivitas di perusahaan	Produktivitas tenaga kerja kurang optimal, sehingga perusahaan tidak mendapat nilai tambah yang tinggi (tetap) dan menyebabkan upah tenaga kerja tidak naik secara signifikan	Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah; Pengusaha dan Tenaga Kerja Masyarakat Calon Pencari Kerja
						Kurangnya pemahaman tentang tools dan teknik peningkatan produktivitas serta motivasi tenaga kerja dalam peningkatan produktivitas bekerja	Perusahaan belum menerapkan produktivitas secara sepenuhnya dan kurang adanya kreatifitas, kualitas dan kontinyuitas pada Tenaga Kerja	Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah; Pengusaha dan Tenaga Kerja Masyarakat Calon Pencari Kerja
						Kurangnya jumlah instruktur manajemen produktivitas		
7	Sasaran Strategis	Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	Pemberdayaan Masyarakat kurang tepat sasaran	Resiko Strategis	Penentuan lokasi kegiatan pemberdayaan masyarakat berdasarkan usulan yang masuk ke Disnakertans Jateng.	Tidak terserapnya tenaga kerja baru di sektor informal	Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah ; dan masyarakat

8				Pencari kerja yang belum dapat ditempatkan, karena tidak memenuhi kebutuhan pasar kerja	Resiko Strategis	Pencari kerja kurang mendapatkan informasi mengenai kondisi pasar kerja	Pencari kerja yang belum ditempatkan menambah jumlah pengangguran.	Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah Pencari Kerja Masyarakat Calon Pencari Kerja
					Resiko Strategis	Kompetensi Pencari Kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja / lowongan pasar kerja .	Investor tidak dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya sehingga mempengaruhi operasional perusahaan	Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah ; Investor Pemerintah Daerah Instansi / K / L terkait lainnya
					Risiko Operasional	Informasi Pasar Kerja kurang akurat atau Informasi kesempatan kerja / lowongan kerja / kebutuhan tenaga kerja yang terbuka tidak disampaikan kepada dinas ketenagakerjaan setempat secara rutin dan terperinci	Tidak tersaji informasi pasar kerja yang akuntabel dan dapat digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan	Pencari Kerja Pemberi Kerja Stakeholder penempatan tenaga kerja (Apindo, PHRD, HILLSI dll) Instansi / K / L terkait lainnya
9	Sasaran Strategis	Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	Calon Transmigrasi mengundurkan diri saat pemberangkatan ke daerah tujuan penempatan transmigrasi	Risiko Operasional	Rentang waktu pemberangkatan cukup lama, calon transmigran mencari kerja yang lain	Penempatan transmigran tidak terpenuhi targetnya.	Kepala Disnakertrans Provinsi Jateng dan Masyarakat
					Risiko Kemitraan	Alokasi Penempatan Transmigrasi Berdasarkan Pada Kuota yang ditetapkan oleh Pusat (Kewenangan Pusat)	Penempatan transmigran tidak terpenuhi dan tidak sesuai perjanjian kerja sama (PKS)	Kepala Disnakertrans Provinsi Jateng dan Masyarakat
10	Sasaran Strategis	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja dalam hubungan industrial dan jaminan sosial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Perusahaan tidak menerapkan tata kelola kerja yang layak	1. Risiko Kepatuhan 2. Risiko Hukum	Perusahaan tidak mengetahui, memahami atau tidak mau melaksanakan aturan tentang PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur dan Skala Upah dan BPJS Ketenagakerjaan	1. Tidak kondusifnya hubungan industrial yang ada di perusahaan 2. Terdapat sanksi bagi perusahaan yang tidak membuat PP, membentuk LKS Bipartit, menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah, dan mendaftarkan pekerja/buruh pada BPJS Ketenagakerjaan 3. Terdapat disharmonisasi dalam hubungan industrial yang menyebabkan tidak kondusifnya hubungan industrial di masyarakat yang berdampak pada kepercayaan publik/masyarakat secara umum dan khususnya pengusaha dan pekerja/buruh berkaitan dengan pelaksanaan tata kerja yang layak (PP, LKS Bipartit, Struktur dan skala upah, dan BPJS Ketenagakerjaan), sehingga akan menimbulkan gejolak di masyarakat, misalnya: unjuk rasa.	Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah ; Pengusaha dan Pekerja /buruh
11	Sasaran Strategis	Meningkatnya Kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3 dan lingkungan Kerja)	Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan	Perusahaan yang tidak mematuhi regulasi	Resiko Kepatuhan	Ketidaktahuan akan aturan ketenagakerjaan	Keselamatan tenaga kerja tidak terjamin	Pekerja

12				Pemalsuan dokumen pengujian K3 oleh Pihak Penguji Independen (PJK3) dengan mencantumkan nama pegawai pengawas ketenagakerjaan dan tanpa diketahui oleh pengawas yang bersangkutan.	Resiko Hukum	PJK3 ingin cepat memberikan rekomendasi untuk penerbitan Surat Keterangan Layak Uji K3 di perusahaan tanpa dilakukan verifikasi K3 oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang bersangkutan.	1. Keselamatan tenaga kerja di Perusahaan tersebut tidak terjamin kelayakannya akibat hasil riksa uji yang dilaksanakan belum dinyatakan layak/belum diverifikasi oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan spesialis tertentu. - 2. Pemalsuan dokumen negara termasuk kasus Pidana - 3. Pegawai pengawas ketenagakerjaan dirugikan nama baik dan integritasnya .	Kepala Disnakertrans Jateng dan Pekerja di perusahaan

Tabel 2. Analisis Risiko

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5		7	8	9	10
Kebijakan, Strategi dan Program Pembangunan urusan tenaga kerja yang ditetapkan kurang tepat .	4	4	16	ada	- Membuat Tim RTKD Provinsi Jawa Tengah - Menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) Provinsi Jawa Tengah 2022-2027	Belum Memadai	3	4	12
Banyaknya angkatan kerja yang belum terserap di pasar kerja (penganggur terbuka)	4	4	16	ada	- Pembinaan dan monitoring ke kab/kota terkait penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah yang selaras dengan perencanaan pembangunan dan penganganggaran di daerah .	Belum Memadai	3	4	12
Banyaknya perusahaan padat karya kesulitan mencari tenaga kerja yang dibutuhkan	4	4	16	ada	-Pembinaan tentang Rencana Tenaga Kerja Mikro pada aparatur Dinas ketenagakerjaan Kab/kota dan HRD (Human Resource Development) di Perusahaan .	Belum Memadai	3	4	12
Kompetensi Pencari Kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja / lowongan pasar kerja .	4	4	16	ada	-Identifikasi kebutuhan latihan sesuai dengan kebutuhan pengguna / pasar kerja - Pemasaran program pelatihan yang diksanakan oleh Balai Latihan Kerja di Lingkungan Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah - Lembaga Pelatihan Kerja Swasta sedang dalam proses diintegrasikan pada aplikasi e makaryo.	Belum Memadai	3	4	12
Terjadinya gratifikasi saat melakukan verifikasi untuk rekomendasi LPK	4	4	16	ada	Laporan secara manual dan direncanakan proses pembuatan aplikasi tahun 2024.	Belum Memadai	3	4	12
Produktivitas dan kompetensi tenaga kerja kurang memadai	4	5	20	Ada	Berbagai kegiatan untuk peningkatan produktivitas	Belum memadai	4	4	16
Pemberdayaan masyarakat kurang tepat sasaran	4	4	16	ada	Pemberdayaaan kewirausahaan bagi masyarakat kerjasama dengan market place ; dan padat karya	Belum Memadai	3	4	12
Pencari kerja yang belum dapat ditempatkan, karena tidak memenuhi kebutuhan pasar kerja	4	5	20	Ada	Sosialisasi, Penyuluhan dan Bimbingan, Pembekalan, Pengembangan Aplikasi	Belum memadai	4	4	16

Calon Transmigrasi mengundurkan diri saat pemberangkatan ke daerah tujuan penempatan transmigrasi	3	5	15	Ada	Sosialisasi	Belum memadai	3	4	12
Perusahaan tidak menerapkan tata kelola kerja yang layak	4	4	16	ada	Pembinaan	Belum Memadai	3	4	12
Perusahaan yang tidak mematuhi regulasi	4	5	20	ada	Pembinaan dan Pemeriksaan	Belum Memadai	3	4	12
Pemalsuan dokumen pengujian K3 oleh Pihak Penguji Independen (PJK3) dengan mencantumkan nama pegawai pengawas ketenagakerjaan dan tanpa diketahui oleh pengawas yang bersangkutan	4	5	20	ada	Dengan Aplikasi SIKATIGA (dengan Barcode)	Belum Memadai	3	4	12

Tabel 3. Daftar Risiko Prioritas

	Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
	1	2	3	4	5
1	Kebijakan, Strategi dan Program Pembangunan urusan tenaga kerja yang ditetapkan kurang tepat .	12	Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi jawa Tengah	Kurangnya pemahaman dari Kab/kota dalam menyusun dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah	Kurang tepatnya dalam menentukan target persediaan tenaga kerja dan kebutuhan tenaga kerja serta neraca tenaga kerja dalam perencanaan ke depan

2	Terjadinya gratifikasi saat melakukan verifikasi untuk rekomendasi LPK	12	Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi jawa Tengah	Pengelola LPKS / Lembaga Pelatihan Kerja Swasta ingin cepat mendapat rekomendasi LPK tersebut, supaya dapat dengan cepat untuk melatih pencaker tanpa dilakukan verifikasi oleh Dinas ketenagakerjaan setempat/verifikator untuk merekrut peserta pelatihan dengan job order/permintaan khususnya dari luar negeri.	1. Kompetensi calon tenaga kerja tersebut tidak terjamin kelayakannya akibat lembaga pelatihan yang menyelenggarakan pelatihan tersebut belum dinyatakan layak menyelenggarakan pelatihan/belum diverifikasi . - 2. Pemalsuan dokumen negara termasuk kasus Pidana - 3. Dimungkinkan ada indikasi terjadinya gratifikasi dalam pelayanan dalan verifikasi ijin LPK
3	Produktivitas dan kompetensi tenaga kerja kurang memadai	16	Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi jawa Tengah	Kurangnya pemahaman produktivitas di perusahaan	Produktivitas tenaga kerja kurang optimal, sehingga perusahaan tidak mendapat nilai tambah yang tinggi (tetap) dan menyebabkan upah tenaga kerja tidak naik secara signifikan
4	Pemberdayaan masyarakat kurang tepat sasaran	12	Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah	Penentuan lokasi kegiatan pemberdayaan masyarakat berdasarkan usulan yang masuk ke Disnakertans jateng.	Tidak terserapnya tenaga kerja baru di sektor informal
5	Pencari kerja yang belum dapat ditempatkan, karena tidak memenuhi kebutuhan pasar kerja	16	Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah	Pencari kerja kurang mendapatkan informasi mengenai kondisi pasar kerja	Pencari kerja yang belum ditempatkan menambah jumlah pengangguran.

6	Calon Transmigrasi mengundurkan diri saat pemberangkatan ke daerah tujuan penempatan transmigrasi	12	Kepala Dinas Nakertrans	Rentang waktu pemberangkatan cukup lama, calon transmigran mencari kerja yang lain	Penempatan transmigran tidak terpenuhi targetnya.
7	Perusahaan tidak menerapkan tata kelola kerja yang layak	12	Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah	Perusahaan tidak mengetahui, memahami atau tidak mau melaksanakan aturan tentang PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur dan Skala Upah dan BPJS Ketenagakerjaan	1. Tidak kondusifnya hubungan industrial yang ada di perusahaan 2. Terdapat sanksi bagi perusahaan yang tidak membuat PP, membentuk LKS Bipartit, menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah, dan mendaftarkan pekerja/buruh pada BPJS Ketenagakerjaan 3. Terdapat disharmonisasi dalam hubungan industrial yang menyebabkan tidak kondusifnya hubungan industrial di

8	Pemalsuan dokumen pengujian K3 oleh Pihak Penguji Independen (PJK3) dengan mencantumkan nama pegawai pengawas ketenagakerjaan dan tanpa diketahui oleh pengawas yang bersangkutan.	12	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi jawa Tengah	PJK3 ingin cepat memberikan rekomendasi untuk penerbitan Surat Keterangan Layak Uji K3 di perusahaan tanpa dilakukan verifikasi K3 oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang bersangkutan.	1. Keselamatan tenaga kerja di Perusahaan tersebut tidak terjamin kelayakannya akibat hasil riksa uji yang dilaksanakan belum dinyatakan layak/belum diverifikasi oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan spesialis tertentu. - 2. Pemalsuan dokumen negara termasuk kasus Pidana - 3. Pegawai pengawas ketenagakerjaan dirugikan nama baik dan

Tabel 4. Rencana Tindak Pengendalian

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	Persentase Kabupaten /kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah	Kebijakan, Strategi dan Program Pembangunan urusan tenaga kerja yang ditetapkan kurang tepat .	12	Kurangnya pemahaman dari Kab/kota dalam menyusun dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah	Kurang tepatnya dalam menentukan target persediaan tenaga kerja dan kebutuhan tenaga kerja serta neraca tenaga kerja dalam perencanaan ke depan .	- Melakukan Pembinaan dan Pendampingan pada Aparatur pegawai didaerah (Kab/Kota /Prov) dalam menyusun dokumen RTKD . '- Melakukan Reviu terhadap RTKD Provinsi Jawa Tengah tiap tahun . - Untuk menilai keakurasian hasil perkiraan 6 indikator dalam RTKD dengan realisasi yang diterbitkan BPS pada tiap tahunnya. - Menyampaikan hasil analisis untuk bahan kebijakan dan evaluasi kebijakan, Strategi dan Program Pembangunan urusan tenaga kerja .	Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desember

Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Persentase peningkatan tenaga kerja yang kompeten	Terjadinya gratifikasi saat melakukan verifikasi untuk rekomendasi LPK	12	Pengelola LPKS / Lembaga Pelatihan Kerja Swasta ingin cepat mendapat rekomendasi LPK tersebut, supaya dapat dengan cepat untuk melatih pencaker tanpa dilakukan verifikasi oleh Dinas ketenagakerjaan setempat/ verifikator untuk merekrut peserta pelatihan dengan job order/permintaan khususnya dari luar negeri.	1. Kompetensi calon tenaga kerja tersebut tidak terjamin kelayakannya akibat lembaga pelatihan yang menyelenggarakan pelatihan tersebut belum dinyatakan layak menyelenggarakan pelatihan/belum diverifikasi . - 2. Pemalsuan dokumen negara termasuk kasus Pidana - 3. Dimungkinkan ada indikasi terjadinya gratifikasi dalam pelayanan dalan verifikasi ijin LPK	-Intensifikasi dalam peningkatan kapasitas pegawai terkait etos kerja dan budaya kerja supaya berintegritas yang tinggi . - Merencanakan pembuatan aplikasi di tahun 2024	Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	Januari - Desember
Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja di jawa Tengah (dalam juta rupiah)	Produktivitas dan kompetensi tenaga kerja kurang memadai	16	Kurangnya pemahaman produktivitas di perusahaan	Produktivitas tenaga kerja kurang optimal, sehingga perusahaan tidak mendapat nilai tambah yang tinggi (tetap) dan menyebabkan upah tenaga kerja tidak naik secara signifikan	- Sosialisasi , pelatihan pelatihan peningkatan produktivitas , pengukuran produktivitas baik untuk pencari kerja , tenaga kerja di perusahaan dan wirausaha baru di masyarakat serta pengusaha / pengelola perusahaan.	Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	Januari - Desember
Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	Pemberdayaan Masyarakat kurang tepat sasaran	12	Penentuan lokasi kegiatan pemberdayaan masyarakat berdasarkan usulan yang masuk ke Disnakertans jateng	Tidak terserapnya tenaga kerja baru di sektor informal	1. Penyuluhan di masyarakat tentang peluang kerja di sektor Informal. 2. Kolaborasi dan kerjasama lintas sektor dengan stake holder terkait dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja sektor informal.	Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	Januari - Desember
Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	Pencari kerja yang belum dapat ditempatkan, karena tidak memenuhi kebutuhan pasar kerja	16	Pencari kerja kurang mendapatkan informasi mengenai kondisi pasar kerja	Pencari kerja yang belum ditempatkan menambah jumlah pengangguran.	Sosialisasi, Penyuluhan dan Bimbingan, Pembekalan, Pengembangan Aplikasi	Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	Januari - Desember
Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	Calon Transmigrasi mengundurkan diri saat pemberangkatan ke daerah tujuan penempatan transmigrasi	12	Rentang waktu pemberangkatan cukup lama,calon transmigran mencari kerja yang lain	Penempatan transmigran tidak terpenuhi targetnya.	Sosialisasi	Kepala Dinas Nakertrans	6 bulan setiap tahun

Meningkatnya perlindungan tenaga kerja dalam hubungan industrial dan jaminan sosial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Perusahaan tidak menerapkan tata kelola kerja yang layak	12	Perusahaan tidak mengetahui, memahami atau tidak mau melaksanakan aturan tentang PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur dan Skala Upah dan BPJS Ketenagakerjaan	1. Tidak kondusifnya hubungan industrial yang ada di perusahaan 2. Terdapat sanksi bagi perusahaan yang tidak membuat PP, membentuk LKS Bipartit, menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah, dan mendaftarkan pekerja/buruh pada BPJS Ketenagakerjaan 3. Terdapat disharmonisasi dalam hubungan industrial yang menyebabkan tidak kondusifnya hubungan industrial di masyarakat yang berdampak pada kepercayaan publik/masyarakat secara umum dan khususnya pengusaha dan pekerja/buruh berkaitan dengan pelaksanaan tata kerja yang layak (PP, LKS Bipartit, Struktur dan skala upah, dan BPJS Ketenagakerjaan), sehingga akan menimbulkan gejolak di masyarakat, misalnya: unjuk rasa.	Pembinaan : PP/PKB ; LKS Bipartit ; Struktur dan Skala Upah ; kepesertaan Jaminan sosial (BPJS Ketenaga-kerjaan)	Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	Januari - Desember
Meningkatnya Kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3 dan lingkungan Kerja)	Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan	Pemalsuan dokumen pengujian K3 oleh Pihak Penguji Independen (PJK3) dengan mencantumkan nama pegawai pengawas ketenagakerjaan dan tanpa diketahui oleh pengawas yang bersangkutan.	12	PJK3 ingin cepat memberikan rekomendasi untuk penerbitan Surat Keterangan Layak Uji K3 di perusahaan tanpa dilakukan verifikasi K3 oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang bersangkutan.	1. Keselamatan tenaga kerja di Perusahaan tersebut tidak terjamin kelayakannya akibat hasil riksa uji yang dilaksanakan belum dinyatakan layak/belum diverifikasi oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan spesialis tertentu. - 2. Pemalsuan dokumen negara termasuk kasus Pidana - 3. Pegawai pengawas ketenagakerjaan dirugikan nama baik dan integritasnya .	Aplikasi SIKATIGA yang menggunakan Barcode rentan untuk disalahgunakan , sehingga membutuhkan kebijakan dan langkah strategis baik dalam penyempurnaan Aplikasi SIKATIGA tersebut dan untuk memitigasi terjadinya pemalsuan dokumen Uji K3 .	Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	Januari - Desember (Setiap Tahun)

CASCADING DISNAKERTRANS

TUJUAN :
MENINGKATNYA PENGURANGAN PENGANGGURAN

INDIKATOR :
PERSENTASE PENGANGGURAN YANG DITEMPATKAN

KEPALA DINAS (ESS II)

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas perencanaan tenaga kerja daerah	Sasaran 2 : Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Naker	Sasaran 3 : Meningkatnya Penempatan Naker dan Perluasan Kesempatan Kerja	Sasaran 4. Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja HI dan Jamsos	Sasaran 5 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Norma Ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3 dan Lingk Kerja
Indikator Sasaran : Persentase Kab/Kota Menyusun RTKD	Indikator Sasaran : 1. Persentase Peningkatan tenaga kerja yang Kompeten 2. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di Jateng	Indikator Sasaran : Persentase tenaga kerja Ditempatkan	Indikator Sasaran : Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP, PKB, LKS Bipartit, SUSU dan terdaftar)	Indikator Sasaran : Persentase Penurunan Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan

KEPALA BIDANG (EES III)

PROGRAM Perencanaan Tenaga Kerja	PROGRAM Pelatihan Kerja dan Produktivitasn Naker	PROGRAM Penempatan Tenaga Kerja PROGRAM Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Program Hubungan Industrial	PROGRAM Pengawasan Ketenagakerjaam

Lanjutan

Indikator Program Perencanaan Tenaga Kerja :

1. Persentase kab/kota yang menyusun Rencana Tenga Kerja yang dilakukan pembinaan

Indikator Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja :

1. Persentase kenaikan lembaga pelatihan yang terakreditasi)
2. Persentase kenaikan pencari kerja dan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi
3. Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang industri
4. Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa, bahasa asing, budaya dasar dan pekerjaan migran
5. Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang pertanian
6. Persentase kenaikan perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas
7. Persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi
8. Persentase kenaikan tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas atau kewirausahaan

Indikator Program : Penempatan Tenaga Kerja

1. Persentase pencari kerja yang ditempatkan
2. Persentase Peningkatan penyerapan tenaga kerja baru di sektor informal

Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

1.Persentase penempat-an trans-migran terhadap animo transmigrasi

2.Persentase kenaikan calon transmigran dilatih di bidang pertanian

Indikator Program Hubungan Industrial :

1. Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan
2. Persentase peningkatan jumlah LKS Bipartit yang terbentuk
3. Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial
4. Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah

Indikator Program Pengawasan Ketenagakerjaan :

1. Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan
2. Persentase peningkat-an perusahaan memilii kategori baik dalam penerapan K3

Lanjutan

KEPALA SEKSI (ESS IV) Kegiatan

Contoh kegiatan dan sub kegiatan

KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro 2. Penyusunan Rencana Tenag Kerja Mikro
Pelaksanaan Latihan kerja berdasarkan Klaster kompetensi	1. Proses pelaksanaan Pendidikan Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi 2. Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja sama ntuk penyediaan Instruktur serta sarana dan prasarana Lembaga pelatihan Kerja
Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Pelaksanaan konsultasi Produktivitas kepada perusahaan menengah
Pelayanan antar kerja lintas daerah kab/kota	1. Penyediaan Sumber daya Pelayanan antar kerja 2. Pelayanan antar kerja 3. Perluasan kesempatan kerja ...dst
Pengesahan peraturan Perusahaan dan pendaftaran Perjanjian kerja bersama untuk mempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) kab/kota	1. Pengesahan peraturan Perusahaan yang terkait dengan hubungan Industrial 2. Penyelenggaraan Pendataan dan informasi Sarana hubungan Industrial dan Jamsos. Tenaga kerja 3. ..... dst
Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	1. Pengawasan Pelaksanaan Norma kerja di perusahaan 2. Pelayanan K3 di perusahaan 3. Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di perusahaan